



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno – Hatta No. 59, Telp (0293) 788003-788004 FAX. (0293) 789257

Kota Mungkid 56511

LAPORAN AKHIR

**Kegiatan: Pengadaan Belanja Jasa
yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain (Sub
Pengawasan Urusan Pemerintahan
Perekonomian): Jasa Konsultansi
Penyusunan Kajian Potensi
Pengembangan Ketep Pass**

Tahun 2025



CV. ANDHITA KARYA KONSULTAN

Jl. Bougenville II No.623 RT/RW 006/002, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan
Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : andhitakarya@gmail.com

Telp : +62 877-1902-6225

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akhir Pekerjaan: Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Sub Pengawasan Urusan Pemerintahan Perekonomian) : Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Ketep Pass dapat terselesaikan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan atau otonomi untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam serta potensi-potensi yang ada pada daerahnya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk mendukung pemerintahan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang berasal dari sektor pariwisata. PAD yang berasal dari sektor pariwisata dapat dilihat dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Sementara dari komponen retribusi daerah dapat dilihat dari retribusi parkir, retribusi obyek wisata dan retribusi pedagang. Faktor yang mempengaruhi penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah jumlah wisatawan (domestik dan mancanegara) serta jenis dan jumlah obyek wisata.

Obyek wisata Ketep Pass yang berlokasi di Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang adalah salah satu obyek wisata yang mendatangkan banyak wisatawan. Selama ini obyek wisata Ketep Pass dikelola oleh Badan Pengelola Obyek Wisata (BPOW) Ketep Pass yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Magelang. Badan Hukum BPOW Ketep Pass sendiri merupakan badan hukum transisi dengan kepemilikan asset oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Hingga saat ini belum terjadi kesepakatan diantara dua pemerintah daerah ini mengenai badan hukum definitif untuk pengelolaan obyek wisata Ketep Pass.

Semoga dengan adanya laporan akhir kajian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak khususnya legislatif dan eksekutif dalam mengoptimalkan PAD dari

sektor pariwisata khususnya obyek wisata Ketep Pass, mengakselerasi masa transisi BPOW Ketep Pass menjadi BUMD dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada para pihak khususnya manajemen BPOW Ketep Pass, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Kabag Perekonomian Kabupaten Magelang, BPPKAD, Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, Ketua PHRI Kabupaten Magelang dan pihak lain para pelaku industry pariwisata di Kabupaten Magelang yang telah banyak membantu dengan penyediaan data dan wawancara untuk mendalami materi kajian ini. Terimakasih pula kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dan Bapak-Bapak Anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan segala masukan dan diskusi yang berarti bagi tersusunnya kajian ini. Semoga kajian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang dengan berbagai inisiatif dan upaya serta cara masing-masing.

Kota Mungkid, 10 November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
 BAB I Pendahuluan	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud dan Tujuan	2
I.3 Sasaran	3
 BAB II Metodologi	
2.1 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.2 Metode Pendekatan.....	4
2.3 Kebutuhan dan Sumber Data	4
2.4 Teknik Pengumpulan Data	5
2.5 Data yang Dikumpulkan	5
2.6 Ruang Lingkup Kajian	8
2.7 Lokasi dan waktu Pelaksanaan Kajian	8
2.8 Sistematika Penulisan	8
 BAB III Telaah Literatur	
3.1 Peran Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan PAD Kabupaten.....	10
3.2 Referensi Hukum	14
3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
3.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24
3.5 Hasil Pajak Daerah	25
3.6 Pertumbuhan Pajak Daerah	31

3.7 Retribusi Daerah	34
3.8 Pertumbuhan Retribusi Daerah	37
3.9 Kajian Sebelumnya	40

BAB IV Potensi dan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Ketep Pass Kabupaten

Magelang

4.1 Kondisi Alam dan Peran Dalam Wisata di Kabupaten Magelang.....	52
4.2 Potensi Pariwisata Kabupaten Magelang	54
4.3 Pembangunan Kepariwisataaan Berdasar RIPPARDA Kabupaten Magelang.....	55
4.4 Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang	57
4.5 Pembangunan Pariwisata dalam Kawasan Strategis	59
4.6 Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Magelang.....	72
4.7 Potret Persebaran Wisatawan Di Kabupaten Magelang	76
4.8 Potret Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	82
4.9 Daya Tarik Wisata Ketep Pass Kabupaten Magelang	86

BAB V Kesimpulan

5.1 PAD Kabupaten Magelang dari Sektor Pariwisata	124
5.2 Pariwisata di Kabupaten Magelang	126
5.3 Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Ketep Pass	128
5.4 Kelembagaan Pariwisata	128

BAB VI Rekomendasi

6.1 Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Ketep Pass.....	130
6.2 Rekomendasi untuk pengembangan DTW Ketep Pass	132
6.3 Kelembagaan Pariwisata Ketep Pass	143
6.4 Transisi Menuju Kelembagaan BUMD Pariwisata	144

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia- Tahun 2021-2023 (dalam rupiah)	17
Tabel 3.2 Kontribusi PAD, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Pemerintah – Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 2021-2023(persentase).....	17
Tabel 3.3 Pertumbuhan Komponen PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah- Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 2021-2023(persentase).....	17
Tabel 3.4 Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan – dan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Magelang Tahun 2016- 2024 (dalam rupiah).....	20
Tabel 3.5 Rasio Kemandirian Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024- (dalam jutaan rupiah).....	21
Tabel 3.6 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan – Keuangan Daerah.....	21
Tabel 3.7 Pendapatan Asli Daerah dan Derajat Desentralisasi Kabupaten – Magelang Tahun 2010-2019(dalam ribuan rupiah)	22
Tabel 3.8 Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan Kabupaten Magelang- Tahun 2010-2024	23
Tabel 3.9 Komponen PAD dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten – Magelang Tahun 2016-2024(persentase).....	24
Tabel 3.10 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024 (dalam rupiah).....	27
Tabel 3.11 Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Kelas Tahun 2016-2024.....	28
Tabel 3.12 Penerimaan Pajak Restoran Berdasarkan Jenis Tahun 2016-2024.....	28
Tabel 3.13 Penerimaan Pajak Hiburan Berdasarkan Jenis Tahun 2016-2024.....	29
Tabel 3.14 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Magelang tahun 2016 – 2024 ...	32
Tabel 3.15 Realisasi PBJT 2024	33

Tabel 3.16 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang – tahun 2016 - 2024	35
Tabel 3.17 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten – Magelang tahun 2016 - 2024.....	36
Tabel 3.18 Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang – Tahun 2016-2024.....	39
Tabel 4.1 Jenis Wisata dan Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang- Tahun 2025.....	58
Tabel 4.2 Kawasan Strategis Pariwisata A Kabupaten Magelang 2014-2034 ...	63
Tabel 4.3 Pengunjung Daya Tarik Wisata Nepal Van Java, Mangli Sky View – dan Silancur Highland Kabupaten Magelang 2024.....	64
Tabel 4.4 Kawasan Strategis Pariwisata B Kabupaten Magelang 2014-2034) .	65
Tabel 4.5 Kawasan Strategis Pariwisata C Kabupaten Magelang 2014-2034 ..	67
Tabel 4.6 Festival Lima Gunung 2022-2025 di Kabupaten Magelang.....	68
Tabel 4.7 Kawasan Strategis Pariwisata D Kabupaten Magelang 2014-2034 ..	71
Tabel 4.8 Desa Wisata Kabupaten Magelang 2025	75
Tabel 4.9 Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang dan Jumlah Wisatawan- Tahun 2023.....	77
Tabel 4.10 Calendar of Events (COE) Candi Borobudur pada masa normal – sebelum covid 19	78
Tabel 4.11 Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Obyek Wisata – Kabupaten Magelang 2008-2024.....	83
Tabel 4.12 Jumlah dan Pertumbuhan Wisatawan 10 Obyek Wisata – Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024.....	84
Tabel 4.13 Pendapatan Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang – Tahun 2022-2025	90
Tabel 4.14 Jumlah dan Pemilik Kios di Obyek Wisata Ketep Pass 2025	92
Tabel 4.15 Ketep Summit Festival 2017-2025	94
Tabel 4.16 Asesmen DTW Milik Pemkab Magelang 2023	100

Tabel 4.17 Asesmen DTW Milik Pemkab Magelang 2023	101
Tabel 4.18 Pendapatan dan Bagi Hasil Daya Tarik Wisata Ketep Pass – Tahun 2016-2024	102
Tabel 4.19 Rute Angkutan Perdesaan dan Jumlah Armada Tahun 2024	105
Tabel 4.20 Sumberdaya Manusia BPOW Ketep Pass Berdasarkan Tingkat – Pendidikan 2025	115
Tabel 4.21 Karyawan BPOW Ketep Pass Berdasarkan Kelompok Umur 2025 .	115
Tabel 4.22 Karyawan BPOW Ketep Pass Berdasrkan Masa Kerja 2025	116
Tabel 4.23 Karyawan BPOW Ketep Pass Berdasarkan Fungsi 2025.....	116
Tabel 4.24 Gaji Terendah dan Tertinggi BPOW Ketep Pass 2025	117
Tabel 4.25 Pendapatan dan Biaya BPOW Ketep Pass Tahun 2024	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2024	53
Gambar 4.2 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Magelang 2014-2034	61
Gambar 4.3 Peta Kawasan Strategis Pariwisata A Kabupaten Magelang 2014-2034	62
Gambar 4.4 Peta Kawasan Strategis Pariwisata B Kabupaten Magelang 2014-2034	64
Gambar 4.5 Peta Kawasan Strategis Pariwisata C Kabupaten Magelang 2014-2034	66
Gambar 4.6 Highlight Pariwisata Jawa Tengah 2024.....	69
Gambar 4.7 Peta Kawasan Strategis Pariwisata D Kabupaten Magelang 2014-2034	70
Gambar 4.8 Jumlah Wisatawan Kabupaten Magelang 2016-2024.....	85
Gambar 4.9 Jumlah Wisatawan Kabupaten Magelang 2016-2024.....	89
Gambar 4.10 Pendapatan BPOW Ketep Pass 2016-2025	91
Gambar 4.11 Bagan Organisasi BPOW Ketep Pass.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan harapan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Kabupaten sebagai daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin.

Agar dapat mencapai tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah mesti mampu membiayai belanja daerah dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Sumber PAD terdiri atas: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD yang berasal dari sektor pariwisata dapat dilihat dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang berasal dari sektor

pariwisata terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sementara dari komponen retribusi daerah dapat dilihat dari retribusi parkir, retribusi daya tarik wisata dan retribusi pedagang. Faktor yang mempengaruhi penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah jumlah wisatawan (nusantara dan mancanegara) serta jenis dan jumlah daya tarik wisata.

Daya tarik wisata Ketep Pass yang berlokasi di Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang adalah salah satu daya tarik wisata yang mendatangkan banyak wisatawan. Selama ini daya tarik wisata Ketep Pass dikelola oleh Badan Pengelola Obyek Wisata (BPOW) Ketep Pass yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Magelang. Badan Hukum BPOW Ketep Pass sendiri merupakan badan hukum transisi dengan kepemilikan asset oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Hingga saat ini belum terjadi kesepakatan diantara dua pemerintah daerah ini mengenai badan hukum definitif untuk pengelolaan daya tarik wisata Ketep Pass.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Pekerjaan: Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Sub Pengawasan Urusan Pemerintahan Perekonomian) : Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Ketep Pass adalah untuk memberikan dasar akademik terhadap kebijakan pengembangan obyek wisata Ketep Pass Kabupaten Magelang.

Adapun tujuan dari Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Ketep Pass Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Mewujudkan penggunaan data, fakta dan analisis yang mendukung fungsi legislatif dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor pariwisata Kabupaten Magelang utamanya dari daya tarik wisata Ketep Pass Kabupaten Magelang;
2. Mewujudkan penggunaan data, informasi dan bukti yang mendukung fungsi legislatif dalam pembentukan kebijakan peningkatan pendapatan

asli daerah melalui sektor pariwisata khususnya daya tarik wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang

1.3. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kajian ini adalah adanya Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Ketep Pass.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun dokumen ini, dilakukan beberapa metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan oleh narasumber utama melalui survei lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan melalui studi literatur, studi media, dan juga berbagai data yang berasal dari instansi maupun institusi terkait.

2.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Kajian Potensi Pengembangan Ketep Pass, disesuaikan dengan aspek yang dibutuhkan dan tingkat keperluannya, disamping itu pendekatan dimaksudkan untuk memudahkan dalam mendapatkan data baik secara kuantitatif dan kualitatif, sesuai dengan kelengkapan data dan agar tercapai maksud dan tujuannya sesuai yang dijabarkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2.3. Kebutuhan dan Sumber Data

Kebutuhan dan sumber data pada pelaksanaan Kajian Potensi Pengembangan Ketep Pass, berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber sebagai berikut:

1. BPPKAD, Bappeda/Balitbangda, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Bagian Perekonomian dan SDA, Tata Pemerintahan, Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass, Sekwan DPRD Kabupaten Magelang dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Magelang.

2. Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan kegiatan pariwisata dan kegiatan ekonomi di Ketep Pass, dan tidak terbatas pada Asosiasi Usaha/Profesi dan lainnya

Survei lapangan diperlukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan pencatatan langsung di lapangan dan mengadakan *depth interview* (wawancara mendalam). Data-data primer yang diperlukan untuk Kajian Potensi dan Pengembangan Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang, meliputi :

1. Badan Pelaksana Obyek Wisata Ketep Pas
2. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
3. Dinas Perhubungan
4. BPPKAD
5. Bagian Perekonomian
6. Tata Pemerintahan

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini dibagi dalam dua tahap pengumpulan data. Tahap pertama difokuskan kepada aktivitas *desk research* yang meliputi telaah pustaka dan pencarian data sekunder. Tahap kedua akan memfokuskan pada pencarian data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan nara sumber terpilih baik dari kalangan pejabat pemerintahan, profesi maupun anggota organisasi profesi dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

2.5. Data yang Dikumpulkan

1. Adapun data dasar dalam kajian ini sebagai berikut:
 - a. Jumlah kunjungan wisatawan menurut obyek wisata Tahun 2016-2023
 - b. Pandapatan BPOW Ketep Pass Tahun 2020-2023
 - c. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2024
 - d. Kabupaten Magelang Dalam Angka 2023-2025

e. Kabupaten Magelang Dalam Infografis 2025

2. Adapun studi-studi terdahulu yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. Analisis Potensi sektor Pariwisata Di Kabupaten Magelang oleh Whinarko Julipijanto (2014), Jurnal Penelitian Inovasi Vol. 40 No. 2. 15 Februari 2014 : 70-85
- b. Kontribusi Pendapatan Retribusi Daya Tarik Wisata (DTW) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 oleh Rochmah Dewi Kusumawati (2018), Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang
- c. Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 oleh Nina Purwaningsih dan Suci Nasehati Sunaningsih (2021), Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 3, 2021 pg. 471-478
- d. Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang oleh Faiz et al (2021), DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 3 Nomor 2 , 2021
- e. Potensi dan Pengembangan Wahana Obyek Wisata Alam sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi Keluarga di Kabupaten Magelang oleh Hadji et al (2017), The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang
- f. Pengaruh Daya Tarik Dan Word-Of-Mouth Terhadap Kunjungan Ulang Melalui Kepuasan oleh Prastiwi dan Farida (2017), Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro , 2017
- g. Pembangunan Desa Wisata Ketep Magelang Studi Proses dan Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal oleh Ikhsan Hidayah (2021), Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 2, no. 2 (2018), hal. 287-306
- h. Pengaruh Daya Tarik Wisata, Citra Wisata, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Kembali Wisatawan Di Objek

Wisata Ketep Pass oleh Trisna Widjianto (2019), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2019

- i. Daya Tarik Wisata Ketep Pass Masa Pandemi di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah oleh Rifky Ryantony (2022), Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang
- j. Langkah Promosi Objek Wisata Daerah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Magelang oleh Susilo dan Yulianto (2018), Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No.2 September 2018
- k. Pengembangan Model Kelembagaan Pada Daya Tarik Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Magelang oleh Nabila et al (2022), Bappeda Dan Litbang Kabupaten Magelang, 2018
- l. Analisis Peran SDM Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Magelang oleh Nawaningrum dan Atmaja (2022), Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research Vol. 6 No.1, Februari 2022
- m. Laporan Akhir Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata tahun 2022, Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang
- n. Kajian Manajemen Bisnis Berkelanjutan BUMD untuk Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang (2023), Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

2.6. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup Kajian Potensi dan Pengembangan Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang ini meliputi :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi PAD Kabupaten Magelang khususnya untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah yang berasal dari sektor pariwisata termasuk kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap PAD dan Penerimaan Daerah
2. Memberikan gambaran besar tentang potensi daya tarik wisata Ketep Pass Kabupaten Magelang
3. Memberikan gambaran dan analisa kuantitatif serta deskripsi tentang pengembangan daya tarik wisata Ketep Pass Kabupaten Magelang selama kurun waktu tertentu
4. Memberikan saran dan rekomendasi untuk pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata Ketep Pass Kabupaten Magelang
5. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan kapasitas manajerial BPOW Ketep Pass Kabupaten Magelang

2.7. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi kegiatan Kajian Potensi dan Pengembangan Wisata Ketep Pass berada di wilayah Kabupaten Magelang. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 60 hari efektif dan dimulai setelah diterbitkannya surat perintah mulai kerja dari pejabat pembuat komitmen.

2.8. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pokok penyajian laporan Kajian Potensi dan Pengembangan Wisata Ketep Pass mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab I **PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan kajian; sasaran yang diharapkan, lingkup kajian, sistematika laporan,

metodologi kajian, tahapan kajian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan kajian kelembagaan.

Bab II **TELAAH LITERATUR** bagian ini berisi referensi hukum, kajian teori atau kajian terdahulu mengenai PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Daya Tarik Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang pada umumnya.

Bab III **POTENSI DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KETEP PASS KABUPATEN MAGELANG** bagian ini mengemukakan kontribusi dari BPOW Ketep Pass terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Magelang

Bab IV **KESIMPULAN**, bagian ini berisi tentang kesimpulan dari Kajian Potensi dan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang beserta berbagai alternatifnya

Bab V **REKOMENDASI**, bagian ini berisi rekomendasi kajian ini khususnya untuk Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass

BAB III

TELAAH LITERATUR

3.1 Peran Sektor Pariwisata dalam meningkatkan PAD Kabupaten

Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD cukup besar dan cenderung naik terutama dari pajak Hotel dan Restoran, sedangkan dari Retribusi Jasa Hiburan terjadi penurunan yang drastis pada tahun 2009, karena Retribusi Candi Borobudur tidak lagi disumbangkan kepada PAD (*Whinarko Julipijanto* ,2014).

Kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Magelang :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

a. Pajak Daerah:

Pajak Daerah yang bisa dipungut dari sektor pariwisata mencakup pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Semakin tinggi ketiga jenis pajak di atas dapat dipungut maka akan menambah pundi-pundi Kas Daerah Kabupaten Magelang atau PAD Kabupaten Magelang.

b. Retribusi Daerah:

Retribusi Daerah yang dapat dipungut dari sektor pariwisata meliputi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga. Semakin tinggi ketiga retribusi daerah diatas berhasil dipungut maka akan semakin menambah PAD Kabupaten Magelang.

2. Pertumbuhan Ekonomi:

Industri pariwisata bersama sektor ekonomi yang lain seperti transportasi, akomodasi (penginapan), makanan dan minuman, obyek dan daya tarik wisata, agen perjalanan dan pemesanan,

hiburan dan atraksi serta asosiasi dan regulator perdagangan serta jasa lainnya turut andil dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu sektor pariwisata adalah sektor yang paling merata dalam memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat sekitar. Perekonomian masyarakat tumbuh secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan jasa kepariwisataan.

Pariwisata memberi dampak pada pertumbuhan aktivitas bisnis jasa, pertumbuhan aktivitas agro dan hasil pertanian, serta berbagai sektor lainnya.

3. Penciptaan lapangan kerja:

Selain memberi dampak langsung pada sektor perekonomian, aktivitas pariwisata juga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja yang meliputi sektor formal dan informal.

- a. Lapangan kerja formal: lapangan kerja formal bisa diciptakan melalui berbagai sektor seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, agen perjalanan dan lainnya.
- b. Lapangan kerja informal: lapangan kerja informal dapat tumbuh melalui UMKM, pemandu wisata, operator wisata, fotografer, videographer, content creator, foodblogger, videoblogger dan lainnya.

Di samping itu penciptaan lapangan kerja juga dapat dilihat dari sudut pandang tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung akan terlibat langsung dalam pelayanan kepada wisatawan baik di sektor atraksi wisata, kuliner, perjalanan, dan sebagainya. Sedangkan sektor tidak langsung merupakan aktivitas ekonomi turunan yang digunakan sebagai bahan baku ataupun aktivitas yang mendukung sektor utama, seperti petani, peternak, dan sebagainya.

4. Pengembangan infrastruktur:

- a. Jalan Nasional : jalan nasional yang menuju atau merupakan akses utama pun pendukung obyek wisata atau daerah wisata

tertentu dapat dibuka dan diberikan perawatan sesuai dengan kepemilikan jalan tersebut (nasional) sehingga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.

- b. Jalan Kabupaten: : jalan kabupaten yang menuju atau merupakan akses utama pun pendukung obyek wisata atau daerah wisata setempat dapat dibuka dan diberikan perawatan sesuai dengan kepemilikan jalan tersebut (nasional) sehingga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan memberikan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
- c. Infrastruktur lainnya : pemerintah pusat dan atau daerah pun dapat memberikan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan lainnya seperti bandara udara, pelabuhan, terminal darat, sungai dan laut demi mendukung perkembangan pariwisata setempat.

5. Peningkatan Pendapatan Masyarakat:

a. Industri pendukung pariwisata langsung

Agen perjalanan dan pemesanan tiket, transportasi dan akomodasi (*hotel, guest house, home stay*) merupakan pekerja pariwisata yang mendapatkan peningkatan pendapatan secara langsung apabila sektor pariwisata bergairah dan sebaiknya.

b. Industri pendukung pariwisata tidak langsung

Industri pendukung pariwisata tidak langsung seperti UMKM, pemandu wisata, juru parkir, fotografer, landry, pedagang souvenir dan asongan merupakan penerima manfaat langsung atau kunjungan wisatawan dalam daya tarik wisata atau perjalanan wisata tertentu.

6. Promosi Budaya dan Potensi Daerah

a. Promosi Budaya

Warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda yang banyak jumlahnya merupakan modal dasar dalam melakukan promosi kebudayaan. Kekayaan budaya dapat membantu

pengelola DTW untuk mengkomunikasikan kepada wisatawan.

Tren saat ini adalah promosi digital, yang meliputi kegiatan wisata dan minat wisatawan untuk belajar khusus tentang budaya/kebiasaan yang ada di masyarakat. Dengan kegiatan promosi yang *continue* dan juga pengemasan paket budaya yang sesuai minat wisatawan, akan berpotensi memunculkan wisata berbasis atraksi budaya lokal, wisata bersama masyarakat dan dikelola masyarakat, serta mengembangkan paket wisata berkualitas dan juga paket wisata minat khusus (*special interest tourism*).

b. Potensi daerah

Potensi daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pariwisata. Potensi ini bisa berasal dari kondisi alam, kekayaan budaya, peninggalan sejarah, maupun berbagai aktivitas lain baik berkaitan dengan budaya, religi, Pendidikan, kesehatan, maupun olahraga.

Potensi-potensi ini perlu diidentifikasi dan dipilih mana yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam paket wisata daerah sesuai dengan potensinya.

Potensi daerah ini dapat dikembangkan dari beragam kebiasaan yang ada di masyarakat maupun menggali dari sejarah kebiasaan yang pernah ada dan menjadi kekayaan budaya lokal.

7. Peningkatan Investasi

a. Investasi langsung:

Investasi langsung dapat dilakukan oleh investor yang secara langsung membangun proyek-proyek perhotelan, resort, restoran dan kafe serta sarana dan prasarana pariwisata lainnya entah dengan badan hukum langsung atau melalui penyertaan modal serta model pembiayaan lainnya.

b. Kemitraan :

Kemitraan oleh investor dapat dilakukan dengan membuat special purpose vehicle , joint venture atau kerjasama operasi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi investor sesuai dengan rencana pembangunan pariwisata daerah pada tingkat nasional, provinsi dan atau kabupaten/kota.

3.2 Rerefensi Hukum

Adapun dasar hukum dalam kajian ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
4. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berkelanjutan beserta turunannya
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan

Usaha Milik Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta.Prambanan Tahun 2024 – 2044
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Desa Wisata yang mengatur tentang pengembangan desa wisata
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034

3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 3 disebutkan bahwa sumber- sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain yang Sah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan. Sedangkan mengenai Keuangan Daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab VII Tentang Pemerintah Daerah. Seperti yang tercantum dalam pasal 157, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada: (a) Hasil Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-Lain pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Peranan atau kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menurut hasil kajian Beta Asteria (2015) yaitu , pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah; Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Jawa Tengah.

Hasil penelitian Rochmah Dewi Kusumawati (2018), menunjukkan bahwa selama 2013 - 2017 pendapatan retribusi daya tarik wisata Kabupaten Magelang mengalami penurunan pada tahun 2014, tetapi untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 penerimaan pendapatan selalu meningkat. Untuk kontribusi terhadap retribusi daerah terhitung kurang efektif dengan rata-rata 20,60%, sedangkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pencapaiannya masih rendah karena hanya tercapai 1,8%. Sementara untuk tingkat keefektifan penerimaan retribusi DTW rata-rata rasionya cukup efektif dengan kriteria prosentase sebesar 80%-90%.

Hasil penelitian Nina Purwaningsih dan Suci Nasehati Sunaningsih (2021) menunjukkan adanya penurunan kontribusi retribusi rekreasi dan olahraga terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pascapandemi Covid-19. Kontribusi retribusi rekreasi dan olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar 1,38%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,50%. Angka ini menunjukkan penurunan kontribusi retribusi untuk rekreasi dan olahraga pascapandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan sosial di masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan sektor pariwisata dan jumlah pengunjung objek wisata di

Kabupaten Magelang.

Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 2021-2023(dalam rupiah)

Jenis Penerimaan [Rincian 2022]	2023	2022	2021
A. PENDAPATAN DAERAH	863.386.279.380.000	839.752.465.356.000	809.996.659.784.490
1. Pendapatan Asli Daerah	158.644.592.140.000	139.538.187.482.000	130.556.335.882.440
1. Pajak Daerah	85.643.007.036.000	74.339.237.461.000	60.453.018.466.205
2. Retribusi Daerah	10.913.584.708.000	7.176.765.592.000	7.121.500.757.814
3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.630.102.946.000	5.956.088.125.000	5.583.610.932.697
4. Lain-lain PAD yang Sah	54.457.897.450.000	52.066.096.304.000	57.398.205.725.728
2. Pendapatan Transfer	698.170.909.062.000	689.447.329.246.000	646.624.709.407.500
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.390.184.928.000	621.097.198.413.000	586.577.984.466.180
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.780.724.134.000	68.350.130.833.000	60.046.724.941.328
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.570.778.178.000	10.766.948.628.000	32.815.614.494.540
1. Pendapatan Hibah	2.781.149.071.000	4.800.314.024.000	6.276.204.707.068
2. Dana Darurat	-	31.441.587.000	244.307.645.587
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	3.789.629.107.000	5.935.193.017.000	26.295.102.141.885
B. PEMBIAYAAN DAERAH	56.614.410.761.000	93.623.515.473.000	71.070.648.198.984
JUMLAH	920.000.690.141.000	933.375.980.829.000	881.067.307.983.470

Sumber : BPS diolah

Tabel 3.2 Kontribusi PAD, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 2021-2023(persentase)

Keterangan	2023	2022	2021
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	18,37	16,62	16,12
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	53,98	53,28	46,30
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	6,88	5,14	5,45
Kontribusi HPKD yang Dipisahkan terhadap PAD	4,81	4,27	4,28
Kontribusi Lain-Lain PAD yg sah terhadap PAD	34,33	37,31	43,96
Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah	80,86	82,10	79,83

Sumber : BPS diolah

Tabel 3.3 Pertumbuhan Komponen PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 2021-2023(persentase)

Pertumbuhan	2021	2022	2023	Naik/Turun
Pertumbuhan PAD		6,88	13,69	6,81
Pertumbuhan Pajak Daerah		22,97	15,21	-7,76
Pertumbuhan Retribusi Daerah		0,78	52,07	51,29
Pertumbuhan HPKD yg Dipisahkan		6,67	28,11	21,44
Pertumbuhan Lain-Lain PAD yg Sah		-9,29	4,59	13,88
Pendapatan Tansfer		6,62	1,27	-5,36

Sumber : BPS diolah

Kemudian untuk tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, data yang disajikan oleh BPS dalam tabel diatas sepanjang tahun 2021-2023 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah berkisar dari 16,12 % hingga 18,37 %. Selama 3 tahun terakhir mengalami trend kenaikan.
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD berkisar dari 46,30 % hingga 53,98 %. Terjadi trend kenaikan selama tiga tahun terakhir.
3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD berkisar dari 5,14 % hingga 6,88 % dengan kecenderungan mengalami kenaikan.
4. Kontribusi Hasil Pengelolaan dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD berkisar pada angka 4,28 % hingga 4,81 % dengan kecenderungan meningkat.
5. Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah terhadap PAD berkisar pada angka 34,33% hingga 43,96 % dengan kecenderungan menurun.
6. Kontribusi Pendapatan Transfer terhdap Pendapatan Daerah berkisar pada angka 79,83 % hingga 80,86 % dengan kecenderungan meningkat selama tiga tahun terakhir.
7. Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota berkisar pada angka 6,88 % hingga 13,69 %. Terjadi kenaikan 6,81 % di tahun 2023.
8. Pertumbuhan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 7,76 % di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Pertumbuhan Retribusi Daerah mengalami kenaikan 51,29 % di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
10. Pertumbuhan Hasil Pengelolaan dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 21,44 % di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Pertumbuhan Lain_Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar 13,88 % di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12. Pertumbuhan Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar

5,36 % di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam era otonomi daerah dan *desentralisasi*, ternyata kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah masih amat tinggi selama 2021-2023 dengan mencapai lebih dari 80 %. Sementara itu kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih berkisar di angka 16,12 % hingga 18,37 %. Kontribusi komponen PAD yang utama yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kemampuan fiskal pemerintah daerah masih dapat ditingkatkan lagi. Pemerintah Daerah dituntut untuk secara kreatif meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Khusus untuk penerimaan dari Hasil Pengelolaan dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penerimaan deviden kepada Kas Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing BUMD tanpa ada intervensi dari tingkat Pemerintah Pusat (Suwarno,2008), sehingga Pemerintah Daerah cenderung lebih mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Di sisi lain implementasi otonomi daerah memiliki tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam upaya memperbaiki iklim investasi karena banyak daerah yang masih jauh dari perilaku pro investasi (Supramono, 2013). Hal ini antara lain diwarnai dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu pengurusan dengan perijinan di daerah, munculnya berbagai Perda yang mengutamakan PAD sehingga PAD belum diposisikan sebagai akibat dari efek multiplayer dari kegiatan investasi. Dengan demikian dalam menerapkan kebijakan fiskal, pemerintah daerah harus mampu menciptakan keseimbangan antara upaya peningkatan PAD dan peningkatan sumber penggerak ekonomi

daerah dari faktor investasi. Meskipun pajak dan retribusi merupakan elemen penting bagi penerimaan daerah namun seringkali pengenaan beban pajak melebihi kemampuan bayar masyarakat. Dalam kaitan tersebut Tampubolon (2001) mengemukakan bahwa pungutan yang berasal dari pajak dan retribusi cenderung akan mendistorsi ekonomi daerah melalui pengaruhnya terhadap biaya produksi dan pemasaran komoditas yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Dampak lebih jauh dari munculnya berbagai macam pungutan adalah banyak investor dalam dan luar negeri menjadi enggan untuk berinvestasi di daerah.

Tabel 3.4 Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024 (dalam rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN (Rp)	2.036.310.089.428,00	2.271.336.015.858,00	2.302.190.543.616	2.575.439.825.755	2.380.457.680.604	2.469.504.315.099	2.557.741.165.229	2.573.481.690.623	2.780.530.841.435
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	288.485.678.128,00	403.561.238.310,00	325.089.093.092	417.178.099.961	329.769.193.224	375.378.465.373	432.690.933.480	465.486.053.517	520.847.740.395
Hasil Pajak Daerah	97.101.522.117,00	112.344.030.430,00	124.444.072.963	156.886.789.644	115.530.759.532	120.093.411.768	169.682.578.756	189.568.476.778	208.742.000.202
Hasil Retribusi Daerah	15.587.692.390,00	20.445.297.126,00	18.186.191.392	22.934.190.849	27.049.700.014	21.156.190.869	18.954.731.758	18.992.881.583	263.428.712.999
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.643.064.538,00	20.805.304.738,00	28.534.358.666	23.700.417.768	30.637.364.531	26.880.782.928	28.082.640.133	30.598.215.796	33.095.080.477
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	158.153.399.083,00	249.966.606.016,00	153.924.470.071	213.656.701.700	156.551.369.147	207.248.079.808	215.970.982.833	226.326.479.360	15.581.946.762
DANA PERIMBANGAN (Rp)	1.362.306.913.419,00	1.407.243.138.226,00	1.398.132.841.570	1.500.585.586.102	1.390.679.533.778	1.406.424.109.695	1.495.232.240.461	2.089.541.001.808	2.249.187.553.796
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (Rp)	385.517.497.881,00	460.531.639.322,00	578.968.608.954	657.676.139.692	660.008.953.602	687.701.740.031	629.817.991.288	18.454.635.298	10.495.547.244

Sumber : Data BPS diolah

Menurut Arif Budianto (2019), kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 3.5. Rasio Kemandirian Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024 (dalam jutaan rupiah)

Kontribusi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAD terhadap Pendapatan Daerah	14,17	17,77	14,12	16,20	13,85	15,20	16,92	18,09	18,73
Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	4,77	4,95	5,41	6,09	4,85	4,86	6,63	7,37	7,51
Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah	0,77	0,90	0,79	0,89	1,14	0,86	0,74	0,74	9,47
HPKD terhadap Pendapatan Daerah	0,87	0,92	1,24	0,92	1,29	1,09	1,10	1,19	1,19
Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah	66,90	61,96	60,73	58,27	58,42	56,95	58,46	81,20	80,89
LLPAD yang sah terhadap Pendapatan Daerah	7,77	11,01	6,69	8,30	6,58	8,39	8,44	8,79	0,56
LainLain Pendapatan Daerah yg Sah	18,93	20,28	25,15	25,54	27,73	27,85	24,62	0,72	0,38
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Kabupaten Magelang berada di kisaran 13 % hingga 18%. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan mengalami penurunan setelahnya. Pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 14,12 % % dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 15,20 % dari tahun 2020.

Tabel 3.6 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25 –50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007)

Lebih lanjut menurut Abdul Halim (2007) sesuai tabel 2.6, menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai kemampuan keuangan yang rendah sekali, rasio kemandiriannya berada di bawah 25%.

Tabel 3.7 Pendapatan Asli Daerah dan Derajat Desentralisasi Kabupaten Magelang Tahun 2010-2019(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Derajat Desentralisasi (%)
2010	76.057.772.876	954.275.140.157	7,970
2011	90.462.630.622	1.114.474.635.599	8,117
2012	123.722.781.349	1.311.901.799.121	9,431
2013	173.253.651.914	1.428.243.260.343	12,131
2014	242.448.677.267	1.655.674.485.031	14,643
2015	261.569.091.783	1.945.955.251.171	13,442
2016	288.485.678.128	2.036.310.089.428	14,167
2017	403.561.238.310	2.271.336.015.858	17,768
2018	325.089.093.092	2.302.190.543.616	14,121
2019	417.178.099.961	2.575.439.825.755	16,198
2020	329.769.193.224	2.380.457.680.604	13,853
2021	375.378.465.373	2.469.504.315.099	15,201
2022	432.690.933.480	2.557.741.165.229	16,917
2023	465.486.053.517	2.573.481.690.623	18,088
2024	520.847.740.395	2.780.530.841.435	18,732

Sumber : Arif Budianto (2019) dan dimodifikasi 2025

Sementara itu, hasil perhitungan Arif Budianto (2019) , derajat desentralisasi Kabupaten Magelang pada tahun 2010 hingga 2019 berada pada kisaran 7% hingga 16 %. Sementara dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 18 % dalam dua tahun terakhir.

Besaran rasio kemandirian dihitung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan pendapatan transfer dan dikalikan dengan 100 %. Besaran rasio kemandirian akan menunjukkan pola hubungan dengan pemerintah di atasnya. Menurut hasil kajian Arif Budianto (2019), besaran

rasio kemandirian Kabupaten Magelang tahun 2010 hingga 2019 berada pada kisaran 8% hingga 21%. Karena angka rasio kemandirian berada dibawah 25 % maka pola hubungannya adalah instruktif dari pemerintah di atasnya. Perkembangan per tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2024

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2010	8,694	Instruktif
2011	8,834	Instruktif
2012	10,413	Instruktif
2013	13,815	Instruktif
2014	17,164	Instruktif
2015	15,546	Instruktif
2016	16,523	Instruktif
2017	21,651	Instruktif
2018	17,222	Instruktif
2019	20,216	Instruktif
2020	23,713	Instruktif
2021	26,690	Konsultatif
2022	28,938	Konsultatif
2023	22,277	Instruktif
2024	23,157	Instruktif

Sumber : Arif Budianto (2019)

3.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 3.9 Komponen PAD dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024(persentase)

Kontribusi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak daerah terhadap PAD	33,659	27,838	38,280	37,607	35,034	31,993	39,216	40,725	40,077
Retribusi Daerah terhadap PAD	5,403	5,066	5,594	5,497	8,203	5,636	4,381	4,080	50,577
HPKD terhadap PAD	6,116	5,155	8,777	5,681	9,291	7,161	6,490	6,573	6,354
LLPAD yang sah terhadap PAD	54,822	61,940	47,348	51,215	47,473	55,210	49,913	48,622	2,992
Jumlah	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Sumber: CALK diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa dominasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD amat kuat. Pajak daerah menyumbang 40 % PAD selama dua tahun terakhir dan retribusi daerah mengalami lonjakan luar biasa di tahun 2024 dengan menyumbang 50 % PAD sementara di sisi lain Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan drastis untuk kontribusi terhadap PAD di tahun 2024.

Besaran kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD berada pada kisaran 27 % hingga 40,73 %. Tahun 2023 merupakan tahun puncak pencapaian pajak daerah paska pandemi global covid 19 ditahun 2020 dan 2021. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah cukup kuat menahan dampak pandemik covid 19 terhadap perekonomian Kabupaten Magelang. Trend hasil pajak daerah dalam kurun waktu delapan tahun yang menunjukkan proyeksi kenaikan dapat dibaca dalam tabel diatas.

Besaran kontribusi Retribusi Daerah justru menunjukkan perkembangan yang menarik selama delapan tahun terakhir. Pertumbuhan Retribusi Daerah sempat memuncak justru dimasa pandemi global covid 19 di angka 8,21 % di tahun 2020 kemudian

cenderung menurun selama tiga tahun terakhir tersisa 4,08 % saja di 2023. Namun di tahun 2024 merupakan puncak Retribusi Daerah menjadi 50,577 %

Besaran kontribusi Hasil Pengelolaan dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ternyata juga menunjukkan gejala yang stagnan selama tiga tahun terakhir. Puncak pertumbuhan kontribusi justru terjadi di tahun 2020 dan cenderung menurun selama tiga tahun terakhir meski tidak menyentuh titik terbawah di tahun 2017.

3.5 Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT;
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi

barang dan/ atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

1. Makanan dan/ atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tabel 3.10 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024 (dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	11.317.863.615	12.475.762.260	14.259.466.439	16.136.254.566	9.313.371.310	8.460.263.054	15.286.879.681	18.296.496.695	30.798.891
2	Pajak Restoran	8.672.916.769	10.377.681.366	13.265.681.310	18.938.329.070	13.304.010.466	15.000.679.717	24.427.499.187	29.917.335.807	388.788.692
3	Pajak Hiburan	1.710.482.399	1.941.758.593	3.388.992.989	3.910.873.455	1.611.029.293	828.393.843	3.880.703.301	4.726.606.197	250.000
4	Pajak Reklame	911.997.157	1.057.198.331	1.158.383.871	1.121.265.805	1.109.814.945	1.167.509.338	1.195.598.522	1.324.830.646	1.735.903.938
5	Pajak Penerangan Jalan	25.534.154.762	30.784.340.030	33.465.346.161	35.517.773.032	32.989.571.766	35.141.205.727	42.983.669.080	45.655.001.705	4.117.482.984
6	Pajak Parkir	1.306.542.300	1.588.909.100	1.778.574.239	1.875.857.572	785.319.312	860.039.012	1.727.857.470	1.672.639.001	824.990
7	Pajak Air Tanah	1.238.775.732	1.284.019.023	656.793.041	879.678.828	752.135.620	922.282.300	926.660.120	1.013.976.680	1.098.206.900
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.064.178.405	14.600.418.166	16.046.119.240	24.892.951.192	9.557.585.826	3.272.820.406	2.750.014.945	3.769.062.835	4.537.222.078
9	PBB Perdesaan & Perkotaan	25.626.022.518	25.764.291.495	25.807.217.483	33.057.309.182	31.505.074.451	33.605.694.756	42.506.029.431	42.975.578.095	43.739.258.790
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.718.588.460	12.469.652.066	14.617.498.190	20.556.496.942	14.602.846.543	20.834.523.615	33.997.667.019	40.216.949.117	46.271.619.694
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)								-	106.463.763.745
12	Opsen PKB								-	357.879.500
	Jumlah Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	124.444.072.963	156.886.789.644	115.530.759.532	120.093.411.768	169.682.578.756	189.568.476.778	208.742.000.202

Sumber : CALK Diolah

Penerimaan pajak daerah selama periode 2016-2024 menunjukkan kecenderungan meningkat pesat dengan pengecualian penurunan selama masa pandemi covid 19 di tahun 2020-2021. Namun demikian pemulihan penerimaan hasil pajak daerah dengan cepat terjadi di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan perekonomian masyarakat Kabupaten Magelang cepat pulih dalam menghadapi pandemi covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut oleh pemerintah.

Tabel 3.11 Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Kelas Tahun 2016-2024

	Pajak Hotel (PH)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PH Bintang Lima	5.481.126.758	4.658.925.250	5.372.112.716	6.001.991.482	8.972.484.616	8.460.263.054	15.286.879.681	18.296.496.695	30.798.891
2	PH Bintang Tiga	1.007.567.849	1.122.936.631	1.788.474.346	3.749.130.407					
3	PH Bintang Satu	3.938.442.625	5.618.542.251	6.144.188.982	5.160.611.100					
4	Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah kos	890.726.383	1.075.358.128	954.690.395	1.224.521.577	340.886.694	-			
	Jumlah Pajak Hotel	11.317.863.615	12.475.762.260	14.259.466.439	16.136.254.566	9.313.371.310	8.460.263.054	15.286.879.681	18.296.496.695	30.798.891

Sumber : CALK diolah

Tabel 3.12 Penerimaan Pajak Restoran Berdasarkan Jenis Tahun 2016-2024

	Pajak Restoran	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Restoran	5.483.473.676	6.621.502.198	7.930.636.651	12.094.661.075	8.416.172.040	15.000.679.717	14.435.085.198	15.533.566.824	198.665.848
2	Pajak Rumah Makan	401.760.280	497.059.689	576.112.454	878.363.334	706.085.599	-	1.775.642.865	2.813.802.495	66.364.475
3	Pajak Katering	2.644.048.813	3.064.598.879	4.441.797.565	5.291.924.979	3.535.651.601	-	3.293.970.936	6.249.332.089	86.946.384
4	Pajak Warung	143.634.000	194.520.600	317.134.640	673.379.682	646.101.226	-	4.922.800.188	5.320.634.399	36.811.985
	Jumlah Pajak Restoran	8.672.916.769	10.377.681.366	13.265.681.310	18.938.329.070	13.304.010.466	15.000.679.717	24.427.499.187	29.917.335.807	388.788.692

Sumber : CALK diolah

Tabel 3.13 Penerimaan Pajak Hiburan Berdasarkan Jenis Tahun 2016-2024

	Pajak Hiburan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Tontonan Film							976.012.797	1.116.822.694	250.000
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Bu sana							4.940.000	2.360.000	0
3	Pajak Pameran							842.500	35.000	0
4	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya							71.119.743	68.596.021	0
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan							2.799.611.410	3.233.548.332	0
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran							27.706.851	304.819.150	0
7	Pajak Pertandingan Olahraga							470.000	425.000	0
	Jumlah Pajak Hiburan							3.880.703.301	4.726.606.197	250.000

Sumber : CALK diolah

Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Magelang dapat dibagi kedalam empat periode :

1. Periode sebelum covid 19 (tahun 2019 dan sebelumnya)

Pajak restoran mengalami kecenderungan meningkat tahun demi tahun sebagai penanda membaiknya kesejahteraan dan kemampuan daya beli masyarakat.

2. Periode selama covid 19 (tahun 2020 dan 2021)

Akibat PPKM , terutama di tahun 2021 dimana mobilitas masyarakat dibatasi, penerimaan pajak restora mengalami penurunan. Bahkan di tahun 2021 pajak resoran hanya berasal dari restoran yang masih bisa melayani penjualan secara online ataupun layan antar sementara untuk rumah makan , katering dan warung amat terdampak dengan PPKM.

3. Periode 2022 – 2023

Dengan berakhirnya PPKM terjadi pemulihan penerimaan pajak restoran meskipun tidak sebesar periode sebelum covid 19. Penerimaan pajak restoran mengalami pemulihan selama periode ini.

4. Periode 2024 dan seterusnya

Dengan berlakunya PBJT , terjadi regrouping (pengelompokan) bermacam jenis pajak daerah ke dalam nomenklatur baru. PBJT merupakan komposit dari bermacam pajak daerah ke dalam jenis pajak baru ini. Jadi dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran mengalami penurunan karena pengelompokan ini. Secara agregat terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah untuk tahun 2024 dan semoga untuk tahun-tahun mendatang.

Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Magelang dapat dibagi kedalam empat periode :

1. Periode sebelum covid 19 (tahun 2019 dan sebelumnya)

Pajak restoran mengalami kecenderungan meningkat tahun demi tahun.

2. Periode selama covid 19 (tahun 2020 dan 2021)

Akibat PPKM , tingkat hunian hotel mengalami penurunan demikian juga untuk penerimaan pajak hotel.

3. Periode 2022 – 2023

Dengan berakhirnya PPKM terjadi pemulihan penerimaan pajak hotel meskipun tidak sebesar periode sebelum covid 19. Penerimaan pajak hotel tidak lagi berdasarkan kelas hotel namun disatukan.

4. Periode 2024 dan seterusnya

Dengan berlakunya PBJT, terjadi regrouping (pengelompokan) bermacam jenis pajak daerah ke dalam nomenklatur baru. PBJT merupakan komposit dari bermacam pajak daerah ke dalam jenis pajak baru ini. Secara agregat terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah untuk tahun 2024 dan semoga untuk tahun-tahun mendatang.

Penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Magelang selama periode 2016-2021 tidak menampilkan data apapun. Mulai 2022-2023 mulai terlihat adanya penerimaan pungutan dan terjadi peningkatan. Namun ditahun 2024 dengan berlakunya PBJT, terjadi regrouping (pengelompokan) bermacam jenis pajak daerah ke dalam nomenklatur baru. PBJT merupakan komposit dari bermacam pajak daerah ke dalam jenis pajak baru ini. Secara agregat terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah untuk tahun 2024 dan semoga untuk tahun-tahun mendatang.

3.6 Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Magelang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian PAD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari periode ke periode. Pertumbuhan perjenis pajak daerah disajikan dalam tabel 2.14.

Tabel 3.14 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Magelang tahun 2016 - 2024

No	Pertumbuhan Pajak Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel		10,231	14,297	13,162	-42,283	-9,160	80,690	19,688	-99,832
2	Pajak Restoran		19,656	27,829	42,762	-29,751	12,753	62,843	22,474	-98,700
3	Pajak Hiburan		13,521	74,532	15,399	-58,806	-48,580	368,461	21,798	-99,995
4	Pajak Reklame		15,921	9,571	-3,204	-1,021	5,199	2,406	10,809	31,028
5	Pajak Penerangan Jalan		20,561	8,709	6,133	-7,118	6,522	22,317	6,215	-90,981
6	Pajak Parkir		21,612	11,937	5,470	-58,135	9,515	100,905	-3,196	-99,951
7	Pajak Air Tanah		3,652	-48,849	33,935	-14,499	22,622	0,475	9,423	8,307
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		31,961	9,902	55,134	-61,605	-65,757	-15,974	37,056	20,381
9	PBB Perdesaan & Perkotaan		0,540	0,167	28,093	-4,696	6,668	26,485	1,105	1,777
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		28,307	17,225	40,629	-28,962	42,674	63,179	18,293	15,055
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)									
12	Opsen PKB									

Sumber : CALK Diolah

Selama 2016-2024 pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah Kabupaten Magelang amatlah fluktuatif. Dampak pandemi covid 19 di sektor ekonomi amat terlihat dari angka pertumbuhan yang negatif di tahun 2020 dan 2021 untuk masing-masing jenis pajak daerah. Dampak negatif pertumbuhan pajak daerah amat terasa di tahun 2020 dimana hampir semua jenis pajak daerah mengalami pertumbuhan negatif. Untuk sektor industri pariwisata, dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mengakibatkan penurunan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak MBLB dan BPHTB. Pada tahun 2021 penerimaan dan pertumbuhan pajak restoran mulai pulih dengan adanya penjualan/pemesanan melalui aplikasi online. Tahun 2022 dengan dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, terjadi rebound atau pemulihan penerimaan di semua jenis pajak daerah. Di tahun 2024 dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,

terjadi regrouping atau pengelompokan ulang masing-masing jenis pajak daerah ke dalam PBJT (Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu) khususnya untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir dan juga munculnya pajak Opsen PKB. Pada tahun 2024 pula mulai muncul penerimaan PBBJT dan Opsen PKB.

Tabel 3.15 Realisasi PBJT 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	PBJT - Makanan dan atau Minuman	34.973.055.548
2	PBJT -Tenaga Listrik	45.351.802.455
3	PBJT - Jasa Perhotelan	22.506.584.813
4	PBJT - Jasa Parkir	605.620.227
5	PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	3.026.700.702
	Jumlah	106.463.763.745

Sumber : CALK 2024 diolah

Catatan untuk PBJT dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah bisa menjadi pisau bermata dua :

1. Di satu sisi ia membuka ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk secara kreatif menemukan dan memungut jenis pajak baru beserta komponennya demi meningkatkan PAD. Namun tanpa pengawasan dan pengendalian yang memadai, hal ini dapat memicu terjadinya moral hazard di lapangan terlebih di tengah lemahnya aspek penegakan hukum.
2. Pada sisi lain, PBJT sekaligus menambah beban bagi masyarakat yakni konsumen dimana biasanya pajak yang dipungut akan diteruskan kepada konsumen melalui mekanisme penambahan harga jual. Beban ini sekaligus dirasakan oleh produsen barang dan jasa (pengusaha) disaat ekonomi sedang mengalami tekanan dan daya beli masyarakat

sedang mengalami penurunan.

Upaya meningkatkan PAD artinya memperluas ruang fiskal akan berhadapan dengan situasi perekonomian nasional-lokal: semakin menambah beban pengusaha dan masyarakat atau memberi insentif bagi mereka dengan konsekuensi fiskal tertentu. Sebuah pilihan yang menuntur kebijakan dan visi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

3.7 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Pihak Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.

Tabel 3.16 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang tahun 2016 - 2024

No	Jenis Retribusi Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Retribusi Jasa Umum	6.584.332.009	9.508.824.372	8.117.544.102	12.508.541.664	22.146.998.820	16.843.632.192	12.019.984.944	9.238.629.556	252.253.143.180
a	R Pelayanan Kesehatan	371.412.600	539.089.000	452.187.000	592.197.000	15.821.642	298.611.000	406.238.000	761.504.209	245.273.454.864
b	R Pelayanan Persampahan/Kebersihan	170.045.000	198.379.000	249.551.500	325.141.000	432.881.682	811.478.375	1.248.224.528	1.513.279.731	2.105.650.945
c	R Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	442.863.000	464.795.500	609.002.600	817.211.000	482.246.832	801.358.000	955.483.000	1.000.338.000	1.106.779.000
d	R Pelayanan Pasar	4.478.921.409	6.481.635.872	4.382.050.771	8.364.394.140	3.307.434.846	12.631.065.566	6.845.162.267	3.413.895.294	3.767.258.371
e	R Pengujian Kendaraan Bermotor	1.057.372.500	1.056.530.000	1.052.561.500	1.015.680.000	834.657.500	1.060.800.000	1.011.800.000	847.240.000	-
f	R Penggantian Biaya Cetak Peta	1.280.000	660.000	1.295.000	1.915.000	740.000	1.795.000	1.460.000	1.390.000	-
g	R Pelayanan Tera Ulang	-	-	81.405.500	128.095.000	89.883.500	127.090.500	151.760.500	123.489.000	-
h	R Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	1.184.569.231	1.152.104.024	1.086.213.318	1.111.433.751	1.399.856.649	1.577.493.322	-
2	Retribusi Jasa Usaha	6.976.960.620	8.447.310.877	8.450.789.440	8.590.956.482	3.563.807.554	3.456.776.177	6.291.134.510	8.530.038.200	8.990.500.049
a	R Pemakaian Kekayaan Daerah	1.272.232.270	1.470.350.257	1.094.823.710	1.220.067.622	666.131.408	908.394.517	1.072.787.690	1.360.214.180	-
b	R Pasar Grosir dan atau Pertokoan	-	-	-	-	-	35.558.000	33.242.000	28.002.000	-
c	R Terminal	733.342.300	899.101.000	540.475.350	461.724.300	338.374.000	384.291.100	381.683.900	389.022.600	-
d	R Tempat Khusus Parkir	750.202.245	800.865.175	878.940.900	920.069.800	700.362.000	771.782.700	1.162.749.800	1.189.972.000	-
e	R Rumah Potong Hewan	166.482.000	193.519.500	208.033.000	215.805.000	198.839.000	210.451.000	61.624.000	51.461.000	-
f	R Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4.054.701.805	5.354.604.225	5.728.516.480	5.773.289.760	1.660.101.146	1.045.818.860	3.468.887.120	5.367.226.920	-
g	R Penjualan Produksi Daerah	62.437.500	65.694.500	104.921.000	111.804.500	-	100.480.000	110.160.000	144.139.500	130.283.000
h	R Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	9.300.000	35.860.000	19.827.100	11.185.000	38.765.000	-	-	-	369.077.300
i	R Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.644.705.400
j	R Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	32.819.000
k	R Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	4.668.139.680
l	R Pemanfaatan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	2.145.475.669
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.026.399.761	2.489.161.877	1.617.857.850	1.834.692.703	1.338.893.640	855.782.500	642.201.640	1.224.213.827	2.185.069.770
a	R Izin Mendirikan Bangunan	1.565.147.261	2.207.127.377	1.407.222.750	1.758.277.703	1.244.696.640	807.282.500	584.051.640	1.090.034.627	-
	R Izin Gangguan/Keramaian	357.442.500	135.487.500	68.087.500	-	-	-	-	-	-
b	R Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	94.510.000	94.895.000	80.252.500	65.230.000	55.432.000	48.500.000	58.150.000	42.900.000	-
c	R Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	2.033.673.270
d	R Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	15.792.000	42.468.000	-	-	-	-	91.279.200	151.396.500
	Jumlah Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	18.186.191.392	22.934.190.849	27.049.700.014	21.156.190.869	18.953.321.094	18.992.881.583	263.428.712.999

Sumber : CALK diolah

Tabel 3.17 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang tahun 2016 - 2024

No	Pertumbuhan Retribusi Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Retribusi Jasa Umum		44,416	-14,631	54,093	77,055	-23,946	-28,638	-23,139	2.630,417
a	R Pelayanan Kesehatan		45,146	-16,120	30,963	-97,328	1.787,36	36,043	87,453	32.109,074
b	R Pelayanan Persampahan/Kebersihan		16,663	25,795	30,290	33,137	87,460	53,821	21,235	39,145
c	R Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		4,952	31,026	34,188	-40,989	66,172	19,233	4,694	10,641
d	R Pelayanan Pasar		44,714	-32,393	90,879	-60,458	281,899	-45,807	-50,127	10,351
e	R Pengujian Kendaraan Bermotor		-0,080	-0,376	-3,504	-17,823	27,094	-4,619	-16,264	-100,000
f	R Penggantian Biaya Cetak Peta		-48,438	96,212	47,876	-61,358	142,568	-18,663	-4,795	-100,000
g	R Pelayanan Tera Ulang				57,354	-29,831	41,395	19,411	-18,629	-100,000
h	R Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				-2,741	-5,719	2,322	25,951	12,690	-100,000
2	Retribusi Jasa Usaha		21,074	0,041	1,659	-58,517	-3,003	81,994	35,588	5,398
a	R Pemakaian Kekayaan Daerah		-215,572	-174,460	11,440	-45,402	36,369	18,097	26,792	-100,000
b	R Pasar Grosir dan atau Pertokoan							-6,513	-15,763	-100,000
c	R Terminal		22,603	-39,887	-14,571	-26,715	13,570	-0,678	1,923	-100,000
d	R Tempat Khusus Parkir		6,753	9,749	4,679	-23,879	10,198	50,658	2,341	-100,000
e	R Rumah Potong Hewan		16,240	7,500	3,736	-7,862	5,840	-70,718	-16,492	-100,000
f	R Tempat Rekreasi dan Olah Raga		32,059	6,983	0,782	-71,245	-37,003	231,691	54,725	-100,000
g	R Penjualan Produksi Daerah		5,216	59,710	6,561	-100,000		9,634	30,846	-9,613
h	R Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		285,591	-44,710	-43,587	246,580	-100,000			
i	R Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan									
j	R Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak									
k	R Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga									
l	R Pemanfaatan Aset Daerah									
3	Retribusi Perizinan Tertentu		22,837	-35,004	13,403	-27,024	-36,083	-24,957	90,628	78,488
a	R Izin Mendirikan Bangunan		41,017	-36,242	24,947	-29,209	-35,142	-27,652	86,633	-100,000
	R Izin Gangguan/Keramaian		-62,095	-49,746						
b	R Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		0,407	-15,430	-18,719	-15,021	-12,505	19,897	-26,225	-100,000
c	R Persetujuan Bangunan Gedung									
d	R Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)			168,921						65,861

Sumber : CALK diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten Magelang khususnya retribusi jasa umum memberi kontribusi terbesar. Bahkan dalam masa pandemic covid 19, kontribusi jasa umum masih menunjukkan kinerja yang baik dan di tahun 2024 mengalami lonjakan kenaikan yang amat tinggi. Lonjakan kenaikan retribusi jasa umum tahun 2024 ternyata berasal dari pelayanan Kesehatan yang disumbangkan oleh BLUD Kesehatan yakni Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Kecamatan se Kabupaten Magelang. Pencapaian ini dapat dilihat sebagai pisau bermata dua. Satu sisi menunjukkan kenaikan PAD melalui Retribusi Jasa Umum khususnya pelayanan Kesehatan. Namun di sisi lain, kenaikan retribusi pelayanan Kesehatan ini menunjukkan kegagalan upaya preventif dan promotif dalam bidang Kesehatan yang terbukti dengan meningkatnya upaya kuratif atau pengobatan oleh masyarakat penderita sakit ke fasilitas Kesehatan pemerintah Kabupaten Magelang.

Terkait dengan sektor industri pariwisata, penerimaan retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami penurunan tajam saat pandemic covid 19 dengan adanya PPKM. Setelah PPKM dicabut oleh pemerintah maka terjadi pemulihan hingga tahun 2024 meski tetap tidak bisa setinggi penerimaan tahun 2018.

3.8 Pertumbuhan Retribusi Daerah

Pertumbuhan retribusi daerah dari periode 2016-2024 secara umum dapat menunjukkan dinamika yang terjadi dalam aktifitas perekonomian masyarakat. Masyarakat tetap patuh dan memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang khususnya untuk jasa umum dan jasa usaha serta perijinan tertentu. Dari data ini dapat terlihat sektor apa saja yang masih tetap bertumbuh walaupun diterpa pandemi covid 19 dan sektor mana yang cepat pulih dari pandemi covid 19.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, terjadi regrouping (pengelompokan ulang) untuk

retribusi daerah yang berasal dari sektor pariwisata seperti retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olah raga menjadi ke dalam kelompok PBJT (Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu). Namun secara agregat perubahan pengelompokan (regrouping) jenis retribusi daerah ini dapat dilaksanakan pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan baik seperti nampak dalam tabel dibawah ini. PBJT akan membuat kinerja baru sekaligus kurva baru dalam kinerja penerimaan retribusi daerah Kabupaten Magelang.

Pertumbuhan retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebelum terjadi regrouping menunjukkan kinerja yang cukup baik dan rebound yang amat tinggi setelah PPKM dicabut. Dari penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga juga terlihat animo masyarakat terhadap kebutuhan hiburan dan gaya hidup sehat dimana keduanya menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang secara umum.

Disisi lain pembatasan jumlah pengunjung di Candi Borobudur membawa dampak negatif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Magelang sebagaimana akan diulas pada bab berikutnya.

Tabel 3.18 Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024

No	Pertumbuhan Retribusi Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Retribusi Jasa Umum		44,416	-14,631	54,093	77,055	-23,946	-28,638	-23,139	2.630,417
a	R Pelayanan Kesehatan		45,146	-16,120	30,963	-97,328	1.787,36	36,043	87,453	32.109,074
b	R Pelayanan Persampahan/Kebersihan		16,663	25,795	30,290	33,137	87,460	53,821	21,235	39,145
c	R Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		4,952	31,026	34,188	-40,989	66,172	19,233	4,694	10,641
d	R Pelayanan Pasar		44,714	-32,393	90,879	-60,458	281,899	-45,807	-50,127	10,351
e	R Pengujian Kendaraan Bermotor		-0,080	-0,376	-3,504	-17,823	27,094	-4,619	-16,264	-100,000
f	R Penggantian Biaya Cetak Peta		-48,438	96,212	47,876	-61,358	142,568	-18,663	-4,795	-100,000
g	R Pelayanan Tera Ulang				57,354	-29,831	41,395	19,411	-18,629	-100,000
h	R Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				-2,741	-5,719	2,322	25,951	12,690	-100,000
2	Retribusi Jasa Usaha		21,074	0,041	1,659	-58,517	-3,003	81,994	35,588	5,398
a	R Pemakaian Kekayaan Daerah		-215,572	-174,460	11,440	-45,402	36,369	18,097	26,792	-100,000
b	R Pasar Grosir dan atau Pertokoan							-6,513	-15,763	-100,000
c	R Terminal		22,603	-39,887	-14,571	-26,715	13,570	-0,678	1,923	-100,000
d	R Tempat Khusus Parkir		6,753	9,749	4,679	-23,879	10,198	50,658	2,341	-100,000
e	R Rumah Potong Hewan		16,240	7,500	3,736	-7,862	5,840	-70,718	-16,492	-100,000
f	R Tempat Rekreasi dan Olah Raga		32,059	6,983	0,782	-71,245	-37,003	231,691	54,725	-100,000
g	R Penjualan Produksi Daerah		5,216	59,710	6,561	-100,000		9,634	30,846	-9,613
h	R Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		285,591	-44,710	-43,587	246,580	-100,000			
i	R Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan									
j	R Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak									
k	R Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga									
l	R Pemanfaatan Aset Daerah									
3	Retribusi Perizinan Tertentu		22,837	-35,004	13,403	-27,024	-36,083	-24,957	90,628	78,488
a	R Izin Mendirikan Bangunan		41,017	-36,242	24,947	-29,209	-35,142	-27,652	86,633	-100,000
	R Izin Gangguan/Keramaian		-62,095	-49,746						
b	R Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		0,407	-15,430	-18,719	-15,021	-12,505	19,897	-26,225	-100,000
c	R Persetujuan Bangunan Gedung									
d	R Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)			168,921						65,861

Sumber : CALK diolah

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah , sebenarnya membuka peluang lebih lebar dan dalam bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menggali obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah baru sehingga potensi peningkatan PAD dapat tercapai demi pembiayaan pembangunan pemerintahan dan masyarakat. Namun untuk menuju ke arah itu memang banyak persyaratan yang mesti dipenuhi khususnya peningkatan kapasitas SDM.

3.9 Kajian Sebelumnya

1. Analisis Potensi sektor Pariwisata Di Kabupaten Magelang oleh Whinarko Julipijanto (2014), Jurnal Penelitian Inovasi Vol. 40 No. 2. 15 Februari 2014 : 70-85.

Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD cukup besar dan cenderung naik terutama dari pajak Hotel dan Restoran, sedangkan dari Retribusi Jasa Hiburan terjadi penurunan yang drastis pada tahun 2009, karena Retribusi Candi Borobudur tidak lagi disumbangkan kepada PAD. Sumber pendapatan dari Candi Borobudur hanya dari Parkir. Kedudukan Sektor Pariwisata Kabupaten Magelang cukup menonjol di tingkat Karisidenan Kedu, meskipun tidak di tingkat Jawa Tengah, karena laju perlumbuan di Tingkat Jawa Tengah masih rendah.

Dengan kemampuannya memberikan sumbangan terhadap PAD melalui pajak daerah dan retribusi, serta terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah terhadap sektor-sektor ekonomi, menunjukan potensi sektor pariwisata cukup bespr, yang ditunjukan dengan nilai positif dan lebih besar satu dari semua alat Analisayang digunakan. Meskipun apabila dilihat dari kegiatan per sub sektor, beberapa sektor belum merupakan sub sektor di tingkat provinsi seperti restoran dan agen perjalanan, namun sebagai sub sektor di tingkat kabupaten dan karesidenan Kedu cukup menonjol terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Kontribusi Pendapatan Retribusi Daya Tarik Wisata (DTW) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 oleh Rochmah Dewi Kusumawati (2018), Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir pendapatan retribusi daya tarik wisata mengalami penurunan pada tahun 2014, tetapi untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 penerimaan pendapatan selalu meningkat. Untuk

kontribusi terhadap retribusi daerah terhitung kurang efektif dengan rata-rata 20,60%, sedangkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pencapaiannya masih rendah karena hanya tercapai 1,8%. Sementara untuk tingkat keefektifan penerimaan retribusi DTW rata-rata rasionya cukup efektif dengan kriteria prosentase sebesar 80%-90%.

3. Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 oleh Nina Purwaningsih dan Suci Nasehati Sunaningsih (2021), Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 3, 2021 pg. 471-478.

Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kontribusi retribusi rekreasi dan olahraga terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pascapandemi Covid-19. Kontribusi retribusi rekreasi dan olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar 1,38%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,50%. Angka ini menunjukkan penurunan kontribusi retribusi untuk rekreasi dan olahraga pascapandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan sosial di masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan sektor pariwisata dan jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Magelang.

4. Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang oleh Faiz et al (2021), DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 3 Nomor 2 , 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel pajak daerah, retribusi daerah, jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang tahun 2008-2018. Sedangkan secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang tahun 2008-2018.

5. Potensi dan Pengembangan Wahana Obyek Wisata Alam sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi Keluarga di Kabupaten Magelang oleh Hadji

et al (2017), *The 6th University Research Colloquium 2017* Universitas Muhammadiyah Magelang.

Potensi yang ada di Kabupaten Magelang sangat beragam dan terdiri atas berbagai destinasi dan dikategorikan menjadi dua potensi antara lain: Potensi alamiah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam adalah keindahan alam, budaya, kondisi lingkungan dan strategi pengelolaan pariwisata Kabupaten Magelang disusun dalam strategi ST-SO-WT-WO. Adapun saran yang dapat diberikan, penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai dalam bidang pariwisata, melalui pendidikan dan pelatihan tentang sadar wisata semakin ditingkatkan, perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Magelang agar lebih mengutamakan masyarakat setempat, peranan masyarakat setempat agar lebih ditingkatkan.

6. Pengaruh Daya Tarik Dan Word-Of-Mouth Terhadap Kunjungan Ulang Melalui Kepuasan oleh Prastiwi dan Farida (2017), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro* , 2017.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan pariwisata yang berkembang pesat di Indonesia. Ketep Pass merupakan salah satu obyek wisata alam di Magelang-Jawa Tengah yang pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami naik-turun kunjungan secara fluktuatif. Sehingga pengelola wisata berharap bisa meningkatkan kunjungan ke obyek wisata Ketep Pass dengan kepuasan yang didapat dari melihat pemandangan dan pengaruh positif (WOM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daya tarik wisata dan word-of-mouth terhadap kunjungan ulang melalui kepuasan pada obyek wisata Ketep pass. Tipe penelitian ini adalah explanatory research, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel berjumlah 100 responden yang merupakan pengunjung dewasa wisata Ketep Pass. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi,

analisis regresi sederhana dan berganda, koefisien determinasi, uji signifikansi (uji t) satu arah, dan uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif daya tarik wisata alam dan word-of-mouth secara signifikan terhadap kepuasan, dan kepuasan berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang. Berdasarkan hasil analisis uji sobel, diketahui bahwa variabel daya tarik wisata alam dan word-of-mouth berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Selanjutnya variabel kepuasan berpengaruh signifikan terhadap kunjungan ulang. Berdasarkan hasil tersebut maka disarankan untuk meningkatkan perbaikan fasilitas dan perawatan terhadap tempat wisata serta menambah event budaya yang bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berkunjung ke obyek wisata Ketep Pass.

7. Pembangunan Desa Wisata Ketep Magelang Studi Proses dan Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal oleh Ikhsan Hidayah (2018), Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 2, no. 2 (2018), hal. 287-306.

Tulisan ini mendiskusikan tentang pembangunan desa wisata Ketep. Terminologi pembangunan desa wisata berarti adanya proses perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat dari gaya lama menjadi gaya baru dengan tujuan memberi manfaat di berbagai aspek. Kegiatan pembangunan ini dilakukan melalui karakteristik desa, potensi, panorama alam, dan lingkungan yang masih asri.

Dengan pengembangan potensi desa diharapkan menjadi kawasan wisata unggulan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengulas proses pembangunan dan mengkaji dampakdampak hasil pengembangan Desa Wisata Ketep. Harapan dari pembangunan dan pengembangan kawasan desa wisata ini berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi lokal dan masyarakat lebih sejahtera. Dalam menggali data-data lapangan, penulis menggunakan metode

kualitatif. Setelah data lapangan lengkap selanjutnya dianalisis dengan menarik sebuah kesimpulan. Untuk menguji hasil data lapangan, penulis mencoba melakukan validitas dengan metode triangulasi. Dari penggalian data lapangan akhirnya penulis dapat menunjukkan bahwa Desa Ketep yang di desain menjadi desa wisata membutuhkan proses panjang yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan masyarakat yang terakomodir dalam kumpulan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Setelah terwujudnya sarana dan prasarana desa wisata, masyarakat dapat mengembangkan potensinya melalui kegiatan ekonomi dan tidak melupakan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan begitu, Desa Wisata Ketep menawarkan wahana rekreasi murah yang penuh nilai-nilai edukasi. Destinasi yang ditawarkan di Desa Wisata Ketep adalah sarana perdagangan (pasar rakyat), tempat kuliner, homestay, agrowisata, wisata pendidikan kegunungapian, dan kebun strawberry petik sendiri.

8. Pengaruh Daya Tarik Wisata, Citra Wisata, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Kembali Wisatawan Di Objek Wisata Ketep Pass oleh Trisna Widjianto (2019), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) daya tarik wisata berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di objek wisata Ketep Pass, dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,150 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. (2) citra wisata berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di objek wisata Ketep Pass, dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,132 dan signifikansi $0,006 < 0,05$. (3) promosi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di objek wisata Ketep Pass, dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,160 dan signifikansi $0,001 < 0,05$. (4) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di objek wisata Ketep Pass, dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,068 dan signifikansi $0,040 < 0,05$. (5) daya tarik wisata,

citra wisata, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di objek wisata Ketep Pass, dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 14,127 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

9. Daya Tarik Wisata Ketep Pass Masa Pandemi di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah oleh Rifky Ryantony (2022), Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik wisata Ketep Pass masa pandemi saat ini cukup baik. Pengelola wisata Ketep Pass memberikan suatu atraksi atau pertunjukan di dalam obyek wisata Ketep Pass dengan melihat pesona alam dan juga memberikan wahana edukasi bagi pengunjung dengan adanya wahana pemutaran film kegunungapian dan museum volcano yang terdapat di dalam obyek wisata Ketep Pass pada masa pandemi saat ini. Sarana dan prasanana sudah lumayan memadai, dan sikap pengelola wisata Ketep Pass yang ramah dan memberi rasa nyaman kepada pengunjung. Namun juga ada yang harus ditingkatkan lagi pada sarana fasilitas yang dimana belum terdapat di obyek wisata ketep pass seperti Bank ATM center, Money Changer, toko souvenir dan sarana yang lain juga perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya.

10. Langkah Promosi Objek Wisata Daerah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Magelang oleh Susilo dan Yulianto (2018), Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No.2 September 2018.

Kabupaten Magelang memiliki banyak objek wisata daerah yang dapat eksplorasi masyarakat, mulai dari alam, religi maupun buatan. Hingga saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magelang belum merata pada keseluruhan obyek wisata yang ada. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum dikenalnya obyek-obyek wisata lain selain candi Borobudur di Kabupaten Magelang.

Langkah promosi objek wisata daerah oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Magelang (DISPARPORA) dilaksanakan melalui beberapa media, baik cetak maupun elektronik. Langkah promosi ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang banyaknya potensi yang berupa objek wisata daerah yang dimiliki Kabupaten Magelang. Penyajian penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif yang didukung survey untuk memberikan gambaran nyata atas kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dalam melaksanakan langkah-langkah promosi wisata daerahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran langkah promosi yang telah dilakukan oleh DISPARPORA Kabupaten Magelang dalam mempromosikan daya tarik wisatanya. Pergeseran cara promosi ini terletak pada media yang digunakan dengan kecenderungan dilakukan melalui media online dibanding cara konvensional (offline) untuk tahun-tahun sekarang ini. Cara berpromosi ini sangat tepat digunakan melihat kecenderungan masyarakat jaman sekarang yang lebih banyak menggunakan sarana gadget untuk berselancar didunia maya melalui media sosial dan fasilitas online lainnya. Namun demikian masih ada kendala dalam menjalankan upaya promosi wisata ini yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengelola dengan baik segala macam account media sosial maupun website DISPARPORA Kabupaten Magelang. SDM lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan formal kedinasan. Hal ini menjadikan langkah promosi daya tarik wisata daerah yang dimiliki Kabupaten Magelang belum optimal tersampaikan kepada masyarakat. Adapun Langkah penyelesaian masalah ini adalah dengan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi yang berkembang saat ini.

11. Pengembangan Model Kelembagaan Pada Daya Tarik Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Magelang oleh Nabila et al (2022), Bappeda Dan Litbang Kabupaten Magelang, 2018.

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu instrumen untuk menekan kenaikan jumlah kasus Covid-19 adalah dengan membatasi mobilitas manusia. Mobilitas yang diijinkan hanyalah yang sifatnya “esensial”. Sedangkan pariwisata tidak termasuk dalam kategori “esensial” tersebut. Fenomena pandemi memberikan perenungan persoalan pembangunan pariwisata yang masif dalam beberapa tahun ke belakang. Perlu gagasan baru agar pembangunan pariwisata dapat mendukung pemulihan ekonomi Kabupaten Magelang. Proses pemulihan membutuhkan kerangka model kelembagaan dan kemitraan antar para pemangku kepentingan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan karakteristik sistem pengelolaan Daya Tarik Wisata, permasalahan pengelolaan Daya Tarik Wisata, model kelembagaan Daya Tarik Wisata, dan menguji Kelayakan model kelembagaan Daya Tarik Wisata. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang yang terdiri dari Candi Mendut, Candi Pawon, Taman Rekreasi Mendut, Taman Rekreasi Kalibening, Telaga Bledar, dan Pemandian Air Hangat Candi Umbul saat ini di kelola oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang. Kondisi Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancilliary Daya Tarik Wisata bervariasi. Permasalahan pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang yaitu rendahnya tingkat kemandirian Destinasi Tujuan Wisata, minimnya sumber daya manusia Dinas Pariwisata, sistem rangkap jabatan, sistem rangkap pekerjaan, fleksibilitas penggunaan anggaran, minimnya inovasi promosi dan sarana prasarana daya tarik wisata. Berdasarkan Uji Kelayakan Model Kelembagaan dengan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation memberikan rekomendasi bahwa Model Kelembagaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang yang baik adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

12. Analisis Peran SDM Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Magelang oleh Nawaningrum dan Atmaja (2022), *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* Vol. 6 No.1, Februari 2022.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pariwisata di Indonesia mempunyai peran yang besar sebagai penggerak ekonomi.

Masyarakat dikawasan pariwisata merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting untuk berkontribusi dalam meningkatkan pariwisata didaerah tersebut. Peran sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang merupakan aspek keberhasilan dalam melakukan pengembangan potensi wisata yang ada. Peran sumber daya manusia selaku penggerak industri pariwisata bisa diwujudkan melalui Pendidikan kepariwisataan dan pelatihan ketrampilan pariwisata, yang akan meningkatkan pelayanan serta keprofesionalan SDM pariwisata. Sehingga, akan meningkatkan jumlah pengunjung. Untuk masyarakat disekitar wilayah wisata akan merasakan manfaat dan pengembangan pariwisata didaerahnya yaitu sebagai sarana mata pencaharian yang dapat membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat.

13. Laporan Akhir Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata tahun 2022, Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang memiliki potensi wisata berbasis desa yang sangat potensial untuk kembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Magelang. Oleh sebab itu keberadaan Desa Wisata tersebut perlu dirumuskan dalam regulasi dan kebijakan tatakelola pariwisata yang berkelanjutan yang pro pada kepentingan masyarakat desa.

Desa wisata menjadi salah satu destinasi menarik karena memiliki amenities yang tinggi dan dengan berbagai macam atraksi wisata dalam satu tempat. Mengambil unsur desa dan segala aktivitas sosial-

budaya di dalamnya memberikan pengalaman kepada wisatawan/pengunjung. Desa wisata tidak hanya sebagai objek destinasi namun di tengah perkembangan pembangunan dan interaksi dari dalam dan luar memberikan kekuatan sekaligus penjaga kearifan, budaya dan nilai lokal masyarakat desa.

Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai Kawasan super prioritas pariwisata nasional, dimana selama ini penetapan dan pengembangan Kawasan wisata tersebut, belum maksimal berdampak bagi seluruh desa di kabupaten Magelang. Oleh sebab itu, perlu daya dukung pemerintah kabupaten Magelang dalam Menyusun peta jalan percepatan pembangunan pariwisata berbasis desa. Selain itu, pembangunan dan pengembangan desa wisata, juga di dukung dengan terselenggaranya tata kelola desa wisata pasca UU No. 6 tahun 2014 memberi peluang sekaligus tantangan yang relatif besar, denagn adanya kebijakan Dana Desa yang dapat dikapitalisasi dan dioptimalkan pemanfaatnya untuk pengembangan desa wisata.

Tatakelola desa wisata ditengah Kawasan strategi nasional pariwisata Borobudur, merupakan peluang mengembangkan ekonomi masyarakat, baik disektor formal maupun informal dengan menjalankan kebijakan ekonomi kreatif berbasis potensi fdan tipelogi desa wisata.

Problematika belum optimalnya masalah Desa wisata harus segera diperbaiki, seperti kondisi prasarana di sekitar kawasan wisata perlu di perhatikan agar wisatawan dapat mengetahui dengan benar, karena berkembang tidaknya suatu obyek wisata tergantung pada produk industri dari pariwisata tersebut, yang meliputi daya tarik, prasarana serta kemudahan dalam menujuobyek wisata yang ada. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang mendorong wisatawan untuk berkunjung dan singgah di daerah tujuan wisata yang bersangkutan. Tuntutan untuk berintegrasi antarpelaku ekonomi di desa secara tidak langsung memaksa pelaku-pelaku tersebut memiliki kohesifitas sosial yang tinggi. Kerjasama menjadi titik penting dalam proses membangun

kohesifitas sosial. Desa wisata menjadi strategi menciptakan solidaritas, kesatuan, dan produktifitas secara kolektif. Dengan desa wisata, konflik sosial yang timbul akibat kompetisi yang tidak sehat atau ketimpangan dapat diminimalisasi. Kondisi ini terjadi karena desa wisata hanya akan bisa terwujud apabila masing-masing pemangku kepentingan di desa terhubung dalam ikatan-ikatan kerjasama dan berbagi peran serta tanggungjawab.

14. Kajian Manajemen Bisnis Berkelanjutan BUMD untuk Pengelolaan Data Tarik Wisata di Kabupaten Magelang (2023), Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang.

Strategi Bisnis Berkelanjutan BUMD Pengelola DTW

- a. Perubahan manajemen wisata dari OPD menjadi BUMD
- b. Review dan restrukturisasi legalitas kepemilikan aset
- c. Menciptakan value proposition berupa natural and cultural tourism
- d. Pengembangan segmentasi pengunjung dari excursionist ke tourist
- e. Pengembangan segmentasi pengunjung dari individual tourism ke group/mass tourism
- f. Melakukan pemasaran melalui media online, dengan pendekatan influencer, endorser dan buzzer
- g. Bekerjasama dengan pengelola Candi Borobudur, komunitas pengelola wisata dan agen travel untuk membuat paket wisata (Tiket Bundling)
- h. Membangun hubungan pelanggan dan komunitas wisata dengan pendekatan koreasi
- i. Menarik CSR untuk perbaikan infrastruktur di sekitar DTW
- j. Bekerjasama dengan UMKM, BUMDES, seniman lokal untuk melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana, serta layanan DTW berbasis 4A
- k. Membangun infrastruktur untuk menjaga kelestarian alam di sekitar DTW
- l. Membuat layanan pembelian tiket secara online

- m. Kolaborasi dengan pengusaha wisata untuk membuat komplemen DTW (melengkapi kebutuhan sesuai standar 4A)
- n. Membuat peta potensi investasi penunjang DTW
- o. Menambah revenue streams dengan penyewaan tempat, sarana dan prasarana, serta alat pelengkap
- p. Melakukan penganggaran perawatan wahana utama dan pendukung
- q. Penyediaan fasilitas angkutan, umum atau shelter tourism, dari YIA, Candi Borobudur, terminal, lokasi wisata lain menuju ke DTW
- r. Melakukan rekrutmen serta restrukturisasi organisasi/manajemen secara efektif dan efisien
- s. Meningkatkan kualitas SDM pengelola DTW melalui kontrak kerja, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara efektif
- t. Menciptakan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang Prima

BAB IV

POTENSI DAN PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA

KETEP PASS KABUPATEN MAGELANG

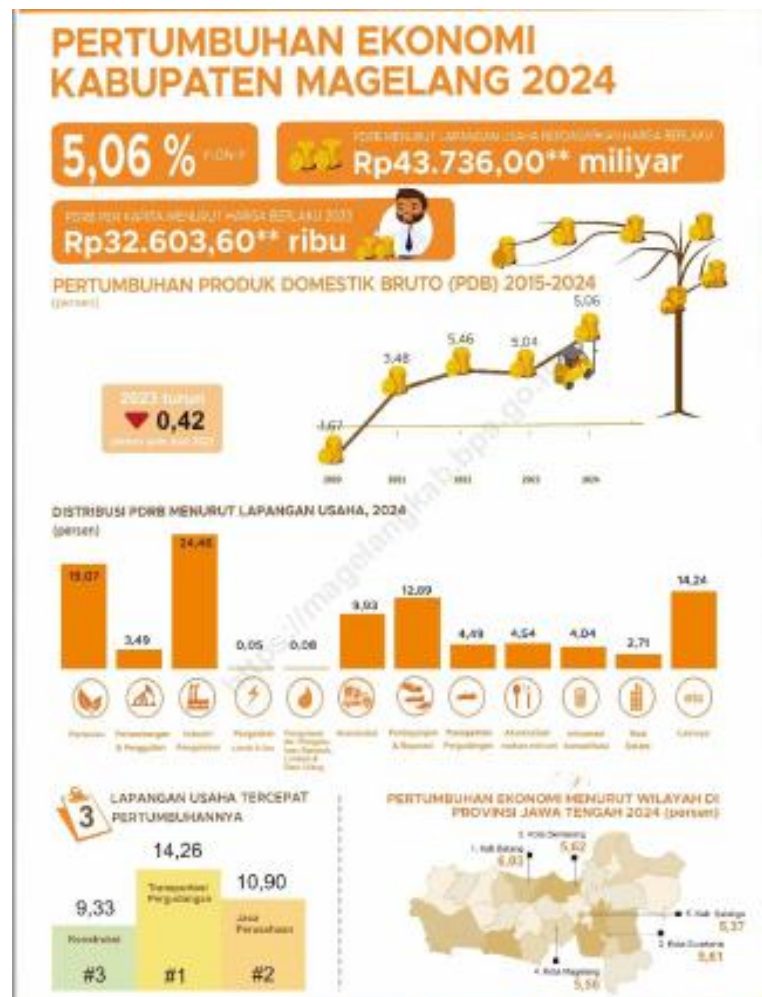
Sebelum membahas dan menguraikan potensi dan pengembangan daya tarik wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang, akan dilihat lebih dulu potret pariwisata di Kabupaten Magelang.

4.1 Kondisi Alam dan Peran dalam Wisata di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang secara administrasi berada di Provinsi Jawa Tengah, dengan luasan wilayah 1.085,73 Km². Penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk 2020 sebanyak 1.341.447 jiwa yang terdiri dari 674.347 jiwa penduduk laki-laki dan 667.100 jiwa penduduk perempuan dengan Indeks pembangunan manusia yaitu 72,10 (BPS, 2025). Wilayah desa administratif berjumlah 367 desa dan 5 kelurahan yang terbagi pada 21 wilayah kecamatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang di tahun 2024 sebesar 5,06 %. Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2024 didominasi oleh PDRB dari sektor industri pengoahan sebesar 24,46 % , pertanian sebesar 19,07 %, perdagangan dan reparasi 12,89 %, konstruksi 9,93 % , sektor lainnya 14,24 % ,sektor transportasi dan pergudangan 4,49 % sektor akomodasi makanan dan minuman 4,54 % . Lapangan usaha dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 14,26 %, jasa perusahaan sebesar 10,90 % dan sektor konstruksi sebesar 9,33 %. Secara umum sektor pariwisata bersama sektor lain (akomodasi makanan dan minuman) menyumbang sekitar 4 % kepada perekonomian Kabupaten Magelang dalam PDRB tahun 2024.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Magelang ditunjukkan secara ringkas oleh gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Magelang Tahun 2024



Sumber : BPS, 2025

Geografis wilayah Kabupaten Magelang merupakan hamparan lembah luas yang dikelilingi oleh pegunungan Menoreh, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, maupun Gunung Telomoyo. Keunikan topografi dataran dan pegunungan dan desa-desa dengan hamparan sumber daya alam sehingga membentuk karakteristik masyarakat yang bertumpu pada alam dan pertanian. Produk pertanian dataran rendah hingga dataran tinggi dihasilkan oleh para petani yang mengisi lumbung pangan beserta olahan turunannya di bidang kuliner.

Saat ini banyak potensi Kabupaten Magelang khususnya daam sektor agro yang dapat disnergiskan dengan aktivitas pariwisata.

Pertama, ketika tren wisata alam meningkat 1 dekade terakhir ini, maka Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah yang tumbuh DTW baru berbasis alam. Kontur pegunungan yang mendominasi mayoritas wisalyah di Kabupaten Magelang menjadi peluang munculnya wisata alam, baik yang berasal asli dari masyarakat lokal maupun wisata buatan yang berada di lokasi alam terbuka.

Kedua, wisatawan saat ini berorientasi melakukan kegiatan atau petualangan dalam berwisata, atau dikenal dengan experience based tourism. Salah satu aktivitas yang digemari wisatawan adalah mengenal dan melakukan kegiatan pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal. Paket-paket wisata petualangan ini banyak dilakukan dalam bentuk kelompok kecil wisatawan atau dalam kelompok edukasi sekolah, baik live in maupun oneday.

Ketiga, pemandangan yang indah khas pedesaan menjadi fenomena menarik dan langka saat ini. Hal ini sejalan dengan kondisi demografi yang semakin padat di perkotaan. Fenomena padatnya demografi perkotaan, membuat penduduk kota berusaha mencari pemandangan alam yang indah, sejuk, dan relatif tidak padat. Kondisi ini turut mendorong munculnya wisata alam di kabupaten Magelang.

Keempat, keinginan wisatawan khususnya Generasi Z (anak muda) adalah melakukan swafoto di lokasi-lokasi yang indah. Kondisi alam Magelang yang indah sangat cocok menjadi alasan sekaligus wisatawan untuk berswafoto sekaligus melakukan posting sebagai bentuk achievement telah berada di daerah tersebut.

Kelima, kehidupan agraris menjadi salah satu point of interest untuk perilaku kembali ke alam. Mereka melakukan perjalanan wisata untuk tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kondisi geografis dan kondisi alam yang spesifik.

4.2 Potensi Pariwisata Kabupaten Magelang

Ada 10 KSPN yang menjadi prioritas Pemerintah, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-

Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat).

Dari 10 KSPN Prioritas, Pemerintah memilih lima yang menjadi KSPN Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Kondisi ini tentuberkaitan dengan kebijakan promosi nasional yang akan mengedepankan candi Borobur. Oleh karena itu keberadaan Candi Borobudur harus dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai destinasi pariwisata lain di Kabupaten Magelang.

Merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam rencana pengembangan pariwisata nasional sebagai KSPN dan RIPARDA Provinsi Jawa Tengah yang terbentuk dalam kawasan Joglosemar. Posisi Kabupaten Magelang yang strategis secara geografis, serta adanya wisata Candi Borobudur merupakan kekayaan alami dalam kepariwisataan yang di miliki oleh Kabupaten Magelang. Hal ini merupakan potensi besar bagi Kabupaten Magelang dalam mengembangkan sektor pariwisata.

4.3 Pembangunan Kepariwisataaan Berdasar RIPPARDA Kabupaten Magelang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034. Berdasarkan RIPPARDA, Pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi:

1. Destinasi Pariwisata;
2. Pemasaran Pariwisata;
3. Industri Pariwisata; dan
4. Kelembagaan Kepariwisataaan.

Keempat elemen pembangunan kepariwisataan daerah ini menjadi arahan pembanguna pariwisata di Kabupaten Magelang, terdiri dari:

1. Pembangunan Destinasi Wisata.

Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait, serta dirancang untuk menarik wisatawan. Dalam suatu destinasi ada saling dukung dan kesatuan antar beberapa daya tarik wisata. Mereka saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan menarik bagi wisatawan. Ketep Pass dapat dikatakan sebagai sebuah destinasi wisata, yang didukung oleh beberapa daya tarik wisata yang ada di destinasi tersebut. Setiap destinasi saling menguatkan dan menarik sehingga lebih mampu mendorong kunjungan wisatawan.

Oleh karena itu, pembangunan kawasan Ketep sebagai salah satu destinasi wisata, akan memperkuat konsep wisata di daerah ini.

2. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk mempromosikan destinasi wisata, produk, dan layanan kepada calon wisatawan demi kepuasan mereka dan keuntungan bisnis. Proses ini meliputi identifikasi kebutuhan wisatawan, komunikasi, serta penyampaian produk dan layanan pariwisata yang bertujuan menarik lebih banyak pengunjung, memperpanjang masa tinggal, dan meningkatkan pengeluaran mereka.

Pemasaran ini dilakukan agar setiap daya tarik wisata, termasuk Ketep Pass dapat menemukan kebutuhan dan keinginan wisatawan, sekaligus menyediakan atraksi wisata yang sesuai kebutuhan dan keinginan calon wisatawan.

3. Industri Pariwisata

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha yang saling terkait untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, mulai dari transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, hingga atraksi dan hiburan. Industri ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang bekerja sama untuk menciptakan pengalaman wisata yang unik

dan menghasilkan barang serta jasa bagi para wisatawan.

Kehadiran industri sangat penting sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjalanan wisata. Mereka juga sangat aktif dan dinamis memenuhi kebutuhan wisatawan.

Kehadiran industri tidak hanya berlokasi di Kabupaten Magelang, tetapi juga berdomisili di lokasi kota/kabupaten lainnya. Industri wisata yang kreatif akan mampu mendatangkan wisatawan, memperlama length of stay, juga meningkatkan nilai belanja wisatawan.

Beberapa klster industri yang terkait adalah usaha penginapan, perjalanan wisata, transportasi, usaha kuliner, usaha jasa atraksi, penjual cinderamata, dan sebagainya

4. Kelembagaan Kepariwisata.

Lembaga pariwisata adalah sistem atau jaringan terorganisasi yang melibatkan pemerintah (pusat dan daerah), swasta, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk mengembangkan, mengatur, dan mengelola sektor pariwisata. Jaringan ini mencakup sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan, serta meningkatkan daya saing

Mereka yang terkait dalam kelembagaan adalah : pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat lokal, maupun organisasi lain seperti LSM, lembaga sertifikasi, dan sebagainya.

4.4 DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN MAGELANG

Kabupaten Magelang memiliki jenis dan daya tarik wisata yang bermacam-macam dan cukup banyak jumlahnya. Keanekaragaman ini muncul karena faktor budaya, faktor alam, faktor sejarah, dan juga kreativitas para pelaku wisata yang ada.

Beberapa jenis wisata cukup tersedia, mulai dari jenis wisata buatan, wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata olahraga, wisata wellness, wisata MICE, dan maupun beragam desa wisata yang tersebar di hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Daya tarik wisata Ketep Pass yang terletak di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang merupakan wisata buatan yang menjual pemandangan alam yang indah yang berada di ketinggian 1.200 mdpl (meter di atas permukaan laut) yang diresmikan oleh Presiden Megawati di 17 Oktober 2002 sebagai bagian dari jalur wisata Solo-Selo-Borobudur (SSB). Ketep Pass kemudian berkembang menjadi daya tarik wisata yang menawarkan berbagai fasilitas dan atraksi, termasuk Ketep Volcano Centre yang menampilkan informasi dan diorama mengenai Gunung Merapi.

Keberadaan Ketep Pass menjadi katalis lahirnya berbagai daya tarik wisata di sekitar Ketep. Pemunculan berbagai daya tarik ini mampu melengkapi keberadaan ketep sebagai satu destinasi unggulan di Kabupaten Magelang. Hal lain yang menggembirakan, banyak daya tarik wisata yang muncul dari masyarakat atau disebut dengan *community based tourism*. Kondisi ini membawa dampak positif terhadap hadirnya sektor pariwisata di suatu daerah, dan membuat sektor kepariwisataan lebih lestari (karena melibatkan masyarakat).

Tabel di bawah ini adalah tabel beberapa jenis wisata dan juga daya tarik wisata di kabupaten Magelang yang diliris resmi dalam Magelang dalam angka 2025.

Tabel 4.1 Jenis Wisata dan Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Wisata	Jumlah Obyek Wisata	Keterangan
1	Wisata Buatan	43	Museum, Taman Rekreasi, Agrowisata, Kolam Renang, Embung dll termasuk Ketep Pass
2	Wisata Budaya	38	Candi, Makam, Petilasan
3	Wisata Alam	99	Telaga, Air Terjun, Wanawisata, Bumi Perkemahan, Pemandangan
4	Wisata Rintisan	8	Bekerja sama dengan KPH Kedu Utara
5	Desa Wisata	42	Ditetapkan dengan SK Bupati Magelang

Sumber : Magelang Dalam Angka 2025 diolah

Berdasar tabel di atas, maka dapat dilihat ada 230 destinasi atau daya tarik wisata yang tersebar di Kabupaten Magelang. Daya tarik tersebut didominasi wisata alam yang terbentang dari Barat sampai ke Timur. Kondisi ini sangat ideal karena mendukung kebijakan green tourism yang mengedepankan wisata di alam khususnya pegunungan.

Setelah wisata alam, Kabupaten Magelang juga diperkaya oleh beragam wisata budaya yang ada. Wisata budaya ini merupakan wujud dari kekayaan benda dan non benda yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang.

Sebagai catatan, kebanyakan wisatawan senang dengan pemandangan alam yang indah dan hijau. Namun, keindahan alam tidak cukup menarik bagi wisatawan karena di Jawa Tengah pun sangat banyak kabupaten yang memiliki kawasan pegunungan yang indah. Oleh karena itu diperlukan kekayaan budaya yang menjadi pelengkap dari suatu perencanaan perjalanan wisata.

4.5 PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM KAWASAN STRATEGIS

Untuk mengembangkan destinasi wisata dengan lebih terarah, dibuat berbagai kebijakan pembagian kawasan wisata di Kabupaten Magelang. Pembagian kawasan ini agar lebih memudahkan fokus pengembangan dan daya saling dukung antara berbagai destinasi wisata di suatu kawasan. Kabupaten Magelang membagi pembangunan pariwisata dalam 4 kawasan strategis.

Adapun kawasan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata A, dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing. Kawasan A ini terletak di bagian barat Kabupaten Magelang berbatasan dengan kabupaten Boyolali. Karakter kawasan ini didominasi dengan lereng pegunungan dan kehidupan masyarakat yang agraris. Saat ini telah bermunculan berbagai DTW yang favorit di masyarakat dan berbasis budaya dan alam, seperti Silancur, Sukamakmur, maupun Butuh 'Nepal van Java'
- b. Kawasan Strategis Pariwisata B, dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Saujana Alam Lembah Merapi dan Merbabu. Kawasan

pariwisata B terletak di sisi utara Kabupaten Magelang dan berbataa dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Kawasan ini memiliki pemandangan indah dengan wisata pengalaman yang menantang bagi wisatawan. Bahkan di kawasan ini ada gunung yang dapat dilalui dengan kendaraan, yaitu di puncak Gunung Telomoyo.

Di area B ini Ketep Pass menjadi salah satu aktivitas wisata area B. Keunikan Ketep adalah kemampuan visual untuk melihat ke-8 puncak gunung yang ada di sekitar Magelang jika cuaca sedang cerah.

- c. Kawasan Strategis Pariwisata C, dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Vulkanologi dan Budaya Merapi. Dalam kawasan C ini aktivitas wisata berpusat pada aktivitas di lereng Gunung Merapi. Ketep Pass kebetulan masuk di zona B, namun daerah sekitar yang menjadi pendukung Ketep Pass, masuk di wilayah kawasan C. Namun batasan geografis ini relatif tidak mutlak bisa diketahui dan dirasakan oleh wisatawan. Karena pada dasarnya berwisata tidak mengenal batas geografis bahkan batas negara.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata D, dengan tema pembangunan adalah Borobudur dalam Bayangan Merapi. Kawasan D ini merupakan kawasan di mana Candi Borobudur berada dan menjadi salah satu dari destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Keberadaan kawasan D ini juga diperkuat oleh beberapa candi, beberapa desa wisata dengan atraksi budayanya, maupun kegiatan wisata petualangan yang diselenggarakan masyarakat sekitar.

2. Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Magelang 2014-2034

Gambar 4.2 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Magelang 2014-2034



Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

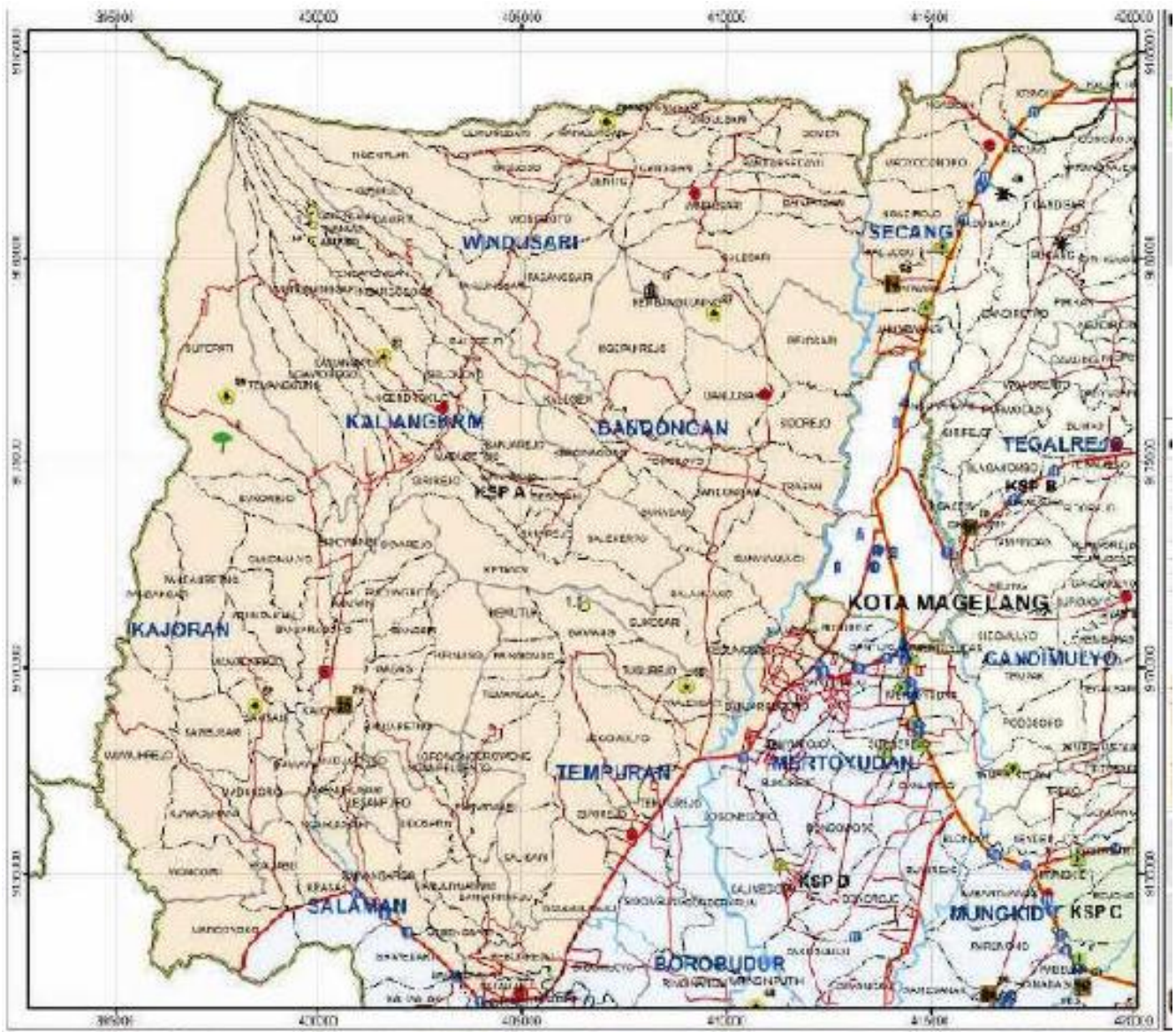
Dari peta kawasan strategis pariwisata (KSP) Kabupaten Magelang di atas dapat diketahui bahwa potensi pariwisata diidentifikasi sesuai dengan batas dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang. Dari sisi Barat terbentang KSP A yang memanfaatkan wisata alam Gunung Sumbing dan wisata budaya di tujuh kecamatan sekitarnya.

4.5.1 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Magelang 2014-2034

Berikut ini adalah penjelasan detail dari setiap kawasan wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Sebagai informasi dalam sebuah kawasan wisata bisa memiliki beberapa destinasi wisata. Untuk setiap destinasi wisata bisa terdiri dari beberapa daya tarik wisata. Sedangkan dalam satu daya tarik wisata bisa terdiri dari beberapa atraksi wisata.

A. PETA KAWASAN STRATEGIS A

Gambar 4.3 Peta Kawasan Strategis Pariwisata A Kabupaten Magelang 2014-2034



Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

Tabel 4.2 Kawasan Strategis Pariwisata A Kabupaten Magelang 2014-2034

KSP	Cakupan Wilayah	Destinasi
A		
Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing	Kecamatan Windusari	Wisata Alam
	Kecamatan Kaliangkrik	1. Air Terjun Curug Silawe
	Kecamatan Kajoran	Wisata Budaya
	Kecamatan Tempuran	1. Candi Selogriyo
	Kecamatan Bandongan	2. Desa Wisata Kembangkuning
	Kecamatan Salaman (sebagian)	3. Desa Wisata Mangunsari
	Kecamatan Secang (sebagian)	4. Desa Wisata Munggangsari
		5. Desa Wisata Prajeksari
		6. Desa Wisata Bawang
		7. Desa Wisata Sambak
		8. Desa Wisata Sutopati
		9. Desa Wisata Mangli
		10. Desa Wisata Adipuro
		Wisata Buatan
		1. Pemandian Kali Bening
		2. Wana Wisata Sutopati
		Events Budaya
		1. Upacara Adat Istiadat
		2. Kesenian Rakyat
		Kuliner
		1. Aneka jenis makanan-minuman tradisional

Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

Untuk KSP A , saat ini daya tarik wisata yang sedang hangat adalah Nepal Van Java yang terdapat di Dusun Butuh, Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Daya tarik wisata lainnya adalah Silancur Highland berlokasi di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik. Tepatnya di tenggara kaki Gunung Sumbing dan berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Selain itu masih terdapat pula Mangli Sky View Jika ingin berwisata menembus awan, kamu bisa berkunjung ke Mangli Sky View di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik. Tempat wisata tersebut berada di ketinggian 1.570 mdpl di sebelah timur Gunung Sumbing. Hamparan awan di langit cerah merupakan panorama yang disajikan Mangli Sky View. Kemudian masih ada daya tarik wisata Negeri Sayur Sukomakmur berlokasi di Dusun Nampan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Lokasi ini berada di lereng Gunung Sumbing dan terkenal dengan pemandangan terasering ladang sayurnya yang indah.

Tabel 4.3 Pengunjung Daya Tarik Wisata Nepal Van Java, Mangli Sky View dan Silancur Highland Kabupaten Magelang 2024

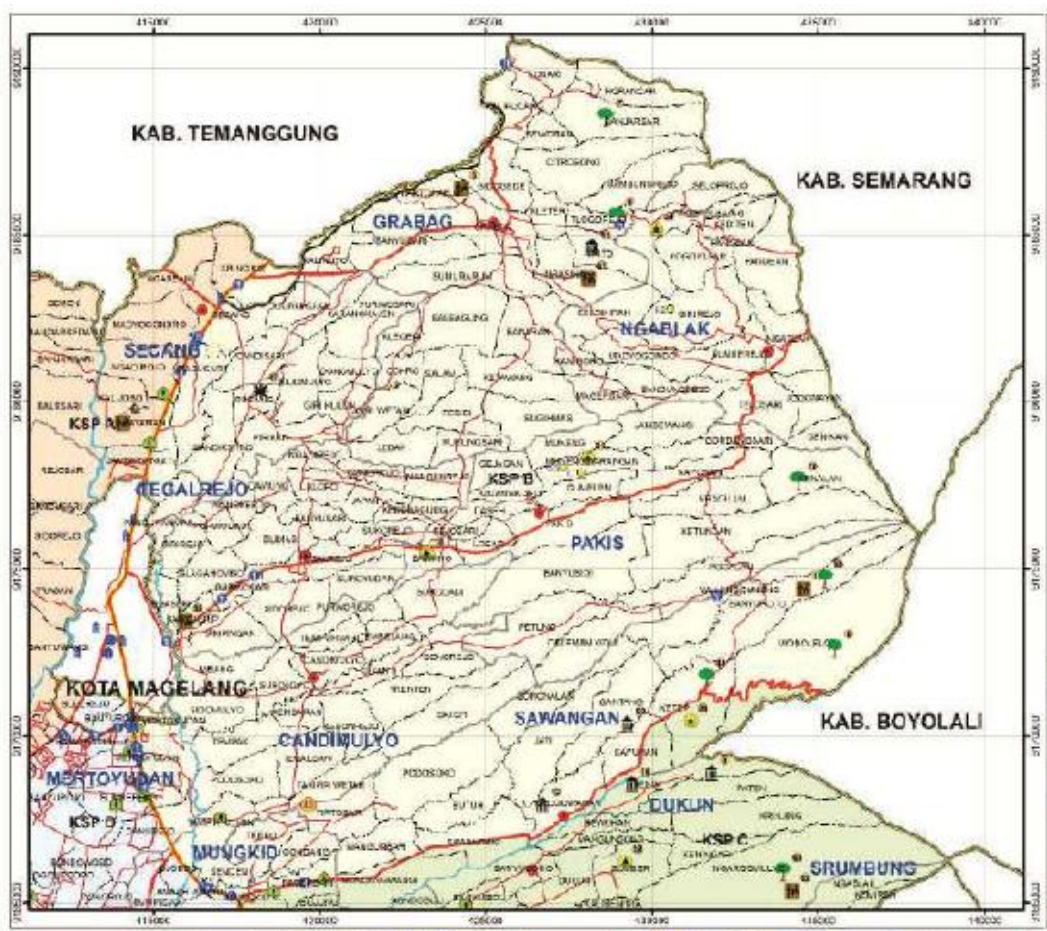
No	Obyek Wisata	Pengunjung
1	Nepal Van Java	39.725
2	Mangli Sky View	12.913
3	Silancur Highland	78.672

Sumber : Buku Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

B. PETA KAWASAN STRATEGIS B

Kawasan berikut ini terletak di sisi utara Kabupaten Magelang, berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan kabupaten Semarang. Keistimewaan kawasan ini adalah akses transportasi yang relatif mudah dari arah Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta.

Gambar 4.4 Peta Kawasan Strategis Pariwisata B Kabupaten Magelang 2014-2034



Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

Tabel 4.4 Kawasan Strategis Pariwisata B Kabupaten Magelang 2014-2034

KSP	Cakupan Wilayah	Destinasi
B		
Pengembangan Saujana Alam "Lembah Merapi – Merbabu"	1. Kecamatan Grabag	Wisata Alam
	2. Kecamatan Ngablak	1. Air Terjun Sekarlangit
	3. Kecamatan Tegalrejo	2. Air Terjun Seloprojo
	4. Kecamatan Pakis	3. Air Terjun Grenjengan Kembar
	5. Kecamatan Sawangan (sebagian)	4. Air Terjun Kedung Kayang
	6. Kecamatan Candimulyo	5. Ketep Pass
	7. Kecamatan Secang (sebagian)	6. Telaga Bleder
		7. Pendakian Gunung Andong
		8. Pendakian Merapi dari Kenalan Pakis
		9. Pendakian Merapi dari Banyuroto
		Wisata Budaya
		1. Pemandian Air Hangat Candi Umbul
		2. Makam Sunan Geseng
		3. Makam Panembahan Ngabei Noto
		4. Makam Kyai Condrobumi
		5. Candi Lumbung
		Desa Wisata
		1. Desa Wisata Pagergunung
		2. Desa Wisata Munengwarangan
		3. Desa Wisata Bawang
		4. Desa Wisata Mangunsari
		Wisata Buatan
		1. Pemandian Tirtokencono
		2. Agro Wisata Banyuroto
		Event Budaya
		1. Upacara Adat Istiadat/Tradisi
		2. Kesenian Rakyat
		Kerajinan
		1. Kerajinan Tanduk -Pucang Secang
		2. Kerajinan Kaleng Bekas -Tirtosari Sawangan
		Kuliner
		1. Aneka jenis makanan-minuman tradisional

Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

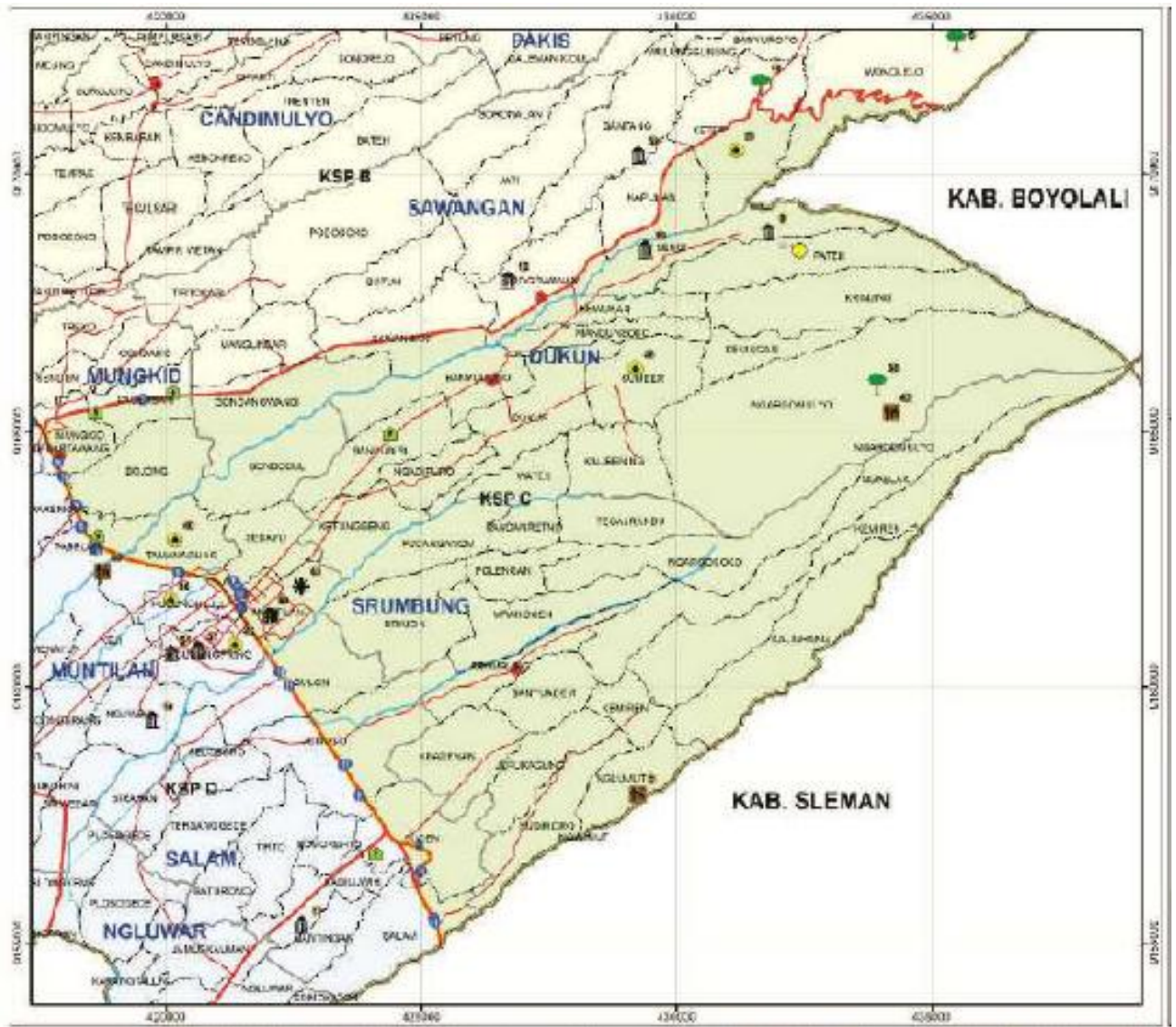
KSP B memiliki obyek wisata alam lebih banyak daripada KSP A, KSP C dan KSP D. ini menunjukkan potensi wisata alam yang seharusnya lebih besar daripada KSP lainnya. Obyek wisata unggulan KSP B adalah Ketep Pass yang dikelola oleh Badan Pengelola Obyek Wisata (BPOW Ketep Pass) dibawah Disparpora Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. PETA KAWASAN STRATEGIS C

Kawasan strategis C terletak berbatasan dengan Kabupaten Sleman, dengan aktivitas utama adalah lereng Gunung Merapi. Desa wisata Ketep kebetulan berada dalam area kawasan C, dengan potensi kegiatan petualangan ke Gunung Merapi, dan berbagai bentuk wisata berbasis

masyarakat lainnya.

Gambar 4.5 Peta Kawasan Strategis Pariwisata C Kabupaten Magelang 2014-2034



Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

Tabel 4.5 Kawasan Strategis Pariwisata C Kabupaten Magelang 2014-2034

KSP	Cakupan Wilayah	Destinasi
C		
Pengembangan Wisata	1. Kecamatan Srumbung	Wisata Alam
Vulkanologi dan Budaya	2. Kecamatan Dukun	Pendakian Merapi dari Babadan
Merapi	3. Kecamatan Mungkid (sebagian)	Wisata Budaya
	4. Kecamatan Sawangan (sebagian)	1. Candi Assu
	5. Kecamatan Muntilan (sebagian)	2. Candi Pendem
		3. Makam Pasteur Vanlith
		4. Makam Kyai Mukri
		Desa Wisata
		1. Desa Wisata Ketep
		2. Desa Wisata Sumber
		3. Desa Wisata Tamanagung
		Wisata Buatan
		1. Agro Wisata Salak Nglumut
		2. Agro Wisata Paten Dukun
		3. Pos Pengamatan Gunung Merapi Babadan
		Event Budaya
		1. Upacara Adat-Istiadat
		2. Kesenian Rakyat
		Kerajinan
		1. Seni Pahat Batu Prumpung
		Kuliner
		1. Aneka jenis makanan-minuman tradisional

Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

KSP C memiliki potensi wisata alam, wisata budaya, desa wisata serta agrowisata dengan unggulan Gunung Merapi serta salak pondoh.Nglumut.

Wisata budaya yang menonjol di KSP C adalah Festival Lima Gunung yaitu pesta seni tahunan yang diselenggarakan Komunitas Lima Gunung di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Festival ini melibatkan seniman dan pelestari budaya dari kawasan lima gunung (Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, dan Menoreh) serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Festival ini menampilkan beragam kesenian seperti tari, musik, teater, dan wayang, dengan menggunakan bahan alami dan swadaya para seniman. Komunitas Lima Gunung yang anggotanya mayoritas adalah seniman dan petani dari lima gunung di Magelang memprakarsai festival ini murni swadaya tanpa sponsor.

Festival Lima Gunung berlangsung di desa-desa sekitar lereng Gunung Merapi, seperti di Dusun Tutup Ngisor, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Tabel 4.6 Festival Lima Gunung 2022-2025 di Kabupaten Magelang

No	Tahun	Tanggal	Tema	Lokasi	Peserta	Keterangan
1	2022	30 September - 2 Oktober	"Wahyu Remagang,"	Dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak	NA	Festival ke 21
2	2023	Agustus 2023	"Kalis ing Kahanan"	Dusun Gejayan, Desa Banyuidi, Kecamatan Pakis	80 grup kesenian atau 1.700 seniman, 63 pelukis	Festival ke 22
3	2024	September 2024	"Wolak Waliking Zaman Kelakone"	Sanggar Dhom Sunthil di Dusun Warangan, Muneng Warangan, Pakis	120 kelompok	Festival ke 23
4	2025	9–13 Juli 2025	"Andhudhah Kawruh Sir"	Padepokan Tjipta Boedaja, Dusun Tutup Ngisor, Desa Sumber, Dukun	1.225 seniman, 80 grup kesenian.	Festival ke 24

Sumber : Data diolah

D. PETA KAWASAN STRATEGIS D

KSP D boleh dikatakan merupakan primadona pariwisata karena memiliki magnet pariwisata kelas dunia yakni Candi Borobudur. Hampir semua jenis wisata terdapat dalam KSP D dengan jumlah daya tarik wisata dan proyeksi serta eksisting desa wisata terbanyak se Kabupaten Magelang.

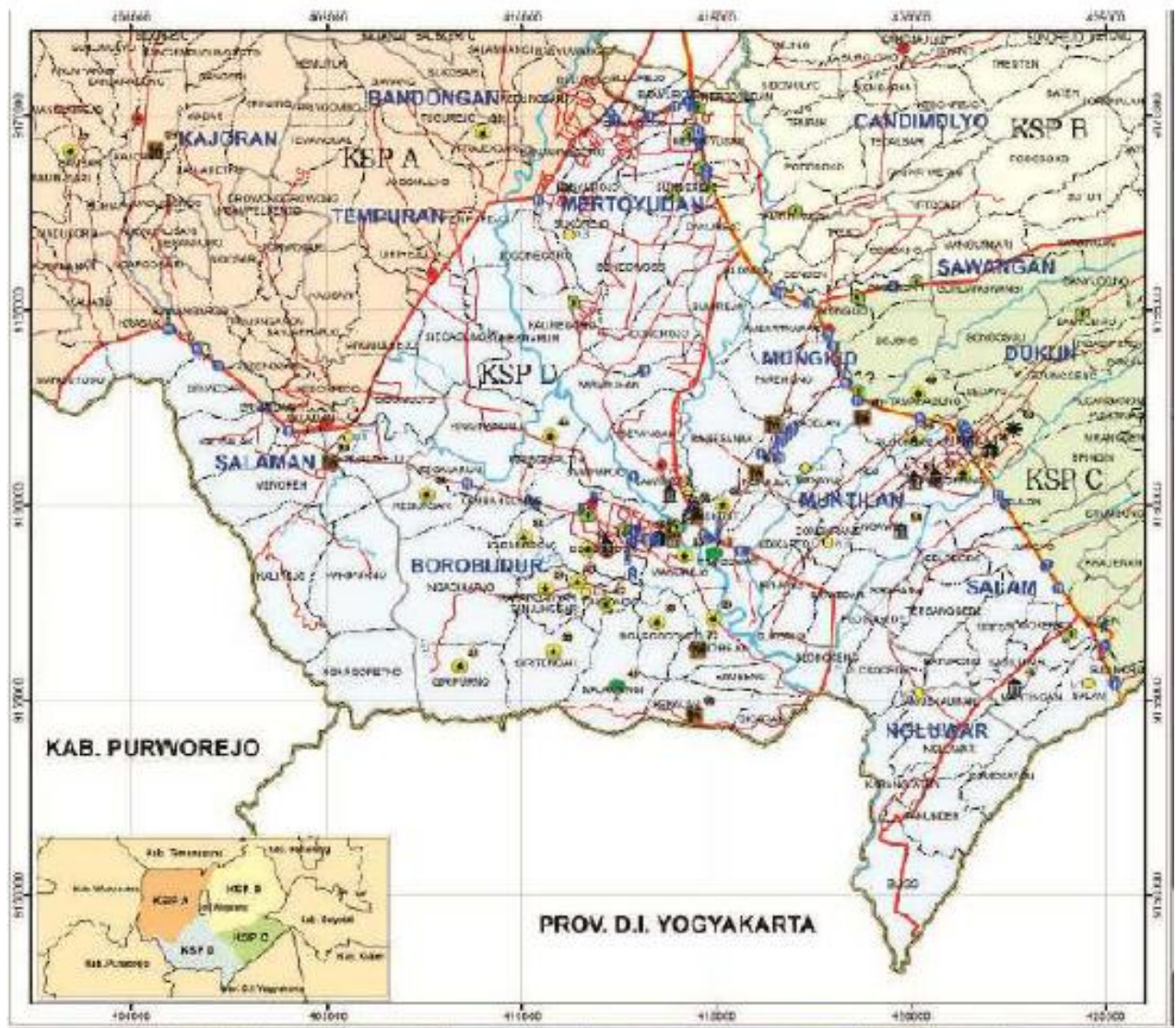
Candi Borobudur sebagai magnet pertama dan utama pariwisata Kabupaten Magelang telah menarik banyak pengunjung baik wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Candi Borobudur di tahun 2024 menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) dengan wisman terbanyak sejumlah 230.295 orang dan Kabupaten Magelang sebagai kabupaten dengan wisman terbanyak sebanyak 97.233 orang menurut data statistik pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur bersama Candi Mendut dan Candi Pawon mendominasi jumlah kunjungan wisman se Jawa Tengah.

Gambar 4.6 Highlight Pariwisata Jawa Tengah 2024



Sumber : Buku Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 4.7 Peta Kawasan Strategis Pariwisata D Kabupaten Magelang 2014-2034



Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

Tabel 4.7 Kawasan Strategis Pariwisata D Kabupaten Magelang 2014-2034

KSP	Cakupan Wilayah	Destinasi
D		Wisata Alam
Borobudur dalam Bayangan	1. Kecamatan Mertoyudan	1. Arung Jeram Sungai Elo
Merapi	2. Kecamatan Mungkid (sebagian)	2. Goa Gondopuwangi
	3. Kecamatan Muntilan (sebagian)	3. Watu Kendil
	4. Kecamatan Salam	4. Punthuk Setumbu
	5. Kecamatan Ngluwar	Wisata Budaya
	6. Kecamatan Borobudur	1. Candi Borobudur
	7. Kecamatan Salaman (sebagian)	2. Candi Mendut
		3. Candi Pawon
		4. Candi Canggal
		5. Candi Ngawen
		6. Candi Losari
		7. Makam Kyai Raden Santri
		8. Pasarean Pangeran Singosari
		9. Museum Haji Widayat
		10. Museum Mini Wayang Nasional
		11. Langgar Agung Pangeran Diponegoro
		Desa Wisata
		1. Desa Wisata Borobudur
		2. Desa Wisata Candirejo
		3. Desa Wisata Giripurno
		4. Desa Wisata Giritengah
		5. Desa Wisata Gunungpring
		6. Desa Wisata Karanganyar
		7. Desa Wisata Karangrejo
		8. Desa Wisata Kebonsari
		9. Desa Wisata Mendut
		10. Desa Wisata Ngargogondo
		11. Desa Wisata Pucungrejo
		12. Desa Wisata Tanjungsari
		13. Desa Wisata Teksongo
		14. Desa Wisata Wanurejo
		15. Desa Wisata Wringinputih
		16. Desa Wisata Jamus Kauman
		17. Desa Wisata Sukorejo
		Wisata Buatan
		1. Taman Anggrek
		2. Mandala Wisata
		3. Pemandian Tirto Adji
		4. Pembibitan Ikan Ngrajek
		5. Pembibitan Ikan Menayu
		6. Pembibitan Ikan Congkrang
		7. Taman Rekreasi Mendut
		8. Taman Suroloyo
		9. Pengembangan Subkawasan Pelestarian (SP) 2 KSN Borobudur
		Event Budaya
		1. Upacara Adat-Istiadat
		2. Kesenian Rakyat
		3. Upacara dan Pameran Tosan Aji
		Kerajinan
		1. Kaleng Bekas Ngadirejo Salaman
		Kuliner
		1. Aneka jenis makanan minuman tradisional

Sumber : RIPPARDA Kabupaten Magelang 2014-2034

4.6 PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN MAGELANG

Desa wisata memiliki peran penting dalam pariwisata Indonesia sebagai penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, dan pelestari budaya. Desa wisata meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor kreatif dan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja baru seperti pemandu wisata, pengelola homestay, serta usaha kerajinan dan kuliner. Selain itu, desa wisata berfokus pada pengembangan dan promosi potensi lokal, termasuk keindahan alam dan kekayaan budaya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan interaksi yang lebih baik dengan wisatawan.

Keberadaan desa wisata sangat mendukung kreatifitas industri wisata karena membantu memberikan alternatif daya tarik wisata di Kabupaten Magelang. Tanpa keberadaan desa wisata, maka variasi atraksi dan variasi daya tarik relatif terbatas, khususnya untuk wisata berbasis masyarakat.

Di mata wisatawan, keberadaan desa wisata dapat menjadi alternatif kunjungan wisata yang dekat dengan alam, mampu meningkatkan pengalaman, serta mendukung keinginan wisatawan untuk bereinteraksi dengan warga lokal.

Khususnya di kawasan sekitar Candi Borobudur, keberadaan desa wisata memberi alternatif dukungan pada akomodasi wisata, dukungan pada atraksi budaya, maupun dukungan berbasis komunitas wisata kawasan Borobudur.

Peran desa wisata dalam pariwisata di Kabupaten Magelang, dapat dilihat dari beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Penggerak ekonomi lokal:

Desa wisata menggerakkan roda perekonomian desa, dengan potensi untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang berbasis desa yang berinteraksi langsung dengan wisatawan. Pola ini sangat ideal di mana desa sekitar daya tarik (seperti di desa Ketep) memiliki potensi besar dengan membuka usaha yang dibutuhkan oleh wisatawan.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat:

Desa wisata menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengelolaan homestay, menjadi pemandu wisata, dan mengembangkan produk kerajinan serta kuliner khas desa. Peluang ini memberi kesempatan warga

sekitar untuk melayani wisatawan sehingga mendapat manfaat ekonomi secara langsung dari keberadaan wisatawan.

3. Penciptaan lapangan kerja:

Sejalan dengan keberadaan desa wisata menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pedesaan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan minat yang ada, bahkan menggunakan komoditas yang ada di sekitar desa untuk dijual kepada wisatawan

4. Pengembangan ekonomi kreatif:

Wisatawan pada umumnya mencari produk yang khas dan berkarakter unik. Produk ini biasanya identik dengan produk khas di suatu desa di sekitar DTW yang dikunjungi. Desa wisata memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal melalui ekonomi kreatif yang mengandalkan ide, inovasi, dan kreativitas. Desa wisata Candirejo misalnya, memiliki pengembangan potensi kreatif dengan menangkap peluang wisatawan yang berkunjung ke candi Borobudur.

5. Pelestarian budaya dan identitas:

Desa wisata membantu mengembangkan identitas dan ciri khas daerah sesuai dengan kearifan lokal, serta melestarikan budaya yang ada. Masyarakat di sekitar Ketep misalnya, dapat mengemas budaya dan identitas lokal untuk disajikan kepada wisatawan, misal dalam bentuk sajian makanan tradisional, atraksi budaya / adat desa, bahkan sampai kegiatan menginap bersama warga setempat (*live in*)

6. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat:

Pengembangan desa wisata melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, yang kemudian dapat bersinergi dengan pemangku kepentingan lain.

7. Peningkatan kualitas layanan pariwisata:

Salah satu yang dicari wisatawan adalah mendapatkan pengalaman unik yang belum pernah ditemukan sebelumnya, ketika berkunjung ke suatu DTW. Oleh karena itu, keberadaan candi Borobudur perlu didukung dengan berbagai atraksi otentik dari setiap desa wisata. Kalau ini tidak ada di sekitar Borobudur dan tidak diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, maka wisatawan akan

mencari layanan lain sepanjang perjalanannya, diantaranya ke Yogyakarta. Oleh karena itu keterlibatan langsung masyarakat dalam desa wisata dapat menciptakan pengalaman yang lebih berkualitas dan berkesan bagi wisatawan.

Dampaknya tentu pada 2 hal penting yang berkaitan dengan PAD di sektor pariwisata, yaitu:

- a. Meningkatkan lama tinggal wisatawan, yang otomatis:
- b. Meningkatkan nilai belanja wisatawan.

8. Pendukung pembangunan desa:

Dana desa dapat dialokasikan untuk pengembangan desa wisata, yang meliputi pembangunan infrastruktur pendukung seperti pondok wisata, kios cinderamata, dan pusat kuliner.

Dukungan dana desa ini dapat diarahkan pada pemberian modal produktif, membentuk daya tarik, ataupun peningkatan SDM dan kelembagaan desa.

Proses ini diperlukan agar dapat mengarahkan desa wisata agar mampu memenuhi kriteria kebutuhan dan keinginan wisatawan.

9. Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

BUMDes dibentuk untuk mengelola potensi desa, salah satunya melalui pengelolaan pariwisata, yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tabel 4.8 Desa Wisata Kabupaten Magelang 2025

No	Nama Desa	Kecamatan	No SK Bupati Magelang	Tanggal SK Bupati	Klasifikasi Desa Wisata
1	Desa Wisata Candirejo	Borobudur	556/1258/19/1999 (Perbup No. 6 Tahun 2008, tgl 31 Jan 2018) 180.182/229/KEP/19/2021	15 Juli 2021	Maju
2	Desa Wisata Borobudur	Borobudur	180.182/163/KEP/19/2018	15 April 2019	Maju
3	Desa Wisata Karangrejo	Borobudur	180.182/175/KEP/19/2018	12/03/2018 dan 15 Juli 2021	Maju
4	Desa Wisata Wanurejo	Borobudur	180.182/164/KEP/19/2019	15 April 2019	Maju
5	Desa Wisata Karanganyar	Borobudur	180.182/337/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Berkembang
6	Desa Wisata Majaksingi	Borobudur	180.182/57/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Berkembang
7	Desa Wisata Ngadiharjo	Borobudur	180.182/55/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Berkembang
8	Desa Wisata Ngargogondo	Borobudur	180.182/42/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Berkembang
9	Desa Wisata Teksongo	Borobudur	180.182/205/KEP/19/2023	29 September 2023	Berkembang
10	Desa Wisata Wringinputih	Borobudur	180.182/341/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Berkembang
11	Desa Wisata Ngawen	Muntilan	180.182/176/KEP/19/2018 180.182/228/KEP/19/2021	12/03/2018 dan 15 Juli 2021	Berkembang
12	Desa Wisata Banyubiru	Dukun	180.182/174/KEP/19/2018 dan 180.182/230/KEP/19/2021	12/03/2018 dan 15 Juli 2021	Berkembang
13	Desa Wisata Ngargoretro	Salaman	180.182/177/KEP/19/2018 dan 180.182/227/KEP/19/2021	12/03/2018 dan 15 Juli 2021	Berkembang
14	Desa Wisata Sambak	Kajoran	180.182/451/KEP/19/2023	29 Desember 2023	Berkembang
15	Desa Wisata Mendut	Mungkid	180.182/377/KEP/19/2023	18 Desember 2023	Berkembang
16	Desa Wisata Temanggung	Kaliangkrik	180.182/44/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Berkembang
17	Desa Wisata Pogalan	Pakis	180.182/46/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Berkembang
18	Desa Wisata Polengan	Srumbung	180.182/206/KEP/19/2023	29 Desember 2023	Berkembang
19	Desa Wisata Sukomakmur	Kajoran	180.182/238/KEP/19/2023	2 November 2023	Berkembang
20	Desa Wisata Keditan	Ngablak	180.182/376/KEP/19/2023	18 Desember 2023	Berkembang
21	Desa Wisata Paremono	Mungkid	180.182/375/KEP/19/2023	18 Desember 2023	Berkembang
22	Desa Wisata Wonolelo	Sawangan	180.182/453/KEP/19/2023	29 Desember 2023	Berkembang
23	Desa Wisata Bigaran	Borobudur	180.182/54/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Rintisan
24	Desa Wisata Giritengah	Borobudur	180.182/56/KEP/19/2020	11 Februari 2020	Rintisan
25	Desa Wisata Kebonsari	Borobudur	180.182/43/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Rintisan
26	Desa Wisata Kembanglimus	Borobudur	180.182/338/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Rintisan
27	Desa Wisata Kenalan	Borobudur	180.182/339/KEP/19/2020	13 Oktober 2020	Rintisan
28	Desa Wisata Sambeng	Borobudur	180.182/53/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Rintisan
29	Desa Wisata Tanjungsari	Borobudur	180.182/340/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Rintisan
30	Desa Wisata Tegalarum	Borobudur	180.182/41/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Rintisan
31	Desa Wisata Gunungpring	Muntilan	180.182/275/KEP/19/2019	06 Agustus 2019	Rintisan
32	Desa Wisata Sumber	Dukun	180.182/191/KEP/19/2019	08 Mei 2019	Rintisan
33	Desa Wisata Ngargosoko	Srumbung	180.182/204/KEP/19/2018 dan	05/04/2018 dan 15 Juli 2021	Rintisan
34	Desa Wisata Banyuroto	Sawangan	180.182/190/KEP/19/2019	08 Mei 2019	Rintisan
35	Desa Wisata Sutopati	Kajoran	180.182/165/KEP/19/2019	15 April 2019	Rintisan
36	Desa Wisata Jamuskauman	Ngluwar	180.182/274/KEP/19/2019	06 Agustus 2019	Rintisan
37	Desa Wisata Bawang	Tempuran	180.182/336/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Rintisan
38	Desa Wisata Prajeksari	Tempuran	180.182/276/KEP/19/2019	06 Agustus 2019	Rintisan
39	Desa Wisata Mangli	Kaliangkrik	180.182/74/KEP/19/2021	12 Maret 2021	Rintisan
40	Desa Wisata Girikulon	Secang	180.182/378/KEP/19/2023	18 Desember 2023	Rintisan
41	Desa Wisata Kembangkuning	Windusari	180.182/73/KEP/19/2021	12 Maret 2021	Rintisan
42	Desa Wisata Kebonlegi	Kaliangkrik	180.182/45/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Rintisan
43	Desa Wisata Temanggal	Tempuran	180.182/75/KEP/19/2021	12 Maret 2021	Rintisan
44	Desa Wisata Kalijoso	Secang	180.182/379/KEP/19/2023	18 Desember 2023	Rintisan
45	Desa Wisata Pancuranmas	Secang	180.182/380/KEP/19/2023	19 Desember 2023	Rintisan
46	Desa Wisata Sukosari	Bandongan	180.182/452/KEP/19/2023	29 Desember 2023	Rintisan

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kecamatan Borobudur memiliki desa wisata terbanyak sejumlah 18 desa wisata dengan status 4 desa wisata

maju, 6 desa wisata berkembang, dan 8 desa wisata rintisan.

Sementara itu Kecamatan Sawangan, di mana obyek wisata Ketep Pass berlokasi, hanya memiliki 2 desa wisata terdiri dari satu desa wisata berkembang (Desa Wonolelo) dan satu desa wisata rintisan (Desa Banyuroto). Bahkan Desa Ketep dimana obyek wisata Ketep Pass berlokasi dan tanahnya adalah tanah Kas Desa Ketep, belum menjadi desa wisata.

Jika dibandingkan dengan keberadaan desa wisata di sekitar candi Borobudur, maka dapat diambil kesimpulan bahwa di sekitar Ketep memerlukan dukungan dan arahan untuk terbentuknya desa wisata yang mampu mendukung keberadaan Ketep Pass. Keberadaan desa wisata ini sekaligus menguatkan nilai attractiveness Ketep, dengan menyediakan beberapa manfaat bagi wisatawan:

- a. Menguatkan magnet ketertarikan kawasan Ketep
- b. Melengkapi alternatif pilihan atraksi di sekitar Ketep
- c. Memecah kepadatan pengunjung pada peak season
- d. Memberi pengalaman yang lengkap dan komprehensif
- e. Meningkatkan lama tinggal dan lama kunjungan
- f. Meningkatkan nilai belanja wisatawan

4.7 POTRET PERSEBARAN WISATAWAN DI KABUPATEN MAGELANG

Salah satu poin penting dalam menilai aktivitas wisatawan adalah dengan memetakan jumlah kunjungan di setiap daya tarik wisata. Klustering atau pembagian kawasan wisata di Kabupaten Magelang memberi gambaran betapa variasinya keberadaan DTW yang ada di kabupaten ini. Tercatat ada 230 DTW yang siap dikunjungi dan memanjakan wisatawan di kabupaten Magelang, belum termasuk dengan wisata MICE dan wisata minat khusus.

Jumlah ini didominasi wisata alam dan wisata budaya. Namun dari jumlah tersebut, ternyata mayoritas 10 besar wisatawan dikuasai oleh candi Borobudur lebih dari 50%. Sedangkan 2 DTW berikutnya didapat oleh Ketep Pass dan Bukit Rhema.

Data ini menunjukkan, kualitas produk, promosi, dan amenitas di beberapa DTW lain masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Keberadaan lain selain yang masuk dalam 10 besar (dalam tabel di bawah) bukan berarti tidak bagus, namun perlu diberikan inovasi berupa:

1. Pengemasan Paket Wisata
2. Kolaborasi dengan Industri Wisata
3. Promosi Atraksi dan Budaya
4. Penguatan Kelembagaan

Berikut ini adalah tabel 10 besar daya tarik wisata di Kabupaten Magelang, yang diambil dan diolah dari data BPS.

Tabel 4.9 Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang dan Jumlah Wisatawan Tahun 2023

No	Nama Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan 2023	Jumlah Wisatawan 2024
1	Candi Borobudur	1.474.279	1.286.229
2	Ketep Pass	305.257	243.510
3	Bukit Rhema	100.473	95.036
4	Punthuk Setumbu	62.765	47.511
5	T Rekreasi Mendut	29.638	28.943
6	Kedung Kayang	20.313	20.788
7	Candi Ngawen	15.328	-
8	Candi Umbul	11.040	10.466
9	Selo Projo	5.702	7.077
10	Telaga Bledar	3.317	2.426
	Jumlah Wisatawan	2.028.112	1.741.986
	Jumlah WisNus	1.821.757	1.495.318
	Jumlah Wisman	229.489	269.054

Sumber : BPS diolah, 2025

Dari tabel di atas , dapat dilihat bahwa selama dua tahun terakhir Candi Borobudur masih menjadi magnet utama dan pertama serta primadona pariwisata Kabupaten Magelang bahkan Provinsi Jawa Tengah. Lebih dari 50 %

jumlah wisatawan di Kabupaten Magelang selama dua tahun terakhir didominasi dengan kunjungan ke Candi Borobudur baru kemudian ke Ketep Pass, Bukit Rhema (Gereja Ayam), Punthuk Setumbu dan Taman Rekreasi Mendut baru kemudian obyek wisata lainnya.

Bahkan menurut penuturan penggiat sekaligus pengusaha pariwisata sekaligus Ketua PHRI Kabupaten Magelang, COE (Calendar of Events) Candi Borobudur pada masa normal sebelum covid 19 menunjukkan betapa kegiatan pariwisata amat terpusat pada Candi Borobudur. Borobudur sebagai magnet pariwisata akan mendorong tingkat okupansi hotel yang bagus. Tingkat okupansi hotel yang bagus akan mendorong juga paket wisata outdoor activities dan UMKM.

Menurut Bp Usep Syarifudin pengunjung secara idealnya adalah 10,000 wisatawan per hari atau 300.000 wisatawan per bulan atau 4,8 juta wisatawan per tahun. Sementara COE saat ini dapat disusun dengan pembiayaan lintas pemangkukepentingan (pentahelix) , berdasarkan sinergi para pelaku industri pariwisata agar dapat membuat event yang dapat menjadi leverage perekonomian lokal termasuk menjadikan Borobudur Nights Festival sebagai pemersatu pemangkukepentingan dan melupakan ego sektoral.

Tabel 4.10 Calendar of Events (COE) Candi Borobudur pada masa normal sebelum covid 19

No	Bulan	Kegiatan	Keterangan
1	Januari	Pilgrimage Lama Gong Cen	10 hari kegiatan, wisman Italia , Brasil, Hongkong, Malaysia
2	Februari	Reguler, Imlek	Wisman
3	Maret	Reguler	Wisman Asia : China, Korea, Malaysia, Jepang
4	April	Reguler, Paskah	Wisman
5	Mei	Reguler, Waisak/Veshak	Wisman
6	Juni	Summer Holiday	Wisman
7	Juli	Summer Holiday	Wisman
8	Agustus	Summer Holiday	Wisman

9	September	Summer Holiday	Wisman
10	Oktober	Low Seasons	Gathering BUMN, Pemerintahan
11	November	Borobudur International Marathon	Pelari manca, nasional dan lokal Sponsor BUMN dan Pemerintah Pusat serta Provinsi
12	Desember	Natal dan Tahun Baru	Wisman

Sumber : Wawancara dengan Bp Usep Syarifudin , diolah

Fenomena yang menarik untuk dicermati juga adalah mulai terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan selama tiga tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Pembatasan jumlah pengunjung yang naik ke Candi Borobudur dimulai sejak Juni 2022 setelah adanya kajian daya tampung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Saat itu, kuota ditetapkan maksimal 1.200 orang per hari untuk menjaga kelestarian candi dan mencegah keausan pada batuan. Pengunjung yang ingin naik ke atas candi harus membeli tiket khusus dan mematuhi aturan pembatasan kuota harian yang dipantau melalui sistem digital.

Berkurangnya daya magnet pariwisata Candi Borobudur menurut Bp Usep Syarifudin disebabkan karena beberapa kondisi dan kebijakan:

1. Pembatasan jumlah wisatawan menjadi 1.200 wisatawan per hari dengan pemesanan tiket secara online
2. Tiket on line dicobakan per Juni 2025 dengan harga 545-555 ribu untuk wisman, harga pasar bisa 600 ribu
3. Data pengunjung saat weekend bisa >20.000 wisatawan per hari, saat Lebaran bisa mencapai > 60.000 per hari
4. Februari – Oktober 2025 adalah mode survival bagi pelaku jasa wisata
5. Salah satu hal positif pelaku pariwisata Candi Borobudur : tidak ada kanibalisme harga dalam persaingan usaha

Beberapa kebijakan ujicoba penarapan kebijakan *sustainability* untuk candi Borobudur ini sekaligus juga mengarahkan kebijakan kunjungan candi ke DTW

candi lain yang dalam pengelolaan PT Taman Wisata candi, yaitu ke Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Yogyakarta. Kondisi ini membuat pengunjung ke Borobudur berkurang, dan sejalan dengan kondisi tersebut ikut berkurangnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magelang.

Salah satu dampak yang langsung terlihat di tahun 2023 dan 2024 adalah menurunnya jumlah pengunjung Candi Borobudur dan obyek wisata lainnya. Hasil Kajian Dampak Sosial dan Ekonomi Pembatasan Pengunjung di Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang dilakukan oleh Balitbangda Kabupaten Magelang (2023) menyatakan bahwa :

1. Penurunan jumlah kunjungan akibat persepsi dan ekspektasi wisatawan yang menurun terhadap wisata edukasi di Candi Borobudur.
2. Penurunan dampak ekonomi masyarakat sekitar jika kunjungan wisatawan menurun.
3. Dapat memicu konflik sosial karena penurunan pendapatan dan perasaan diskriminatif atas pembatasan kunjungan ke puncak Candi Borobudur.
4. Potensi penurunan diseminasi budaya terhadap generasi muda karena pembatasan kunjungan

Kebijakan tersebut berdampak kepada :

1. Pedagang : souvenir, makanan-minuman, pengasong, Andong, Operator VW Safari, Tukang Parkir, jasa payung, jasa stroler, ojek dan fotografer
 - a. omset dan pendapatan pelaku jasa wisata di Candi Borobudur menurun hingga 85,4% dari sebelum kebijakan pembatasan
 - b. Kunjungan pada hari normal (weekdays) sekitar 1500 wisatawan dan hari libur pekanan 3000 wisatawan.
 - c. Sedangkan, pelaku jasa wisata di Candi Borobudur mencapai 3.564 unit usaha dengan berbagai jenis pekerjaan.
 - d. Secara umum, besaran *supply* jauh melebihi *demand* jika dilihat dari jumlah unit usaha jasa wisata dan jumlah pengunjung. Penjual bahkan lebih dari dua kali lipat wisatawan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pelaku jasa wisata Candi Borobudur

2. Pokok-pokok temuan Sosial Ekonomi :

- a. Upaya konservasi Candi Borobudur khususnya pembatasan kunjungan wisatawan di Candi Borobudur lebih banyak merugikan secara sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar Candi Borobudur khususnya pedagang kecil, pedagang asongan dan pelaku wisata lainnya
- b. Belum ada sosialisasi secara maksimal terhadap masyarakat sekitar mengenai kebijakan pembatasan pengunjung Candi Borobudur
- c. Terjadinya penurunan pendapatan masyarakat sekitar Candi Borobudur akibat dari pembatasan kunjungan wisata di Candi Borobudur terutama pedagang kecil, pedagang asongan, pelaku wisata di sekitar Candi Borobudur
- d. Penurunan omset pedagang tersebut rata-rata yakni sejumlah 80 % perhari misalnya sebelum pembatasan sejumlah Rp 100.000,00 turun menjadi Rp 20.000,00
- e. Penurunan pendapatan ini membawa dampak sosial terhadap masyarakat sekitar seperti terjadinya gesekan-gesekan antar masyarakat yang berupa konflik karena perebutan di sektor-sektor pariwisata, walaupun konflik masih berupa laten dan terkadang konflik manifest seperti kerawanan sosial yakni munculnya penyakit masyarakat
- f. Masyarakat terpecah-pecah atau terkotak-kotak menjadi beberapa kelompok seperti kelompok pelaku wisata masyarakat asli, pelaku wisata pendatang, dan masyarakat Borobudur
- g. Masyarakat sekitar Kawasan wisata Candi Borobudur hanya dijadikan sebagai obyek wisata saja bukan pelaku sekitar 30 tahun ini dan belum melibatkan pemberdayaan masyarakat secara maksimal walaupun ada itu hanya beberapa saja terutama kalangan tertentu
- h. Masyarakat sekitar Borobudur terdiri dari Masyarakat Borobudur yang terdiri dari pelaku wisata, pelaku UMKM, Pedagang kecil dan pedagang asongan di sekitar Borobudur dan Masyarakat Adat Borobudur

- i. Adanya persempitan peluang atau kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar sebagai pedagang dan lain-lain karena adanya pembatasan kunjungan wisatawan.
- j. Belum ada sinergi antar instansi pemerintah seperti beberapa kementerian terkait dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan masyarakat sekitar Candi Borobudur
- k. Masyarakat asli sekitar Candi Borobudur mulai tergeser dan tergusur oleh investor karena modal yang besar seperti banyak tanah yang dijual kepada investor.

4.8 POTRET JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA DAN MANCANEGARA

Fokus dalam kajian ini pada dasarnya adalah DTW Ketep Pass. Namun perlu dilihat juga pergerakan kunjungan masing-masing daya tarik wisata yang ada di Magelang, khususnya yang memiliki jumlah pengunjung 10 besar terbaik.

Tabel 4.11 Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Obyek Wisata Kabupaten Magelang 2008-2024

Obyek wisata/Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Candi Borobudur																	
Wisatawan	2.237.717	2.515.171	2.408.453	2.186.281	3.014.093	3.371.451	3.398.980	3.578.387	3.795.300	3.775.799	3.855.285	3.989.839	997.250	423.604	1.497.222	1.474.279	1.300.000
Wisdom	2.108.334	2.368.196	2.261.081	1.957.711	2.827.837	3.147.164	3.157.166	3.392.993	3.594.684	3.551.326	3.663.054	3.747.757	965.699	422.930	1.443.286	1.281.226	1.100.000
Wisman	129.383	146.975	147.372	228.570	186.256	224.287	241.814	185.394	200.616	224.473	192.231	242.082	31.551	674	53.936	193.053	200.000
2. Ketep Pass																	
Wisatawan	369.579	413.681	341.792	268.558	345.808	342.944	329.480	354.084	337.994	320.929	334.987	299.431	100.274	76.863	207.455	305.257	246.432
Wisdom	363.896	408.183	337.747	265.981	343.207	340.602	327.635	352.497	336.819	319.664	333.841	298.246	100.158	76.863	207.299	304.593	245.486
Wisman	5.683	5.498	4.045	2.577	2.601	2.342	1.845	1.587	1.175	1.265	1.146	1.185	116	-	156	664	946
3. Bukit Rhema																	
Wisatawan									41.475	1.500	143.789	46.305	1.499	18.850	67.211	100.473	95.036
Wisdom									41.266	1.500	122.305	39.937	1.499	18.818	64.499	87.835	79.591
Wisman									209	-	21.484	6.368	-	32	2.712	12.638	15.445
4. Candi Ngawen																	
Wisatawan									26.656	28.693	19.451	33.028	2.581	-	11.305	15.328	-
Wisdom									26.544	28.544	19.307	32.657	2.561	-	11.305	15.328	-
Wisman									112	149	144	371	20	-	-	-	-
5. Kedung Kayang																	
Wisdom									4.662	6.541	3.514	47.711	12.855	6.086	20.313	20.313	20.788
6. Candi Umbul																	
Wisatawan									37.258	40.014	26.373	20.132	4.757	-	16.432	11.040	10.466
Wisdom									37.258	40.014	26.373	20.132	4.757	-	222	11.040	10.466
Wisman									-	-	-	-	-	-	16.210	-	-
7. TR Mendut																	
Wisdom									91.385	40.014	115.023	113.206	14.390	37.798	37.798	29.638	28.943
Wisman									-	-	-	-	3.160	-	-	-	-
8. Curug Silawe																	
Wisatawan									5.471	3.596	3.110	2.945	-	750	-	-	-
Wisdom									5.471	3.596	3.110	2.945	-	750	-	-	-
Wisman									-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Punthuk Setumbu																	
Wisatawan									102.886	122.879	114.103	79.326	15.025	25.692	63.357	62.765	47.511
Wisdom									78.616	104.322	97.878	70.426	14.287	25.561	52.569	39.631	25.125
Wisman									24.270	18.557	16.225	8.900	738	131	10.788	23.134	22.386
10. Selo Projo																	
Wisatawan									5475	2848	1334	0	1000	0	832	5702	7.077
Wisdom									5475	2848	1334	0	1000	0	832	5702	7.077
Wisman																	
11. Telaga Bleder																	
Wisatawan									8.836	13.506	14.674	11.288	1.501	606	3.578	3.317	2.426
Wisdom									8.836	13.506	14.674	11.288	1.501	606	3.578	3.317	2.426
Wisman									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Wisatawan	2.607.296	2.928.852	2.750.245	2.454.839	3.359.901	3.714.395	3.728.460	3.932.471	4.457.398	4.356.319	4.631.643	4.643.211	1.151.132	590.249	1.925.503	2.028.112	1.758.679
Jumlah Wisdom	2.472.230	2.776.379	2.598.828	2.223.692	3.171.044	3.487.766	3.484.801	3.745.490	4.255.286	4.130.432	4.416.638	4.393.205	1.119.445	589.543	1.852.489	1.821.757	1.542.288
Jumlah Wisman	135.066	152.473	151.417	231.147	188.857	226.629	243.659	186.981	226.382	244.444	231.230	258.906	32.425	837	67.592	229.489	238.777

Sumber : BPS diolah

Tabel 4.12 Jumlah dan Pertumbuhan Wisatawan 10 Obyek Wisata
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2024

Wisatawan 10 Obwis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Prosentase
Jumlah Wisatawan	4.457.398	4.356.319	4.631.643	4.643.211	1.151.132	590.249	1.925.503	2.028.112	1.741.986	
Jumlah Wisdom	4.255.286	4.130.432	4.416.638	4.393.205	1.119.445	589.543	1.852.489	1.821.757	1.495.318	85,84
Jumlah Wisman	226.382	244.444	231.230	258.906	32.425	837	67.592	229.489	269.054	15,45
Pertumbuhan										Rata-Rata
Jumlah Wisatawan		-2,27	6,32	0,25	-75,21	-48,72	226,22	5,33	-14,11	12,23
Jumlah Wisdom		-2,93	6,93	-0,53	-74,52	-47,34	214,22	-1,66	-17,92	9,53
Jumlah Wisman		7,98	-5,41	11,97	-87,48	-97,42	7.975,51	239,52	17,24	

Sumber : BPS Diolah

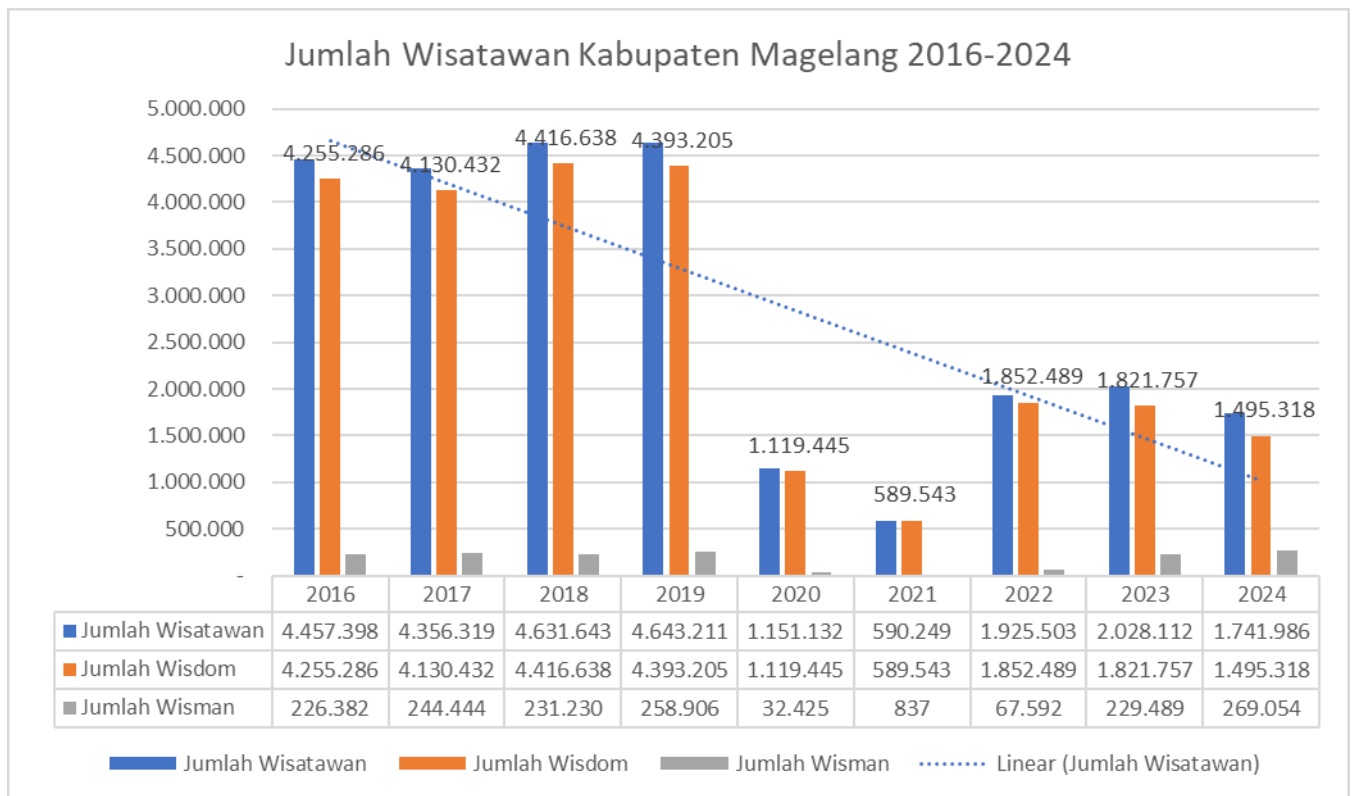
Dari tabel di atas dan grafik dibawah , puncak jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang terjadi di tahun 2019 sebanyak 4.643.211 yang terdiri dari 4.393.205 wisatawan nusantara dan 258.906 wisatawan mancanegara. Sebagaimana diketahui bersama selama masa pandemi covid 19 dengan PPKM membuat kunjungan wisatawan terjun bebas dan baru pulih setelah pandemi berakhir. Pemulihan paska pandemi covid 19, jumlah wisatawan kembali membaik namun selama dua tahun terakhir berkisar setengah bahkan menyusut hingga sepertiga dari jumlah pengunjung di tahun 2019. Angka ideal sekitar 4 juta wisatawan per tahun oleh Bapak Usep Syarifudin terkonfirmasi dengan data time series diatas.

Mengambil kesimpulan dari hasil kajian dari Balitbangda Kabupaten Magelang (2023) tentang pembatasan jumlah pengunjung Candi Borobudur sepertinya terkonfirmasi dengan data tabel di atas bahwa terjadi pertumbuhan negatif selama dua tahun terakhir.

Melihat grafik dibawah utamanya untuk garis trend atau kecenderungan, selama periode 2016-2024, jumlah wisatawan di Kabupaten Magelang cenderung menurun seperti ditampakkan oleh titik-titik berwarna biru. Jika melihat diagram batang selama tiga tahun terakhir, penurunan jumlah wisatawan itu semakin nyata terjadi. Ditahun 2025 hingga akhir September lalu, dinyatakan oleh Bendahara Penerima Pendapatan Disparpora Kabupaten Magelang bahwa realisasi pendapatan obyek wisata Kabupaten Magelang baru mencapai sekitar 60 % . Harapan pencapaian target penerimaan pendapatan daya tarik wisata terletak pada kesempatan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan limpahan

kunjungan wisatawan (nusantara) yang menyertainya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh para pelaku industri pariwisata Kabupaten Magelang saat dilakukan wawancara dengan mereka.

Gambar 4.8 Jumlah Wisatawan Kabupaten Magelang 2016-2024



Sumber : BPS Diolah

Dari 2 tabel dan 1 grafik tersebut, maka terlihat kondisi pariwisata di Kabupaten magelang belum dapat pulih seperti sebelum masa pandemi. Fenomena ini juga terjadi di beberao kota / kabupaten yang lain. Fenomena lain yang dapat dilihat adalah munculnya tren wisata alam terbuka dengan udara segar sebagai 'kompensasi' dari kebiasaan yang selama ini harus terkurung di era pandemi. Kegiatan ini kemudian dikenal dengan back to nature tourism.

4.9 DAYA TARIK WISATA KETEP PASS KABUPATEN MAGELANG

Ketep Pass adalah objek wisata alam di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang berlokasi di ketinggian 1.200 mdpl luas areanya kurang lebih 8000 meter persegi. Ketep pass ini berjarak 21 km dari Mungkid, 17 km dari Desa Blabak ke arah timur, 30 km dari Kota Magelang, 35 km dari Kota Boyolali, dan 30 km dari Candi Borobudur. Dari Kota Salatiga yang berjarak sekitar 32 km, Ketep Pass dapat dicapai melalui Kopeng dan Desa Kaponan. Lokasi objek wisata Ketep Pass ini mudah dijangkau baik dengan bus besar, minibus, sedan atau sejenisnya maupun sepeda motor karena medan jalannya yang tidak terlalu susah untuk dilewati.

Obyek Wisata Ketep Pass menawarkan panorama indah pegunungan seperti Gunung Merapi dan Merbabu, dan juga beberapa gunung lain seperti Sindoro, Sumbing, Telomoyo, Tidar, Andong, dan juga Slamet. Selain pemandangan, tempat ini juga merupakan destinasi edukasi dengan adanya Museum Vulkanologi "Ketep Vulcano Centre" yang menyajikan informasi tentang Gunung Merapi.

Fasilitas lain yang tersedia termasuk Gardu Pandang, teropong, restoran, mushola, dan toko souvenir. Ketep Pass diresmikan sebagai kawasan wisata jalur Solo–Selo–Borobudur (SSB) oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 17 Oktober 2002.

4.9.1 ATRAKSI WISATA DI DTW KETEP PASS

Pemandangan alam: Dari Ketep Pass, pengunjung dapat menikmati pemandangan Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan gunung-gunung lainnya, serta lanskap pedesaan di sekitarnya. Datang pada pagi hari untuk menikmati kabut atau sore hari untuk melihat matahari terbenam.

Edukasi vulkanologi: Ketep Volcano Centre memiliki berbagai informasi tentang Gunung Merapi, seperti miniatur gunung, contoh batu dari letusan, poster peringatan lahar, dan foto-foto letusan. Pengunjung juga bisa mengakses informasi dari komputer interaktif.

Museum Vulkanologi: Museum ini memiliki luas kurang lebih 550 m persegi. Di dalamnya berdiri miniatur Gunung Merapi, komputer interaktif yang berisi tentang dokumen kegunungapian, beberapa contoh batu-batuan bukti

letusan dari tahun ke tahun, poster puncak Garuda yang berukuran 3x3m, poster peringatan dini lahar Gunung Merapi, dan juga beberapa foto dan poster yang menggambarkan kisah dari aktivitas Gunung Merapi.

Bioskop mini: Memiliki kapasitas tempat duduk yang cukup banyak, yaitu 78 kursi. Bioskop ini menyajikan film berupa sejarah dari Gunung Merapi yang meliputi peristiwa terbentuknya Gunung Merapi, jalur-jalur pendakian, penelitan di puncak Garuda, letusan dahsyat Gunung Merapi, dan berbagai peristiwa yang terjadi dalam rentetan waktu tertentu. Durasi dari film ini cukup pendek, hanya sekitar 25 menit.

Fasilitas atau atraksi wisata yang disediakan di DTW ini adalah:

1. Gardu Pandang: Berupa dua buah gazebo masing-masing dengan ukuran empat persegi panjang dan bangunan segi delapan dengan panjang panjang sisi lima meter. Dari Gardu Padang ini, pengunjung dapat melihat keindahan alam Gunung Merapi dan Merbabu, serta hamparan lahan pertanian yang ada di kedua kaki Gunung tersebut. Area untuk menikmati pemandangan dari ketinggian, termasuk Gardu Pandang Panca Arga.
2. Teropong: Teropong yang tersedia memungkinkan pengunjung untuk melihat pemandangan gunung lebih jelas.
3. Restoran: Tempat makan yang menyajikan hidangan sambil pengunjung menikmati pemandangan.
4. Fasilitas lain: Terdapat mushola, area bermain anak, dan toko souvenir, area parkir yang luas, pelataran dan toilet/WC bagi pengunjung.

Lokasi daya tarik wisata Ketep Pass berada di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di jalur Solo-Selo-Borobudur (SSB).

- Jam operasional: Buka setiap hari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.
- Tiket masuk: Harga tiket bervariasi antara hari biasa dan akhir pekan. Tiket atraksi tambahan seperti bioskop dan teropong dikenakan biaya terpisah.

- Tiket hari biasa/week day Rp 10.500,-
- Tiket hari libur/weekend Rp 12.500,-
- Tiket Bioskop Rp 10.000,-
- Tiket Menara Langit Merapi Rp 10.000,-

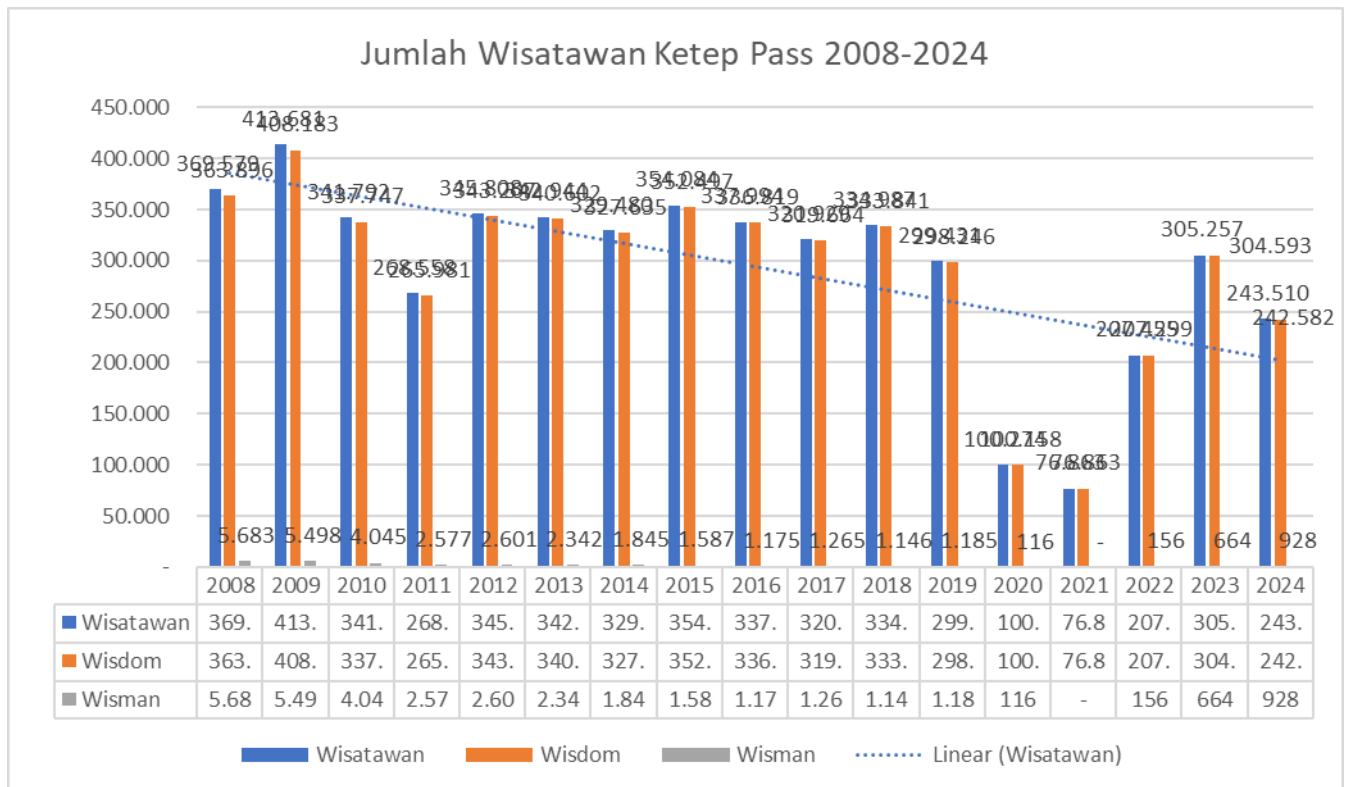
Sejak dibuka pertama kali di tahun 2002 hingga kini Ketep Pass telah berusia lebih dari 23 tahun. Selama perjalanan panjang tersebut tentu banyak perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana daya tarik wisata Ketep Pass. Pada tahun 2021 Ketep Pass menerima Dana Alokasi Khusus fisik sebesar 3,6 milyar dari 7,6 milyar yang diajukan. Dana sebesar itu digunakan untuk membangun:

1. Menara Langit – Gardu Pandang
2. Kios sebanyak 13 unit
3. Penataan lingkungan dengan paving block

Pada saat PPKM dicabut oleh pemerintah di tahun 2022 maka daya tarik wisata Ketep Pass siap menyambut lonjakan pengunjung pada masa new normal.

Dari grafik di bawah, puncak kunjungan ke daya tarik wisata Ketep Pass terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah wisatawan sebanyak 413.681 yang terdiri dari 408.183 wisatawan nusantara dan 5.498 wisatawan mancanegara. Setelah masa puncak itu kemudian terjadi kecenderungan selama periode 2008-2024. Selama tiga tahun terakhir jumlah pengunjung berkisar di angka 200 ribuan hingga 300 ribuan. Sebuah trend jumlah kunjungan yang mengikuti trend kunjungan ke Candi Borobudur sebagai magnet pertama dan utama pariwisata Kabupaten Magelang.

Gambar 4.9 Jumlah Wisatawan Ketep Pass 2008-2024



Sumber : BPS diolah

4.9.2 PENDAPATAN DAYA TARIK WISATA KETEP PASS

Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan tentu amat diharapkan oleh pengelola obyek wisata. Jumlah kunjungan wisatawan berdampak kepada pendapatan daya tarik wisata tersebut juga berdampak kepada pelaku industri wisata lokal seperti UMKM melalui kios-kios, resto dan kafe, juru parkir, pemandu wisata, pedagang asongan hingga penyedia outdoor activities seperti berkuda, jeep tour, VW Safari tour dan lain-lain.

Pendapatan daya tarik wisata Ketep Pass sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah berkisar antara 2 milyar hingga 4 milyar untuk periode 2022 – 2025 (akhir September 2025). Selama empat tahun terakhir, pendapatan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 4,2 milyar kemudian di tahun 2024 sebesar 4,1 milyar. Pendapatan terbesar selama 2022-2025 datang dari pembelian tiket oleh pengunjung kemudian dari parkir kendaraan pengunjung dan lain-lain (sarana hiburan lainnya).

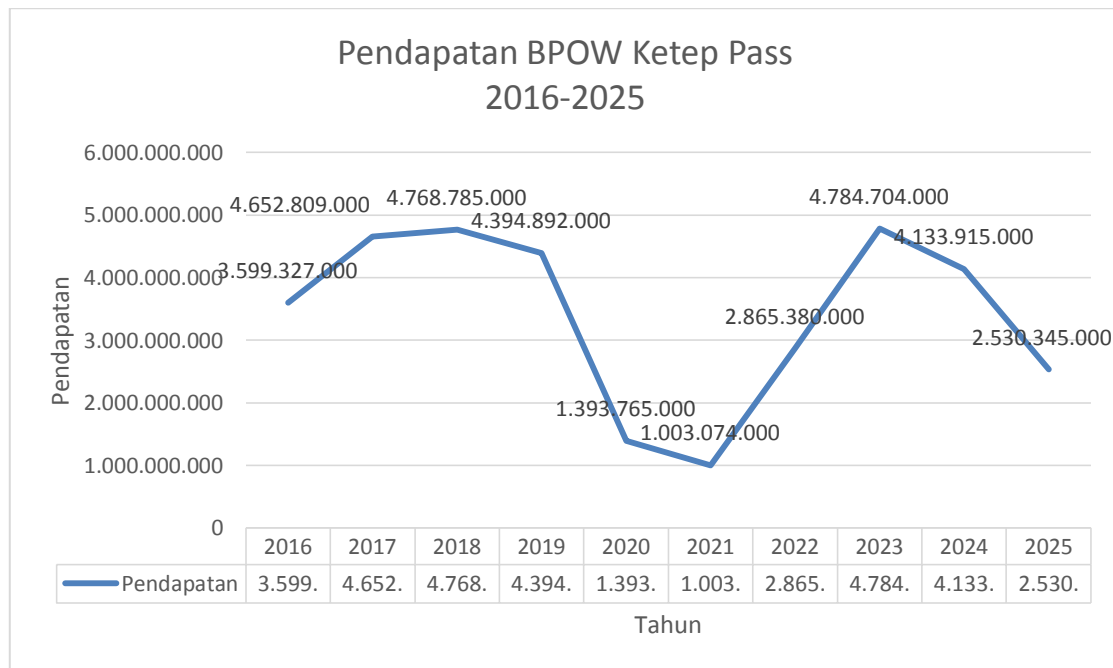
Tabel 4.13 Pendapatan Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang Tahun 2022-2025

No	Obyek Wisata/Jenis	2022				2023				2024				2025 (September)			
		Tiket	Parkir	Lain-Lain	Jumlah	Tiket	Parkir	Lain-Lain	Jumlah	Tiket	Parkir	Lain-Lain	Jumlah	Tiket	Parkir	Lain-Lain	Jumlah
1	Ketep Pass	2.568.900.000	232.873.000	52.000.000	2.853.773.000	3.858.337.000	281.883.000	78.225.000	4.218.445.000	3.790.164.000	253.250.000	149.280.000	4.192.694.000	2.316.680.500	146.025.000	69.700.000	2.532.405.500
2	Telaga Bledar	22.729.500	5.073.000	5.000.000	32.802.500	18.613.500	4.505.000	2.000.000	25.118.500	16.058.500	4.149.000	2.555.000	22.762.500	8.650.000	1.967.000	510.000	11.127.000
3	Candi Umbul	92.941.500	20.456.000	0	113.397.500	54.578.000	14.295.500	0	68.873.500	63.645.500	14.956.000	1.325.000	79.926.500	37.741.000	9.145.000	0	46.886.000
4	TR Mendut	308.927.000	45.886.000	11.730.000	366.543.000	213.601.000	28.064.000	10.900.000	252.565.000	268.280.000	33.856.000	23.655.000	325.791.000	165.049.500	17.667.000	7.460.000	190.176.500
5	Candi Pawon	40.409.500			40.409.500	76.760.000			76.760.000				298.097.500				195.717.700
6	Candi Mendut	114.125.500			114.125.500	203.900.500			203.900.500								
7	AT Kedung Kayang	2.348.160	240.900		2.589.060	24.759.680	2.281.750		27.041.430	19.262.560	2.276.500		21.539.060	16.836.880	1.851.300		18.688.180
8	AT Seloprojo	690.000	35.000		725.000	8.105.000	1.125.000		9.230.000	9.782.000	1.361.000		11.143.000	10.256.000	1.335.000		11.591.000
9	Kalibening	104.970.000	8.812.000		113.782.000	76.330.000	4.007.000		80.337.000	99.575.500	12.214.000		111.789.500	56.674.500	7.059.000	2.000.000	65.733.500
10	Stadion Gemilang	122.200.000			122.200.000	132.800.000			132.800.000	136.300.000	3.732.000		140.032.000	76.400.000	13.135.000		89.535.000
11	Tourism Information Centre - TIC	3.396.410.120	315.178.800	71.730.000	3.783.318.920	5.263.247.920	390.290.250	100.525.000	5.754.063.170			2.500.000	2.500.000			1.701.600	1.701.600
	Jumlah	6.774.651.280	628.554.700	140.460.000	7.543.665.980	9.931.032.600	726.451.500	191.650.000	10.849.134.100	4.403.068.060	325.794.500	179.315.000	5.206.275.060	2.688.288.380	198.184.300	81.371.600	3.163.561.980
No	Proporsi Jenis Pend	Tiket	Parkir	Lain-Lain	Jumlah	Tiket	Parkir	Lain-Lain	Jumlah	Tiket	Parkir	Lain-Lain	Jumlah	Tiket	Parkir	Lain-Lain	Jumlah
1	Ketep	90,02	8,16	1,82	100	91,46	6,68	1,85	100	90,40	6,04	3,56	100	91,48	5,77	2,75	100
2	Telaga Bledar	69,29	15,47	15,24	100	74,10	17,93	7,96	100	70,55	18,23	11,22	100	77,74	17,68	4,58	100
3	Candi Umbul	81,96	18,04		100	79,24	20,76	0,00	100	79,63	18,71	1,66	100	80,50	19,50	0,00	100
4	TR Mendut	84,28	12,52	3,20	100	84,57	11,11	4,32	100	82,35	10,39	7,26	100	86,79	9,29	3,92	100

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang Diolah, 2025

*Keterangan : Tahun 2025 sampai dengan akhir September 2025

Gambar 4.10 Pendapatan BPOW Ketep Pass 2016-2025



Sumber : BPOW Ketep Pass, 2025 diolah

Keterangan : Tahun 2025 hingga akhir September 2025

Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa puncak penerimaan pendapatan obyek wisata Ketep Pass terjadi di tahun 2018 sebesar 4,7 milyar. Pada masa pandemi covid 19 (2020 dan 2021) , penerimaan pendapatan tinggal 25 % saja dari tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemi covid 19 berakhir, pendapatan mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar 4,78 milyar, menurun menjadi 4,1 milyar di tahun 2024 dan 2,5 milyar di akhir September 2025. Rangkaian masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang akan datang menjadi tumpuan harapan semua obyek wisata dan pelaku wisata di Kabupaten Magelang untuk mendapatkan melimpahnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Kunjungan wisatawan ke Ketep Pass tentu perlu disambut dengan bermacam pelayanan. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan makan-minum serta lainnya. Jumlah kios, pemilik dan komoditinya dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 4.14 Jumlah dan Pemilik Kios di Obyek Wisata Ketep Pass 2025

No	Nama Kios	Jenis Jualan	Nama Pemilik Kios	Alamat Pemilik Kios
1	Pusat Layanan Informasi JIP Wisata Ketep Pass	Sewa Jip Nisan Terano	Alifiah Masrurroh	Gintung 20/05, Ketep , Sawangan
2	Kedai Njajan	Aneka Cemilan	Dinna Mufliha	Pucungrejo, Muntilan
3	Irul Cilok	Cilok Jasuke Es Cream	Maryono	Dadapan 12/3, Ketep, Sawangan
4	Kyutea Takoyaki	Takoyaki, Dimsum, Mie	Rista Santista Anggraeni	Perum Griyo Rejo Indah, Japunan, Mertoyudan
5	Look Good	Aksesoris Cinderamata	Arum Marlianti	Jl. Serayu Timur 1 6/2 Magelang
6	Berkah Jaya	Aneka Makanan Kering, Minuman , Kaos, Jajanan anak dll	Sri Kadarina	Dsn Cetokan 2 Candiretno Secang
7	Oleh - Oleh Souvenir	Kaos dan Souvenir	Rajab Santosa	Ketunggeng , Dukun, Magelang
8	Outlet Potato	Kentang dan Es Teh	Dedy Aris Setyawan	Pagergunung, Ngablak, Magelang
9	Coklat	Aneka Coklat	Rudi Setiawan	Blabak, Magelang
10	Bakpia Juwara Satoe	Bakpia (oleh -oleh)	Nanang Kriswantoro	Dadapan , Ketep, Sawangan
11	Warung Ndeso Ketep Pass	Makanan dan Minuman	Bumdes Keket Mante	Ketep, Sawangan
12	Rumah Makan Kampoeng Merapi	Makanan dan Minuman	Hanifah	Puluhan, Ketep, Sawangan
13	Camera 360	Jasa Video 360	Eko Aziz Prasetyo	Gintung, Ketep , Sawangan
14	Es Cream	Es Cream	Joko Ahmad Fauzi	Gintung, Ketep, Sawangan
15	Restoran Ketep Pass	Makanan dan Minuman	Sudarmanto	Ketep, Sawangan

Sumber : BPOW Ketep Pass, 2025

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magelang (Disparpora) untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke obyek wisata Ketep Pass adalah menyelenggarakan kegiatan pariwisata dengan nama Ketep Summit Festival.

Ketep Summit Festival adalah acara tahunan yang diselenggarakan di Ketep Pass, Magelang, untuk mempromosikan pariwisata daerah, khususnya melalui perpaduan antara seni, budaya, dan alam. Festival ini biasanya berlangsung selama beberapa hari dan menampilkan berbagai kegiatan seperti pertunjukan kesenian rakyat, konser musik, pameran produk UMKM, dan kirab gunung. Tujuan utamanya adalah meningkatkan minat wisatawan dan menggairahkan perekonomian masyarakat sekitar.

1. Kegiatan utama Ketep Summit Festival :

- a. Pertunjukan seni dan musik: Menggabungkan seni tradisional seperti kesenian topeng ireng, soreng, dan jathilan dengan konser musik yang menampilkan musisi lokal maupun bintang tamu.
- b. Kirab dan Grebeg Gunung: Rangkaian acara ini menjadi puncak festival, di mana gunung dari berbagai kecamatan

diarak sebagai simbol budaya lokal dan ditutup dengan pembagian hadiah.

- c. Pameran UMKM: Memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal untuk memamerkan dan menjual produk-produk mereka, seperti kerajinan dan kuliner.
- d. Acara khusus: Terkadang ada acara khusus seperti "Ketep Coffe Night" atau peringatan hari tertentu, seperti peringatan erupsi Gunung Merapi.

2. Tujuan penyelenggaraan Ketep Summit Festival:

- a. Promosi pariwisata: Menjadikan Ketep Pass dan Kabupaten Magelang sebagai destinasi wisata yang lebih dikenal dan diminati.
- b. Pemberdayaan ekonomi: Meningkatkan perputaran roda perekonomian melalui kegiatan bazar dan UMKM.
- c. Pelestarian budaya: Melestarikan dan memperkenalkan kesenian serta budaya lokal kepada masyarakat luas dan wisatawan, serta menjadi wadah pemersatu antar komunitas seni dan budaya.

Tabel 4.15 Ketep Summit Festival 2017-2025

No	Tahun	Tanggal	Tema	Kegiatan	Keterangan
1	2017	20-22 Oktober	Bamboo Lighting Festival	Instalasi bambu bercahaya, pertunjukan musik, kirab gunung, dan sarasehan budaya.	Pameran Tosan Aji, Peringatan 7 tahun erupsi Merapi
2	2018	19-21 Oktober		pertunjukan musik, kirab gunung, dan sarasehan budaya.	
3	2019	18 - 20 Oktober	Energi Merapi Merbabu.	Ritual Merapi, live konser musik lokal, pentas kesenian rakyat, sunrise musik, sendratari candradimuka, lomba foto, camping ground, stand kuliner dan UMKM,	Perform art pelukis Merapi dan live musik bersama Doni Sibarani mantan personil Ada Band
4	2020 - 2021	Absen		PPKM karena pandemi covid 19	
5	2022	2-4 Desember	Symphoni Rindu	Sendratari Candramuka dari Sanggar Kinara Kinari Borobudur	kesenian topeng ireng Sekar Rimba Indonesia.
6	2023	20-23 Juli	Symphoni Jiwa	sendratari, lomba kesenian rakyat, serta konser musik dengan bintang tamu Woro Widowati dan Aftershine	
7	2024	Absen			
8	2025	18-20 Juli 2025	Harmony Semesta	Kirab 21 gunung dari berbagai kecamatan, pertunjukan seni budaya, bazar UMKM, dan konser musik dengan bintang tamu The Rain.	Revitalisasi Ketep Summit Festival

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2025

Ketep Summit Festival dibiayai sepenuhnya oleh Disparpora Kabupaten Magelang melalui APBD. Hingga tahun ini, Ketep Summit Festival telah berlangsung selama lima kali dengan rangkaian tema yang berbeda untuk setiap tahunnya. Dengan Ketep Summit festival diharapkan jumlah kunjungan ke obyek wisata Ketep Pass juga meningkat. Namun sejauh ini belum ada kajian apakah penyelenggaraan Ketep Summit Festival memiliki pengaruh terhadap kunjungan obyek wisata Ketep Pass sekaligus meningkatkan penerimaan pendapatannya.

Hasil kajian Manajemen Bisnis Berkelanjutan BUMD untuk Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Balitbangda Kabupaten Magelang tahun 2023 menyatakan bahwa :

Daya tarik yang dimiliki oleh Ketep Pass berupa atraksi utama yaitu gardu pandang, dan sky walk. Selain itu, terdapat beberapa kali kegiatan event yang diselenggarakan oleh berbagai macam pihak bekerjasama dengan pengelola Ketep Pass. Festival terakhir yang diselenggarakan di Ketep Pass ialah Ketep Summit Festival 2025. Atas hal tersebut, nilai yang didapat dalam penilaian daya tarik adalah 3. Artinya banyak fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Wahana yang dapat dinikmati oleh para pengunjung Ketep Pass terbatas pada wahana bermain anak-anak seperti jungkat-jungkit dan

ayunan. Selain itu, pengelola Ketep Pass juga menyediakan saung untuk bersantai santai bagi para pengunjung. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian wahana adalah 2 . Artinya hanya ada fasilitas saung dan fasilitas bermain anak yang bisa digunakan oleh pengunjung. Akan tetapi untuk memperbaiki fasilitas tersebut dengan membersihkan dan mengecat ulang fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan fasilitas untuk pengunjung.

Jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengunjung Ketep Pass cukup beragam, seperti tersedia spot foto, bersantai santai, dan hiburan foto/video 360 derajat. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian jenis kegiatan adalah 3. Artinya ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengunjung. Hal tersebut untuk dipertahankan agar daya tarik pengunjung tetap terjaga.

Ketep Pass berada di jalan provinsi, jalan tersebut cukup lebar dan baik untuk dilalui berbagai macam jenis sarana transportasi mulai dari bus besar hingga kendaraan roda dua. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian sarana transportasi adalah 3. Artinya semua mode transportasi mampu mengakses menuju Ketep Pass. Ketep Pass memiliki dua area parkir, pertama kantong parkir yang tersedia di sisi utara dan area parkir yang terletak di sisi barat. Kedua area parkir tersebut dapat menampung berbagai macam jenis kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian daya tampung parkir adalah 3. Artinya ada beberapa titik parkir akan tetapi daya tampung lahan parkir masih kurang untuk pengunjung Ketep Pass. Hal tersebut untuk memperluas lahan parkir ataupun membatasi wisatawan per hari untuk berkunjung ke Ketep Pass.

Ketep Pass memiliki lahan parkir yang berada di dalam area Ketep Pass. Selain itu, apabila area parkir yang berada di Ketep Pass sudah penuh, pengunjung dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Parkir kendaraan yang berada di bahu jalan tersebut dikelola oleh para warga sekitar. Nilai yang didapatkan dalam bagian lahan parkir adalah 3. Artinya tersedianya lahan parkir bagi pengunjung namun ketersediaan lahan parkir

berbanding terbalik dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Ketep Pass. Hal tersebut banyaknya pengunjung diarahkan untuk parkir di area jalan sehingga mempersempit jalan dan mengakibatkan kemacetan. Hal tersebut untuk memperbaiki fasilitas lahan parkir dengan mengkategorikan jenis kendaraan sehingga mampu menampung semua kendaraan pengunjung dan memperluas lahan.

Status jalan menuju Ketep Pass yang merupakan jalan provinsi memiliki kualitas yang baik, yaitu jalan berbahan beton. Jenis bahan jalan tersebut dapat digunakan untuk akses transportasi pariwisata seperti bus besar. Selain itu, jalan tersebut juga memiliki lebar jalan yang cukup untuk dilalui oleh berbagai macam jenis kendaraan. Akan tetapi jalan tersebut masih minim rambu-rambu jalan seperti petunjuk jalan, tidak terdapat trotoar, garis kejut, atau rambu penyeberangan jalan dari dua sisi arah jalan. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian kondisi jalan lokal adalah 1. Artinya Ketep Pass memenuhi dua persyaratan dan belum memenuhi ketersediaan rambu-rambu jalan sehingga diperlukannya rambu jalan bagi pengunjung sehingga memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Ketep Pass cukup baik dalam pelayanan terdapat disabilitas, yaitu apabila pengunjung membutuhkan kursi roda, pihak pengelola akan meminjamkan kursi roda kepada pengunjung yang membutuhkan. Selain itu, pengelola juga akan mendampingi pengunjung disabilitas apabila terdapat pengunjung yang meminta untuk ditemani. Akan tetapi, pelayanan terhadap disabilitas masih kurang dalam aspek ketersediaan toilet khusus disabilitas, tidak tersedia jalur kursi roda atau jalur pemandu, dan rambu petunjuk khusus untuk penyandang disabilitas. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian pelayanan disabilitas adalah 2.

Ketep Pass berada di salah satu titik tinggi di area Gunung Merapi, dan merupakan area yang terbuka tidak terhalangi oleh sebuah perbukitan atau bangunan. Ponsel dapat menerima sinyal dengan baik di area Ketep Pass. Akan tetapi pengelola belum memiliki jaringan nirkabel yang dapat digunakan oleh para pengunjung. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam bagian

komunikasi adalah 1. Artinya adanya jaringan sinyal di Ketep Pass dan tidak adanya fasilitas Wifi bagi pengunjung. Ketep Pass tidak memiliki penginapan di dalam area, akan tetapi terdapat beberapa penginapan yang masih cukup dekat dengan area Ketep Pass yang berjarak kurang lebih 500 meter dari Ketep Pass. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian ketersediaan penginapan adalah 2. Artinya tidak adanya penginapan di area Ketep Pass dan pengunjung memerlukan 500 meter untuk menuju penginapan yang tersedia di sekitaran wilayah Ketep Pass.

Ketep Pass memiliki berbagai macam jenis tempat makan, mulai dari restoran, kafe dan warung. Restoran Ketep Pass memiliki berbagai macam menu yang dapat dinikmati oleh para pengunjung, restoran tersebut memiliki akses langsung untuk melihat pemandangan. Kafe yang tersedia di Ketep Pass juga menjual berbagai macam makanan, kafe tersebut terletak di sisi timur dekat dengan jalur sky walk.

Sementara keberadaan warung berada di sisi barat sky walk dan di sisi timur dari area Ketep Pass. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian ketersediaan tempat makan adalah 3. Artinya banyaknya jenis makanan yang tersedia untuk pengunjung dan sebagai daya tarik pengunjung untuk memilih makanan yang diinginkan. Akan tetapi adanya akses bagi warung warga di bagian bawah yang mudah diakses pengunjung diakibatkan pendapatan tempat makan di area kafe dan tempat makan area bawah sangat jauh. Sehingga diperlukannya perbaikan akses jalan pengunjung agar melewati tempat makan warga untuk meningkatkan nilai ekonomi.

Ketep Pass memiliki kios cinderamata yang terletak di sisi timur dari pintu masuk, persis di jalan akses masuk pengunjung. Kios tersebut menjual berbagai macam souvenir seperti kerajinan dan pakaian, serta makanan khas daerah Magelang. Kios tersebut dikelola oleh Dekranasda Kabupaten Magelang. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian ketersediaan cinderamata adalah 3. Artinya adanya cinderamata yang dapat di beli oleh

pengunjung sebagai kenag kenangan bahwa pengunjung sudah berkunjung di Ketep Pass.

Ketep Pass hanya memiliki nomor telepon yang dapat dihubungi. Sementara Ketep Pass tidak memiliki situs web dan media sosial. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian penyediaan informasi adalah 1. Artinya Ketep Pass hanya memiliki nomor telpon sebagai informasi bagi wisatawan. Hal tersebut diperlukannya situs web dan sosial media untuk memberikan informasi tentang Ketep Pass ke khalayak umum sebagai daya tarik wisatawan dan sebagai promosi DTW Ketep Pass. Ketersediaan toilet di Ketep Pass cukup memadai dan berada di beberapa titik, yaitu berada di area kantong parkir, toilet di restoran, dan toilet di sisi utara kafe. Keseluruhan toilet tersebut memiliki sirkulasi udara yang memadai, tidak ada bau dan kotoran, tersedia air bersih, menerapkan prinsip kebersihan, terdapat petugas yang membersihkan dan jadwal dalam membersihkan. Atas hal tersebut, nilai yang didapat penilaian toilet adalah 2. Artinya kebersihan toilet baik akan tetapi diperlukannya kotak saran pengunjung untuk meningkatkan fasilitas toilet agar kenyamanan pengunjung terjaga.

Pengelolaan Ketep Pass dinaungi oleh Badan Pengelola Objek Wisata (BPOW) yang dibentuk oleh Bupati Magelang pada tahun 2006. BPOW selaku pengelola Ketep Pass memiliki direktur sebagai puncak pimpinan dan 36 pegawai. Keseluruhan pegawai tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, selain itu para pegawai Ketep Pass juga sudah melakukan pelatihan terkait pengelolaan DTW yang diberikan secara rutin oleh Disparpora Kabupaten Magelang. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian pengelola DTW adalah 3. Artinya pengelola DTW sudah melakukan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Layanan kesehatan di Ketep Pass cukup baik, yaitu para pegawai Ketep Pass sudah memiliki keahlian dalam melakukan pertolongan pertama. Keahlian tersebut didapatkan dari pelatihan rutin yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Selain itu, Ketep Pass juga tersedia kotak P3K yang dapat digunakan apabila terdapat pengunjung

yang membutuhkan pertolongan pertama. Akan tetapi, Ketep Pass belum memiliki ruang khusus untuk melakukan perawatan awal terhadap pengunjung apabila mengalami insiden. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian layanan kesehatan adalah 2. Maka dari itu, diperlukan ruang khusus ketika pengunjung mengalami insiden.

Aspek keamanan dan keselamatan yang berada di Ketep Pass cukup baik, yaitu terdapat rambu petunjuk evakuasi, terdapat kamera pengawas di beberapa titik, memiliki personil keamanan, pegawai pernah menjalani pelatihan mitigasi bencana, miliki SOP dalam melakukan mitigasi, dan memiliki APAR. Akan tetapi Ketep Pass belum terpasang alat pendeteksi asap apabila insiden kebakaran terjadi. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian keamanan dan keselamatan adalah 2. Artinya adanya keamanan dan keselamatan yang tersedia di Ketep Pass. Alangkah lebih baik ketersediaan APAR dan terpasangnya alat pendeteksi asap sebagai kewaspadaan di Ketep Pass.

Aspek kebersihan pada Ketep Pass cukup baik, yaitu memiliki petugas kebersihan yang secara rutin membersihkan area Ketep Pass, memiliki alat kebersihan, dan terdapat tempat sampah diberbagai macam titik. Akan tetapi pengelola Ketep Pass masih belum memiliki SOP dalam melakukan kegiatan kebersihan. Atas hal tersebut, nilai yang didapatkan dalam penilaian kebersihan adalah 2. Artinya kebersihan area Ketep Pass cukup baik sehingga untuk tetap menjaga kebersihan untuk kenyamanan pengunjung.

Tabel 4.16 Asesmen DTW Milik Pemkab Magelang 2023

Kategori	Kriteria	TWA Kali Bening	Telaga Bleder	PAH Candi Umbul	TR Mendut	Ketep Pass
A. Atraksi	A.1 Daya Tarik	1	3	1	1	3
	A.2 Wahana	0	2	1	1	2
	A.3 Jenis Kegiatan	1	1	1	1	3
	Total	2	6	3	3	8
B. Aksesibilitas	B.1 Sarana Transportasi	3	1	1	3	3
	B.2 Daya Tampung Lahan Parkir	3	2	1	3	3
	B.3 Lahan Parkir	3	3	2	3	3
	B.4 Kondisi Jalan Lokal	1	1	1	2	1
	B.5 Pelayanan Disabilitas	0	0	0	0	2
	B.6 Komunikasi	3	3	3	1	1
	Total	13	10	8	12	13
C. Amenitas	C.1 Ketersediaan Penginapan	0	0	0	2	2
	C.2 Ketersediaan Tempat Makan	3	2	3	3	3
	C.3 Ketersediaan Cinderamata	0	0	0	0	3
	C.4 Penyediaan Informasi	1	0	0	0	1
	C.5 Toilet	2	2	2	2	2
	Total	6	4	5	7	11
D. Ancillary	D.1 Pengelola DTW	3	3	3	3	3
	D.2 Layanan Kesehatan	2	2	2	1	2
	D.3 Keamanan dan Keselamatan	1	1	1	1	2
	D.4 Kebersihan	2	2	2	2	2
	Total	8	8	8	7	9
	Total Keseluruhan	29	28	24	29	41

Sumber : Manajemen Bisnis Berkelanjutan BUMD untuk Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Balitbangda Kabupaten Magelang 2023

Tabel 4.17 Asesmen DTW Milik Pemkab Magelang 2023

Kategori	Nilai Penuh	TWA Kali Bening	Telaga Bleder	PAH Candi Umbul	TR Mendut	Ketep Pass
Atraksi (3 Kriteria)	9	2	6	3	3	8
Aksesibilitas (6 Kriteria)	18	13	10	8	12	13
Amenitas (5 Kriteria)	15	6	4	5	7	11
Ancillary (4 Kriteria)	12	8	8	8	7	9
Total	54	29	28	24	29	41
Persentase	100%	53,7%	51,9%	44,4%	53,7%	75,9%

Sumber : Manajemen Bisnis Berkelanjutan BUMD untuk Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Balitbangda Kabupaten Magelang 2023

Dari hasil kajian oleh Balitbangda tersebut diketahui bahwa diantara obyek wisata milik Pemkab Magelang, obyek wisata Ketep Pass memiliki keunggulan dari kategori Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Ancillary dengan nilai tertinggi apabila dibandingkan dengan obyek wisata lainnya seperti TWA Kalibening, Telaga Bleder, PAH Candi Umbul dan TR Mendut.

4.9.3 BAGI HASIL OBYEK WISATA KETEP PASS

Sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2006 dan Nomor02/PERJ/II/2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang tertanggal 22 Februari 2006 yang berbunyi : Hasil pengelolaan obyek wisata Ketep Pass dibagi untuk Pihak Pertama sebesar 50 %(lima puluh perseratus) dan untuk Pihak Kedua sebesar 50 % (lima puluh perseratus)setelah dikurangi biaya operasional pengelolaan dan pajak-pajak, maka pendapatan dan bagi hasil DTW Ketep Pass dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa DTW Ketep Pass memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup besar juga. Di tahun 2020 sebesar Rp 1,1 milyar kemudian menurun di tahun 2021 menjadi Rp 12,2 juta dan absen selama dua tahun di 2022 dan 2023 . Tahun 2024 memberikan bagi hasil sebesar Rp 935 juta dan tahun 2025 hingga 28 Oktober

lalu belum ada pengajuan ke BPPKAD berapa bagi hasil untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.18 Pendapatan dan Bagi Hasil Daya Tarik Wisata Ketep Pass Tahun 2016-2024

Tahun	Pendapatan	Bagi Hasil	Estimasi Biaya dan Pajak
2016	3.599.327.000	NA	NA
2017	4.652.809.000	NA	NA
2018	4.768.785.000	NA	NA
2019	4.394.892.000	NA	NA
2020	1.393.765.000	1.102.159.000	2.190.574.000
2021	1.003.074.000	12.269.762	1.369.225.476
2022	2.865.380.000	-	
2023	4.784.704.000	-	
2024	4.133.915.000	935.324.290	2.914.055.420
2025	2.530.345.000	NA	NA

Sumber : BPOW Ketep Pass dan BPPKAD diolah, 2025

4.9.4 Kekhasan Kecamatan Sawangan

Ketep Pass awalnya adalah titik pengamatan Gunung Merapi yang berada di ketinggian 1200 mdpl yang berlokasi di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang

Pada tanggal 17 Oktober 2002, Ketep Pass diresmikan sebagai kawasan wisata oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, sekaligus menjadi bagian dari jalur wisata Solo-Selo-Borobudur (SSB).

Ketep Pass kemudian berkembang menjadi DTW yang menawarkan berbagai fasilitas dan atraksi, termasuk Ketep Volcano Centre yang menampilkan informasi dan diorama mengenai Gunung Merapi.

Ketep Pass juga memiliki fasilitas seperti teropong pemantau, bioskop mini, dan pelataran pancaarga.

Ketep Pass telah tersertifikasi standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) oleh Kemenparekraf.

Menurut Peraturan Bupati Magelang No 49 tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Magelang 2015-2025 , kecamatan Sawangan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor

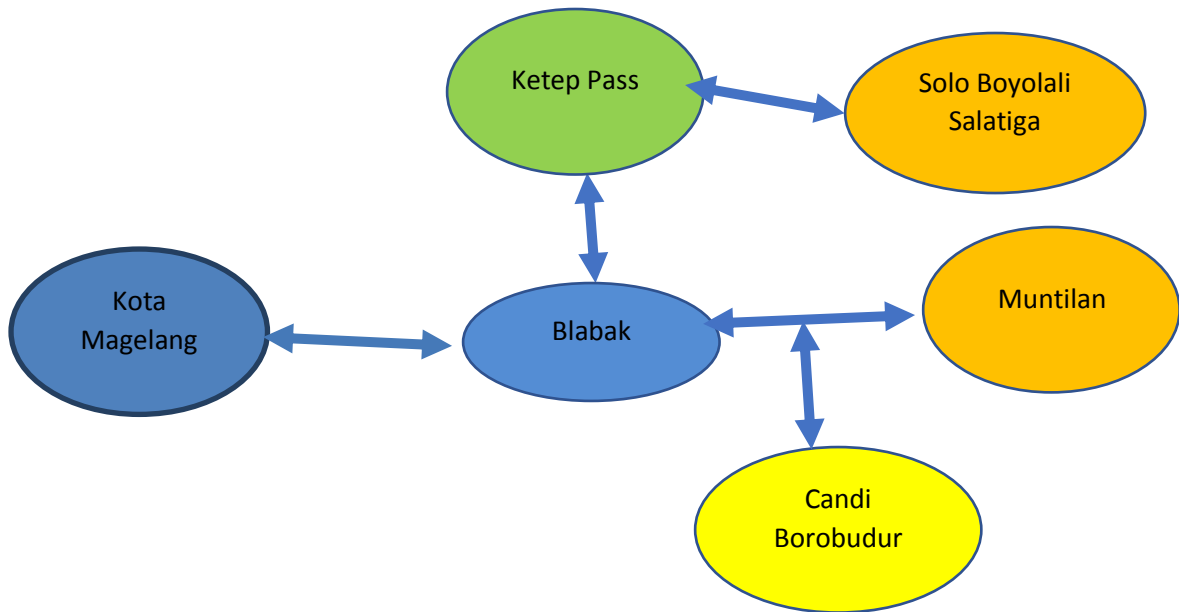
5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010- 2030 termasuk ke dalam :

1. Kawasan Hutan Rakyat 998 ha
2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 2.851 ha
3. Kawasan Pertanian Lahan Kering 2.654 ha
4. Kawasan Peruntukan Perikanan – Daerah Pembenihan 406 ha
5. Kawasan Peruntukan Peternakan : Ternak Besar dan Kecil
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan : Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Kawasan Peruntukan Wisata Buatan : Ketep Pass
8. Kawasan Peruntukan Pemukiman Perkotaan : Ibukota Kecamatan Sawangan

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Magelang No 4 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034, kecamatan Sawangan termasuk ke dalam :

1. Kawasan Strategis Pariwisata B – Pengembangan Saujana Alam Lembah Merapi Merbabu
2. Kawasan Strategis Pariwisata C – Pengembangan Wisata Vulkanologi dan Budaya Merapi

4.9.5 Aksesibilitas Obyek Wisata Ketep Pass



Obyek Wisata Ketep Pass dapat dijangkau dengan transportasi umum baik dari arah Kota Magelang, Blabak maupun Muntilan.

Dari luar kota pun sangat mudah untuk menuju ke Ketep Pass dengan kondisi jalan yang baik dan dapat dilalui kendaraan besar.

Interkoneksi dengan DTW Candi Borobudur juga tersedia sebagaimana dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.19 Rute Angkutan Perdesaan dan Jumlah Armada Tahun 2024

NO	JALUR TRAYEK	Jumlah Kendaraan	KET
1	MUNTILAN-KEJI-BOROBUDUR-KIRINGAN-METESAH-SALAMAN PP	10	
2	NGLUWAR-TRAYEM-GULON-MUNTILAN-BLABAK-BULU PP	12	
3	SAWANGAN-BOJONG-KEPREKAN-MUNTILAN-JAPUAN-CARUBAN PP	7	
4	MUNTILAN-BLABAK-SAWANGAN PP	2	
	MUNTILAN-BLABAK-SAWANGAN-TLATAR PP	21	
5	CANDIMULYO-SURODADI-DALEMAN-KE TAWANG-SUMURARUM-GRABAG PP	8	
6	SECANG-MEDONO-PINGIT PP	19	
7	TERM MUNTILAN-RSPD-P. PABELAN-BB. RUNCING-JL. T. PELAJAR-SEDAYU-PERUM WONOLELO-WN. SARI-WT. CONGOL-GN. PRING-JL. PEMUDA-TERM MUNTILAN	7	
8	PANCURANMAS-SINDAS-KORIPAN-KLOPO-PASAR SANGGRAHAN PP	3	
9	PANCURANMAS-SINDAS-PUCANG-KAYUPURING	1	
10	CANDIMENOREH-SALAMAN-KRASAK-MANGLONG-KALIABU-SAMBAK-KAJORAN-KALIANGKRIK PP	2	
11	SALAMAN-KRASAK-MANGLONG-TUNGGANGAN-PANDANRETN PP	10	
12	KALIANGKRIK-KAJORAN-KRASAK-SALAMAN-NUSUPAN-NGADIWONGSO-BETENG-KALIPUCUNG PP	16	
13	SALAMAN-KAJORAN-KALIANGKRIK-SEMILIR-BALEREJO-KALEGEN-GROGOL-TANJUNGSARI PP	30	
14	PANCAR-SALAMAN-KALANGAN-KALISARI-TANGGULREJO PP	10	
15	SOROBAYAN-CANDIMULYO-GROGOLAN-TRENTEN-KEPINGAN PP	4	
	SOROBAYAN-CANDIMULYO-PETUNG-KRAKAH-POGALAN PP	9	
16	SOROBAYAN-TEGALREJO-PAKIS PP	41	
17	CANDIMULYO-TEGALREJO-PIRIKAN-PUCANG-SECANG PP	9	
18	SECANG-PUCANG-PIRIKAN-SENDEN PP	15	
19	GRABAG-PAGERGUNUNG-PANDEAN-GIRIREJO-NGABLAH PP	25	
20	BANDONGAN-SALAMKANCI-TEMPURAN-SALAMAN-CONO PP	2	
21	BANDONGAN-WINDUSARI-SEMAN PP	13	
22	NGEPOS-SRUMBUNG-TEGALSARI-MUNTILAN PP	9	
23	MUNTILAN-GULON-PUCANGANOM-PANDANRETN-TEGALRANDU-BENDAN-NGEPOS-TEGALSARI-SALAM PP	15	
24	MUNTILAN-SEMAN-NGLUWAR PP	14	
25	MUNTILAN-BLABAK-RAMBEANAK-MENDUT-BOROBUDUR PP	10	
26	MUNTILAN-PALBAPANG-BOROBUDUR PP	1	
27	TALUN-TLATAR-KARANGREJO-KERON-JATI-BUTUH-SAWANGAN (MARGOWANGSAN) PP	1	
28	MUNTILAN-KETUNGGENG-WATES-KALIBENING-ARGOMULYO PP	1	
29	MUNTILAN-NGLUWAR-BULU PP	4	
30	TALUN-TLATAR-KETEP-WONOLELO-JRAKAH PP	6	
31	TALUN-TLATAR-KETEP-BANYUROTO-GERDU-KAPONAN PP	6	
32	TLATAR-TALUN-GARONAN-MUNTILAN-BB. RUNCING-PS. HEWAN-SELOSARI-RANDUKUNING-KLATAK-GARONAN-TALUN-TLATAR	31	
33	MUNTILAN-BOROBUDUR-SALAMAN PP	1	
34	C A D A N G A N	1	
	Jumlah	376	

Sumber : Dishub Kabupaten Magelang 2025

Dari tabel rute angkutan perdesaan diatas, Daya Tarik Wisata Ketep Pass dapat dikunjungi dengan menggunakan rute Sawangan-Bojong-Keprekan-Muntilan-Japuan-Caruban PP, rute Muntilan-Blabak-Sawangan-Tlatar PP, rute Muntilan-Blabak-Rambeanak-Mendut-Borobudur PP, dan rute Talun-Tlatar-Ketep-Banyuroto-Gerdu-Kaponan PP.

4.9.6 PERTIMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN KETEP PASS

Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan untuk membentuk rekomendasi pengembangan Ketep Pass ini, diantaranya adalah:

1. Menyiapkan zonasi geografis sekaligus pembuatan paket wisata

Kabupaten Magelang terletak dalam jalur wisata strategis Jawa Tengah ke Yogyakarta. Posisi ini didukung oleh meratanya destinasi wisata di kabupaten ini, baik wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, maupun wisata budaya.

Sesuai dengan RIPPARDA, pembagian zonasi di kabupaten Magelang dapat disesuaikan dengan Kawasan Strategis Wisata A, B, C, dan D yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

2. Memperluas Ketep menjadi sebuah kawasan wisata terintegrasi.

Perluasan ini mempertimbangkan aktivitas wisatawan di Ketep relatif menyeluruh dan focus pada Ketep Pass. Bahkan kondisi peak season, akses menuju arah Ketep Pass padat berbagi dengan atraksi wisata lain di kanan dan kiri jalan.

3. Mempertimbangkan tren wisata berbasis alam / aktivitas di alam.

Sejak 10 tahun terakhir preferensi wisatawan didominasi berlibur di alam terbuka. Mereka gemar beraktivitas di kawasan sejuk dan dingin, baik dalam bentuk wisata alam maupun wisata buatan, termasuk di Ketep Pass.

4. Mempertimbangkan perkembangan wisata berbasis petualangan.

Dalam pariwisata dikenal beberapa aktivitas yang dicari wisatawan dengan istilah “something to see, something to do, dan something to buy. Oleh karena itu disarankan Ketep Pass untuk mengembangkan something to do sebagai bentuk pelayanan kepada wisatawan.

5. Mempertimbangkan trend *quality tourism*.

Keunikan Ketep Pass juga cocok untuk dibangun wisata berkualitas, sehingga mampu meningkatkan pengalaman wisatawan, belanja wisatawan, dan juga lama tinggal wisatawan.

6. Mengembangkan wisata minat khusus (*special interest tourism*)

Konsep wisata minat khusus dapat diterapkan sebagai bentuk atraksi di sekitar Ketep Pass dan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah memberi alternatif atraksi wisata khususnya peminat wisata khusus.

7. Menyesuaikan dengan khalayak wisatawan usia muda

Usia muda antara 16-30 tahun menjadi mayoritas wisatawan yang melakukan traveling di Indonesia (dan juga di dunia). Oleh karena itu karakter atraksi dan cara berpromosi juga disesuaikan dengan perilaku generasi muda yang cenderung digital dan ingin mencoba hal baru

8. Mempertimbangkan keberadaan Borobudur

Candi Borobudur menjadi magnet Indonesia untuk mendatangkan wisatawan. Kondisi ini perlu disikapi oleh pengelola Ketep Pass untuk menarik wisatawan dari Borobudur, baik wisman maupun wisnusnya.

9. Mempertimbangkan potensi penyelenggaraan event di Kabupaten Magelang

Penyelenggaraan event dapat digunakan sepakai pemantik promosi sekaligus katalis peningkatan kunjungan wisatawan. Potensi event MICE dan event budaya perlu mendapat perhatian lebih detail

10. Mempertimbangkan tren menurunnya daya beli pada kelas middle low

Kondisi ekonomi yang tidak mendukung pasca pandemi berdampak pada turunnya daya beli di kelas menengah bawah, sementara itu pasar menengah atas cenderung tidak berdampak

11. Meningkatnya kebutuhan SDM yang sesuai kebutuhan

Perkembangan berbagai tren yang ada baik internasional, regional, nasional, dan lokal berdampak pada kebutuhan SDM berkualitas. Kebutuhan ini diharapkan dapat dipenuhi dari tenaga kerja lokal yang diberi pelatihan-pelatihan khusus

12. Mempertimbangkan tren wisata viral dan penggunaan sosial media

Dominasi Gen Z sebagai wisatawan membawa perubahan pola komunikasi pariwisata. Gen Z cenderung reaktif terhadap informasi yang beredar di sosial media. Kondisi ini mengubah pola promosi di setiap DTW yang ada di Kabupaten Magelang

13. Meningkatnya peran dan kemajuan teknologi AI (Artificial Intelligence) dalam pelayanan kepada wisatawan

AI menjadi bagian yang menjadi tren dalam dunia pariwisata. Keberadaan AI mampu sebagai bagian dari pelayanan wisatawan dan juga menjadi bagian dari atraksi wisata

14. Mempertimbangkan dekatnya Kabupaten Magelang dengan Kota Yogyakarta, serta pintu masuk dan keluar terdekat dengan DIY. Sebagai pintu masuk lewat udara, keberadaan akses YIA dan juga akses KA via Yogyakarta ke Kabupaten Magelang perlu mendapat perhatian khusus

15. Pembatasan kunjungan ke Candi Borobudur

PT TWC memberikan beberapa regulasi kunjungan ke Candi Borobudur, diantaranya adalah pembatasan kunjungan ke Candi Borobudur, dan mengalihkan ke Candi Prambanan.

16. Koneksitas jalan tol di Pulau Jawa

Perkembangan peta jalan di Jawa, dan rencana tol Joglosemar mempengaruhi pergerakan wisatawan ke Kabupaten Magelang. Fenomena ini bisa menjadi peluang dan juga sekaligus ancaman bagi eksistensi Ketep Pass.

4.9.7 KELEMBAGAAN PARIWISATA KETEP PASS

Pengelolaan Ketep Pass dinaungi oleh Badan Pengelola Objek Wisata (BPOW) yang dibentuk oleh Bupati Magelang pada tahun 2006 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2006 dan Nomor 02/PERJ/II/2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang tertanggal 22 Februari 2006.

BPOW selaku pengelola Ketep Pass memiliki direktur sebagai puncak pimpinan dan 36/38 pegawai. Keseluruhan pegawai tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, selain itu para pegawai Ketep Pass juga sudah melakukan pelatihan terkait pengelolaan DTW pun untuk para pengelola jasa wisata yang mendukung kunjungan obyek wisata Ketep Pass yang diberikan secara rutin oleh Disparpora Kabupaten Magelang.

Sesuai dengan PKS No 1/2006 Pasal 10 : Dalam waktu yang tidak terlalu lama Pihak Kedua segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola obyek wisata Ketep Pass.

Dalam kenyataannya dari 2006 hingga kini 2025 atau sekitar 19 tahun, BUMD Wisata yang mengelola Ketep Pass belum juga terwujud, sementara dalam pasal 10 secara tegas dinyatakan “dalam waktu yang tidak terlalu lama.” Proses pembicaraan antara kedua pemerintah daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang) telah dilakukan selama beberapa kali namun terjadi dead lock atau menemui jalan buntu dan tidak mencapai kesepakatan.

Dari sisi pemerintah Kabupaten Magelang, setidaknya tercatat ada 3 inisiatif dari OPD Kabupaten Magelang terkait dengan revisi PKS tahun 2006 dan proses transisi dari BPOW Ketep Pass menuju BUMD Pariwisata :

1. Balitbangda Kabupaten Magelang

A. Revisi MOU Pemprov – Pemkab ttg Ketep Pass dengan Nota Dinas Balitbangda meliputi :

- 1) Masa transisi perlu dibatasi waktu utamanya transisi dari BPOW menjadi BUMD
- 2) Hak dan kewajiban para pihak dalam MOU : alokasi dana pengembangan Ketep Pass oleh Pemprov Jateng- sementara ini hanya oleh Pemkab cq disparpora
- 3) Profit sharing terus berlanjut
- 4) Bantuan Gubernur 2 POA tidak tercatat sebagai asset pada inventaris Provinsi dalam mekanisme anggaran di tahun 2006
- 5) Yang tercatat sebagai asset Provinsi oleh Pemkab adalah warung-warung penjual makanan terbuat dari bambu yang sekarang kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan

B. Melakukan kajian Manajemen Bisnis Berkelanjutan BUMD untuk Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang di tahun 2023.

C. Posisi Balitbangda tentang kelembagaan pariwisata Ketep Pass sebagai berikut :

Untuk Ketep Pass paling ideal menggunakan entitas BUMD karena :

1) Fleksibilitas anggaran

- DPA – DPPA amat rigid
- Biaya pemeliharaan sarpras perlu segera ditindaklanjuti
- Inovasi perlu biaya segera

2) *Profit oriented*

- Butuh profesionalitas personil
- Tidak harus membentuk BUMD baru (rumit, masuk RPJMD, analisa biaya, Penyertaan modal Pemkab dll)
- Bisa dijadikan sebagai unit usaha baru dalam BUMD PT Aneka Usaha

3) BUMD Ketep Pass dapat mengelola obyek wisata lain

- Mengelola juga Kalibening dan Telaga Bleder
- Tiket terintegrasi dengan beberapa obyek wisata (tiket terusan)

2. Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang

Respon Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang terhadap obyek wisata Ketep Pass yaitu :

- Potensi Ketep Pass masih tinggi
- Perlu dibuat Ketep Pass II sebagaimana Jatim Park 1 , Jatim Park 2
- Ketep Pass sudah jenuh, perlu rebranding
- Jalur Solo Selo Borobudur telah lama mati
- BPOW Ketep Pass adalah “kepentingan “ Provinsi
- Beberapa kali dead lock pada tingkat Kabupaten
- Addendum atau revisi MOU Pemprov dan Pemkab
- Kuncinya adalah Komunikasi dengan Pemprov : Politik dan Birokrasi
- Pada level Pemkab dieskalasi ke Sekda atau Asisten untuk mengatasi ego sektoral

- Surat Sekda Kabupaten Magelang kepada Gubernur Jawa Tengah cq Sekda Jawa Tengah di Semarang, tertanggal 13 Desember 2024, Nomor 500/3609/01.04/2024 perihal Peninjauan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Permendagri No 22/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pasal 40(1) butir d yang menyebutkan bahwa Isi Kesepakatan Bersama paling sedikit menyebutkan : 1). Maksud dan Tujuan; 2). Obyek Kesepakatan Bersama; 3). Ruang Lingkup; 4). Pelaksanaan; 5). Jangka Waktu; 6). Surat Menyurat ; 7). Lain-Lain
2. Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor LHP : 68/LHP/XVIII.SMG/05.2023 :
 - a. Bupati Magelang agar menetapkan Obyek Wisata Ketep Pass sebagai Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah disepakati bersama.
 - b. BPK merekomendasikan kepada Bupati Magelang agar memerintahkan Kepala Disparpora untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemutakhiran perjanjian kerjasama pengelolaan Ketep Pass.

3. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten

Magelang

- Tahun 2015 melakukan **Feasibility Study** (FS) untuk Obyek Wisata Ketep Pass namun sayang belum sempat dipresentasikan ke hadapan Bapak Bupati Magelang dan Gubernur Jawa Tengah dan OPD terkait pada saat itu;
- Tahun 2018 Pjs Bupati Magelang Bp Tavip Supriyanto berkirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah perihal Bagi Hasil Pendapatan DTW Ketep Pass menjadi 70 % bagi Pemkab Magelang dan 30 % bagi Pemprov Jawa Tengah;
- Tahun 2025 kembali dikirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 29 Oktober 2025 tentang Permohonan Hibah Aset Ketep Pass.

4. Badan Pengelola Obyek Wisata (BPOW) Ketep Pass

Badan Pengelola Obyek Wisata (BPOW) Ketep Pass dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Magelang. Direktur BPOW Ketep Pass saat ini, Bp Miftahudin, diangkat sebagai Direktur BPOW Ketep Pass dengan SK Bupati Magelang 2 Mei 2025 dan melakukan serahterima jabatan di 8 Mei 2025. Direksi BPOW Ketep Pass dibantu oleh Bagian Operasional yakni Bp Kusratno, Bagian Promosi dan Pemasaran yaitu Bp Edward Alfian serta Bagian Administrasi Keuangan yakni Bp Tony Dwi Nugraha.

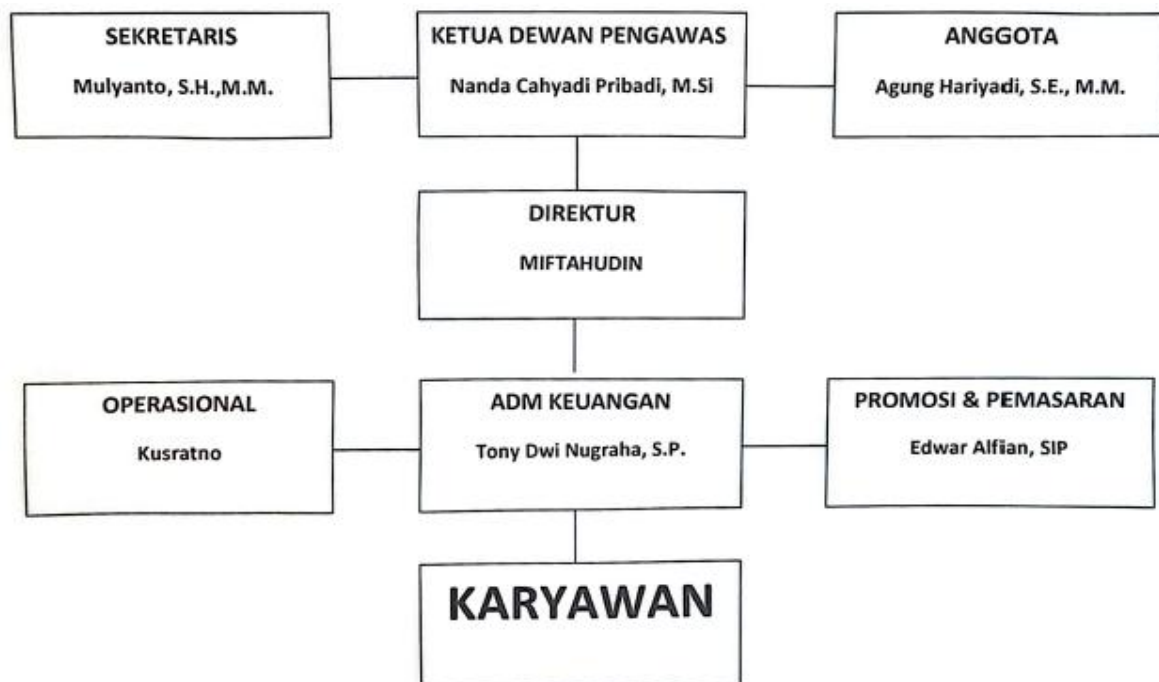
Fungsi Pengawasan terhadap BPOW Ketep Pass dilaksanakan oleh Dewan Pengawas BPOW Ketep Pass yang diketuai oleh Bp Nanda Cahyadi Pribadi, Sekretaris oleh Bp Mulyanto dan Anggota yakni Bp Agung Hariyadi.

4.9.8 Dasar Hukum

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2006 dan Nomor02/PERJ/II/2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang tertanggal 22 Februari 2006
2. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Objek Wisata Ketep Pass Kabupaten Magelang
3. Surat Keputusan Bupati Magelang tentang Pengangkatan dalam Jabatan BPOW Ketep Pass Kabupaten Magelang tahun 2025

4.9.9 Struktur Organisasi

Gambar 4.11 Bagan Organisasi BPOW Ketep Pass



Sumber : BPOW Ketep Pass, 2025

4.9.10 Sumber Daya Manusia BPOW Ketep Pass

Tabel 4.20 Sumberdaya Manusia BPOW Ketep Pass Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Karyawan	Laki-Laki	Perempuan	Prosentase
1	SMP	10	10	0	24,39
2	SMA	26	25	1	63,41
3	Diploma 3	1	0	1	2,44
4	Sarjana	4	2	2	9,76
	Jumlah	41	37	4	100

Sumber : BPOW Ketep Pass, 2025

Sumberdaya manusia yang menjalankan BPOW Ketep Pass sebanyak 41 karyawan yang terdiri dari 4 perempuan dan 37 laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikannya, BPOW Ketep Pass didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 26 orang (63,41 %), lulusan SMP sebanyak 10 orang (24,39 %), Diploma 3 sebanyak satu orang (2,44 %) dan Sarjana Strata 1 sebanyak 4 orang (9,76%).

Tabel 4.21 Karyawan BPOW Ketep Pass Berdasarkan Kelompok Umur 2025

No	Kelompok Umur	Jumlah Karyawan	Laki-Laki	Perempuan
1	20-30	2	2	0
2	31-40	14	11	3
3	41-50	17	16	1
4	51-58	8	8	0
	Jumlah	41	37	4

Sumber : BPOW Ketep Pass

Berdasarkan kelompok umur, karyawan BPOW Ketep Pass paling banyak berada di kisaran usia 41 tahun – 50 tahun sebanyak 17 karyawan, kemudian rentang usia 31 tahun – 40 tahun sebanyak 14 karyawan, rentang usia 51-58 sebanyak 8 orang dan usia 20 tahun – 30 tahun sebanyak 2 orang.

Tabel 4.22 Karyawan BPOW Ketep Pass Berdasarkan Masa Kerja 2025

No	Masa Kerja	Jumlah Karyawan	Laki-Laki	Perempuan	Tingkat Pendidikan
1	1 tahun	5	5	0	SMA, S1
2	3 tahun	2	2	0	SMP
3	9 tahun	4	2	2	SMA, D3, S1
4	10 tahun	1	1	0	SMA
5	12 tahun	2	1	1	S1
6	16 tahun	3	3	0	SMP, SMA
7	17 tahun	1	0	1	SMA
8	18 tahun	3	3	0	SMP, SMA
9	19 tahun	20	20	0	SMP, SMA
	Jumlah	41	37	4	

Sumber : BPOW Ketep Pass, 2025

Berdasarkan masa kerja karyawan, masa kerja terpanjang selama 19 tahun sebanyak 20 orang kemudian masa kerja 18 tahun sebanyak 3 orang, masa kerja 17 tahun sebanyak 1 orang, masa kerja 16 tahun sebanyak 3 orang, masa kerja 12 tahun sebanyak 2 orang, masa kerja 10 tahun sebanyak 1 orang, masa kerja 9 tahun sebanyak 4 orang, masa kerja 3 tahun sebanyak 2 orang dan masa kerja 1 tahun sebanyak 5 orang.

Tabel 4.23 Karyawan BPOW Ketep Pass Berdasarkan Fungsi 2025

No	Fungsi	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Tingkat Pendidikan
1	Direktur	1	1	0	SMA
2	Ka Bag Administrasi	1	1	0	S1
3	Ka Bid Operasional	1	1	0	SMA
4	Ka Bid Pemasaran	1	1	0	S1
5	Administrasi Pendapatan	1	0	1	SMA
6	Administrasi Keuangan	1	0	1	S1
7	Administrasi Tiketing	2	2	0	SMA
8	Petugas Lapangan	26	24	2	SMP, SMA, D3, S1
9	Petugas Kebersihan	5	5	0	SMP, SMA
10	Petugas Jaga Malam	2	2	0	SMP, SMA
	Jumlah	41	37	4	

Sumber : BOPW Ketep Pass, 2025

Berdasarkan fungsi atau posisi maka BPOW Ketep Pass memiliki Direktur, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bidang Operasional, Kepala Bidang Pemasaran masing-masing 1 orang. Tenaga administrasi Pendapatan, Keuangan dan Tiketing masing-masing 1 orang , petugas lapangan sebanyak 26 orang, petugas kebersihan 5 orang dan petugas jaga malam sebanyak 2 orang.

Tabel 4.24 Gaji Terendah dan Tertinggi BPOW Ketep Pass 2025

Rentang	Gaji	Laki-Laki	Perempuan
Gaji Terendah	2.522.000	36	4
Gaji Tertinggi	5.904.000	1	0
Jumlah		37	4

Sumber : BPOW Ketep Pass, 2025

Rentang gaji terendah adalah Rp 2.522.000,- dan gaji tertinggi sebesar Rp 5.904.000,- sementara UMK Kabupaten Magelang tahun 2025 sebesar Rp 2.467.488,-. Artinya karyawan BPOW Ketep Pass bergaji diatas UMK Kabupaten Magelang tahun 2025. Proyeksi UMK Kabupaten Magelang tahun 2026 sebesar Rp 2.726.574 ,- atau mengalami kenaikan sebesar 10,5 %.

Dengan kondisi sumberdaya manusia seperti diatas , BPOW Ketep Pass masih mampu memberikan penerimaan bahkan keuntungan bagi Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang cq PAD.

Ancaman di masa mendatang adalah persoalan status kepegawaian BPOW Ketep Pass. Saat ini sebagian besar karyawan BPOW Ketep Pass sedang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Magelang. Jika mereka semua akhirnya diterima sebagai PPPK maka BPOW Ketep Pass perlu merekrut karyawan baru serta melatihnya. Sementara itu kebutuhan untuk melakukan inovasi dan pengembangan semakin mendesak

dengan kendala anggaran yang masih melekat pada Disparpora Kabupaten Magelang yang membuatnya tidak leluasa.

4.9.11 Struktur Biaya BOW Ketep Pass

Tabel 4.25 Pendapatan dan Biaya BPOW Ketep Pass Tahun 2024

No	Jenis Biaya		Jumlah	Keterangan	Prosentase
A	Pendapatan		4.210.246.000	Tiket , parkir dll	
1	Gaji Manajemen		250.800.000	Gaji Direktur, Kabag dan Operasional	17,02
2	Gaji Petugas Teknis		63.600.000	2 orang	4,32
3	Gaji Petugas Lapangan		823.200.000	28 orang	55,86
4	Tenaga Harian Lepas		115.344.000	4 orang	7,83
5	BPJS Kesehatan		48.240.000	40 orang	3,27
6	JKK		2.894.400		0,20
7	JKM		3.618.000		0,25
8	Upah Lembur Gol III		17.920.000	4 orang	1,22
9	Upah Lembur Gol II		145.152.000	36 orang	9,85
10	Lembur Uang Makan		2.856.000	40 orang	0,19
	Biaya Tenaga Kerja		1.473.624.400	79,24	100,00
1	BBM		9.545.600	Genset dan Mesin Potong rumput	4,42
2	Telpon		2.400.000		1,11
3	Listrik		85.006.800		39,37
4	Air		100.971.000		46,76
5	Internet		11.844.000		5,48
6	Retribusi Sampah		500.000		0,23
7	Retribusi Sedot WC		2.000.000		0,93
8	Pemeliharaan Mesin Pot R		1.220.000		0,56
9	PBB		200.000		0,09
19	PKB Mobil dan Motor		2.250.000		1,04
	Biaya Utilities		215.937.400	11,61	100,00
1	Supplies Kantor		21.835.887	ATK dll	12,83
2	Sewa Tenda		12.000.000		7,05
3	Pemeliharaan Mobil&Motor		26.552.240	1 unit Mobil dan 1 unit Motor	15,60
4	Pemeliharaan Genset		2.000.000		1,17
5	Pemeliharaan CCTV		9.000.000		5,29
6	Pemeliharaan Sound		200.000		0,12
7	Pemeliharaan AC dan Wifi		610.000		0,36
8	Pemeliharaan Laptop & Printer		2.190.000		1,29
9	Cetak Tiket		73.839.934		43,38
10	Sewa Tanah		22.000.000		12,92
	Biaya Supplies & Pemeliharaan		170.228.061	9,15	100,00
B	Jumlah Biaya		1.859.789.861		
A-B	Laba Sebelum Pajak		2.350.456.139		
C	Bagi Hasil Sebelum Pajak		1.175.228.070		

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang Diolah, 2025

Dari tabel pendapatan dan biaya BPOW Ketep Pass di tahun 2024 di bawah ini dapat diketahui :

1. Struktur biaya BPOW Ketep Pass didominasi oleh biaya tenaga kerja sebesar Rp 1.473.624.400,- atau 79,24 % dari total biaya tahun itu.
2. Dari biaya tenaga kerja, porsi terbesar untuk tenaga lapangan sebanyak 28 orang dengan biaya sebesar Rp 823.200.000,- atau 55,86 % dari total biaya tenaga kerja.
3. Gaji Direktur dan Kabag setahun mencapai Rp 250.800.000,- atau 17,02 % dari total biaya tenaga kerja.
4. Biaya Utilities terbesar untuk Air dan Listrik. Air mencapai Rp 100.971.000,- setahun dan Listrik sebesar Rp 85.006.800,- atau mencapai 46,76 % dan 39,37 % masing-masing terhadap biaya utilities tahun tersebut.
5. Biaya Supplies dan pemeliharaan terbesar untuk pencetakan tiket Rp 73.839.934,- atau 43,38 %, berikutnya adalah biaya pemeliharaan motor dan mobil sebesar Rp 26.552.240,- atau 15,60 % dari total biaya supplies dan pemeliharaan, kemudian biaya sewa tanah Rp 22.000.000,- atau 12,92 % dan supplies kantor Rp 21.835.887,- atau 12,83 % dari total biaya supplies dan pemeliharaan.
6. Dari komponen biaya yang dikeluarkan pada tahun 2024 , tidak ditemukan biaya yang cukup signifikan untuk perbaikan sarana dan prasarana obyek wisata Ketep Pass.
7. Analisa biaya diatas dapat dimanfaatkan oleh manajemen BPOW Ketep Pass setidaknya untuk :
 - a. Mengajukan biaya tambahan demi renovasi bahkan inovasi sarana dan prasarana obyek wisata Ketep Pass kepada Disparpora Kabupaten Magelang
 - b. Efisiensi internal BPOW Ketep Pass
 - c. Menyusun KPI dan HR Management Plan BPOW Ketep Pass

4.9.12 Transisi Menuju BUMD

Transisi menuju BUMD dari BPOW Ketep Pass boleh dikatakan berhenti (dead lock) atau mengalami jalan buntu dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi Pemerintah Kabupaten Magelang telah dilaksanakan 2 inisiatif yakni dari Balitbangda berupa nota dinas dan kajian BUMD wisata serta dari Bagian Perekonomian Sekda Magelang telah bersurat kepada Gubernur Jawa Tengah cq Sekda Jateng. Surat terbaru dari Bupati Magelang kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 29 Oktober 2025 perihal permohonan hibah asset Ketep Pass.

Transisi dari BPOW Ketep Pass sebaiknya penuh menjadi inisiatif dan otonomi pihak Kabupaten Magelang dengan penyelesaian aset pemerintah Provinsi Jawa Tengah apakah dihibahkan atau dihapusbukukan terlebih karena secara administratif tidak lagi tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.9.13 Problem Struktural

1. Pasal 3 Ayat (3) Perbup Nomor 12 Tahun 2006 mengatakan bahwa Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) –yaitu BPOW- bukan merupakan Badan sebagai Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal ini menjadikan posisi (legal standing) BPOW menjadi “tidak jelas” karena bukan UPT, badan, OPD, dan sejenisnya. Bahkan bukan merupakan BLUD, PLUT, BUMD atau lainnya.

Maka, urgensi BUMD Ketep Pass perlu segera dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan legal standing.

2. Setelah 18 tahun, BUMD belum terbentuk sehingga “Legalitas Usaha Bersama” ini dalam status menggantung atau status quo yang terlalu lama.
3. Pelaporan tahunan tidak merata atau tidak sampai pada Subbag. BUMD Pariwisata dan Perhubungan Bag. Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

4.9.14 Problem Kultural

1. Hubungan Bapak-Anak atau Patrion-Klien secara psikologis dan birokratis yang dialami oleh Aparatus Sipil Negara utamanya dari sisi Pemkab Magelang
2. Support Pemprov dalam hal bantuan keuangan sektor pariwisata dan lainnya (jalan provinsi dll)
3. Bantuan gubernur untuk desa wisata
4. Revisi MOU Pemprov dan Pemkab Magelang – jalur politik dan jalur birokrasi

4.9.15 Problem Legal – Finansial

1. Dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - Aset gedung dan bangunan (2002) tidak tercatat di buku inventaris Prov. Jawa Tengah.
 - BPKAD hanya mencatat 36 kios bambu yang sudah aus. Itu pun belum memasukkan unsur penyusutan atau depresiasi aset
 - Bagi hasil 50% atas kontribusi gedung dan bangunan.
 - Dengan pencatatan yang tidak ada tersebut, Pemprov Jawa Tengah tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengakui aset gedung dan bangunan di Ketep Pass. Terlebih lagi, aset gedung dan bangunan serta infrastruktur fisik lainnya telah mengalami peremajaan dan pembangunan ulang oleh Pemkab Magelang.

2. Dari sisi Pemerintah Kabupaten Magelang

- Tanah Ketep Pass merupakan asset Desa Ketep Kecamatan Sawangan
- Tanah Ketep Pass sudah dipastikan hak pengelolaan (SHP) pada Pemkab Magelang. maka, Pemkab Magelang memiliki kekuatan hukum tetap dalam pengelolaan aktivitas diatas tanah Ketep Pass yang dikelola Pemkab Magelang.
- Pencatatan bangunan, gedung, dan aset tambahan selama 18 tahun terakhir sudah dilakukan dengan baik dan rapi oleh DPPKAD Pemkab Magelang setidaknya pengadaan belanja modal Ketep Pass sejak tahun 2012 atau 2014.
- Bagi hasil 50% atas kontribusi tanah dan pengelolaan menjadi kurang menguntungkan bagi Pemkab Magelang. Maka, Pemkab Magelang perlu menginisiasi apraisal atau penilaian aset dan properti terhadap Ketep Pass untuk melakukan renegosiasi bagi hasil dengan Pemprov Jawa Tengah

4.9.16 Konflik Kepentingan antar Pemerintah Daerah

1. Adanya kepentingan bagi hasil 50% oleh BPKAD Pemprov Jawa Tengah
2. Keinginan Feasibility Study dan review PKS (atau adendum) merubah pasal-pasal yang perlu disesuaikan. Hal ini akan dilaksanakan setelah inventaris aset oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dilakukan. BPKAD Provinsi Jawa Tengah masih berkepentingan mempertahankan kepemilikan Ketep Pass dengan bagi hasil yang tetap 50% masing-masing, meskipun selama 17 tahun tidak ada kontribusi lagi setelah pendirian.
3. Belum adanya instruksi Gubernur Jawa Tengah atau Sekda tentang penanggungjawab pendirian BUMD Ketep Pass sehingga Subbag BUMD Pariwisata dan Perhubungan tidak dapat melakukan

tindakan-tindakan pendirian BUMD Ketep Pass dengan cepat karena tidak diberikan wewenang.

4. Surat Sekda Kabupaten Magelang kepada Gubernur Jawa Tengah cq Sekda Jawa Tengah di Semarang, tertanggal 13 Desember 2024 , Nomor 500/3609/01.04/2024 perihal Peninjauan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang hingga saat ini belum direspon oleh Pemda Jawa Tengah.
5. Surat terbaru dari Bupati Magelang kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 29 Oktober 2025 perihal permohonan hibah asset Ketep Pass

4.9.17 Solusi Integral

1. Mengevaluasi kemajuan pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten Magelang selama dan sejauh terkait dengan pengembangan obyek wisata Ketep Pass termasuk BPOW Ketep Pass
2. Memadukan sekaligus jalur politik dan birokratis dalam hal kaji ulang PKS dengan Pemda Jateng tahun 2006
3. Membentuk Satuan Tugas Lintas OPD untuk mengawal percepatan kaji ulang PKS Ketep Pass tahun 2006 dan hibah asset Pemprov Jawa Tengah kepada Pemkab Magelang
4. Menyiapkan Road Map BUMD Wisata Kabupaten Magelang untuk pengelolaan DTW termasuk didalamnya Obyek Wisata Ketep Pass

BAB V

KESIMPULAN

5.1 PAD KABUPATEN MAGELANG DARI SEKTOR PARIWISATA

1. Kontribusi PAD dalam APBD Kabupaten Magelang

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang berkisar 14 % - 18 % pada periode 2016-2024. Selama Sembilan tahun mengalami kecenderungan kenaikan meskipun sempat turun ke 13,85 % pada tahun 2020 (masa pandemi covid 19). Dana perimbangan atau Transfer ke Daerah (TKD) berkontribusi dari 66 % - 80 % terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang selama periode 2016-2024. Profil ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat ini merupakan gambaran umum semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia selama puluhan tahun. Oleh karena itu saat pemerintahan Prabowo-Gibran mengumumkan pemotongan atau pengurangan TKD , hal itu tentu amat mengurangi kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan termasuk Kabupaten Magelang di dalamnya.

2. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten Magelang

Dominasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD amat kuat dan tak bisa dipungkiri lagi.. Pajak daerah menyumbang 40 % PAD selama dua tahun terakhir dan retribusi daerah mengalami lonjakan luar biasa di tahun 2024 dengan menyumbang 50 % PAD Kabupaten Magelang. Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah Kabupaten Magelang dengan kinerja Pajak dan Retribusi Daerah yang baik selama beberapa tahun terakhir ini.

3. Peluang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peluang dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah bisa menjadi pisau bermata dua :

- a. Di satu sisi ia membuka ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk secara kreatif menemukan dan memungut jenis pajak baru beserta komponennya demi meningkatkan PAD. Namun tanpa pengawasan dan pengendalian yang memadai, hal ini dapat memicu terjadinya moral hazard di lapangan terlebih di tengah lemahnya aspek penegakan hukum.
- b. Pada sisi lain, PBJT sekaligus menambah beban bagi masyarakat yakni konsumen dimana biasanya pajak yang dipungut akan diteruskan kepada konsumen melalui mekanisme penambahan harga jual. Beban ini sekaligus dirasakan oleh produsen barang dan jasa (pengusaha) disaat ekonomi sedang mengalami tekanan dan daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan.

Upaya meningkatkan PAD artinya memperluas ruang fiskal akan berhadapan dengan situasi perekonomian nasional-lokal: semakin menambah beban pengusaha dan masyarakat atau memberi insentif bagi mereka dengan konsekuensi fiskal tertentu. Sebuah pilihan yang menuntur kebijakan dan visi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4. Trend Sektor Pariwisata terhadap PAD dan APBD Kabupaten Magelang

Sektor Pariwisata menjadi *trigger* (pemicu) bagi dampak pengganda bagi PAD dan APBD Kabupaten Magelang. Candi Borobudur sebagai magnet utama sekaligus primadona pariwisata Kabupaten Magelang, melalui jumlah pengunjung akan mendorong tingkat hunian (*okupansi hotel*) dan sektor UMKM dengan catatan jumlah pengunjung diikuti

dengan lama kunjungan (*length of stay*) yang juga meningkat. Lama kunjungan akan mendorong pembelanjaan pengunjung selama tinggal di Kabupaten Magelang. Ujung dari semua itu adalah peningkatan pendapatan pelaku industri pariwisata Kabupaten Magelang termasuk peningkatan pajak dan retribusi daerah dari sektor pariwisata tersebut.

5.2 PARIWISATA DI KABUPATEN MAGELANG

1. Arah perkembangan pariwisata Kabupaten Magelang

Kecenderungan pariwisata terkini seperti *Quality Tourism* (Wisata Berkualitas), *Special Interest Tourism* (Wisata Minat Khusus), Pariwisata Berbasis Tradisi dan Budaya, Pariwisata Berbasis Aktivitas pun Pariwisata berbasis *Niche* Masa Depan mesti dicermati dan diantisipasi oleh semua pelaku jasa pariwisata dengan pendekatan *pentahelix*.

2. RIPPARDA dan RPJMN Pembangunan Pariwisata Nasional

Semua pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Magelang mesti dapat mengambil keuntungan dari RPJMN Pembangunan Pariwisata Nasional yang menjadikan Candi Borobudur sebagai tujuan wisata super prioritas dan strategis. RIPPARDA Kabupaten Magelang mesti disinergikan dengan RPJMN Pembangunan Pariwisata Nasional pada tingkat strategis – taktis dan politis – birokratis serta diimplementasikan di lapangan.

3. Kawasan Strategis Pariwisata(KSP) dan Desa Wisata

Konsep KSP dan Desa Wisata terlihat masih berjalan sendiri-sendiri. Semestinya pengembangan Desa Wisata mengikuti konsentrasi masing-masing KSP dan sesuai dengan potensi serta keunikan masing-masing Desa Wisata. Profil Desa Wisata di Kabupaten Magelang masih mengikuti Jaringan Desa Wisata (Jadesa) yang diinisiasi oleh Kemenparekrif dimana keunikan masing-masing Desa Wisata belum terekspos semuanya dengan narasi yang cukup mendukung.

4. Candi Borobudur masih merupakan magnet utama dan primadona pariwisata Kabupaten Magelang yang membawa dampak positif sekaligus negatif bagi pelaku jasa wisata secara langsung dan tidak langsung.
5. Candi Borobudur sebagai magnet utama dan primadona pariwisata Kabupaten Magelang bahkan menempatkannya di tahun 2024 sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) dengan wisman terbanyak sejumlah 230.295 orang dan Kabupaten Magelang sebagai kabupaten dengan wisman terbanyak sebanyak 97.233 orang menurut data statistik pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur bersama Candi Mendut dan Candi Pawon mendominasi jumlah kunjungan wisman se Jawa Tengah.
6. Namun demikian pembatasan kunjungan wisata ke Candi Borobudur membawa lebih banyak dampak negative terhadap pelaku jasa pariwisata sebagaimana nampak dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Balitbangda di tahun 2023 dan hingga kini dampak tersebut masih terasa.
7. Selain Candi Borobudur, obyek wisata Ketep Pass adalah obyek wisata milik pemerintah Kabupaten Magelang yang mampu menyaingi apabila dibandingkan dengan obyek wisata lainnya dalam hal jumlah pengunjung dalam dan luar negeri maupun pendapatan obyek pariwisata dan tentunya kontribusi bagi PAD.
8. Pendapatan dan Kontribusi Obyek Wisata Ketep Pass bagi PAD Kabupaten Magelang adalah terbesar kedua setelah Candi Borobudur.
9. Perlunya dikembangkan pilar-pilar pariwisata penyangga Candi Borobudur dengan menggunakan RIPPARDA cq KSP A, B, C dan D secara lebih serius dan tidak terbatas hanya untuk obyek wisata milik Pemerintah Kabupaten Magelang saja namun juga melibatkan swasta.

5.3 POTENSI DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KETEP PASS

1. Daya Tarik Wisata Ketep Pass telah berusia 23 tahun sejak diresmikan oleh Presiden Megawati di 2002. Pembangunan fisik terakhir di tahun 2021 melalui DAK Kementrian dan hingga kini pemeliharaan sarana dan prasarana saja.
2. Ketep Pass mulai mengalami fase declining (penurunan) daya tarik wisata sehingga perlu dibranding ulang (rebranding) dengan beragam kegiatan dan Kerjasama lintas pelaku pariwisata di dalam maupun luar Kabupaten Magelang.
3. Perlu disiapkan juga peta kompetisi obyek wisata Kabupaten Magelang dengan obyek wisata di kabupaten sekelilingnya seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo beserta peluangnya bagi Kabupaten Magelang.
4. Interkoneksi dan integrasi antar obyek wisata Kabupaten Magelang menjadi penting diimplementasikan di lapangan oleh para pelaku industry pariwisata di Kabupaten Magelang.

5.4 KELEMBAGAAN PARIWISATA

1. BPOW saat ini

BPOW Ketep Pass sudah berusia 19 tahun sejak PKS antara Pemprov Jateng dan Pemkab Magelang dibuat ditahun 2006. Jalan menuju BUMD sudah dirintis dan sekarang ini mendapatkan momentumnya.

 - a. Diantara OPD Kabupaten Magelang, khususnya Sekretariat Daerah termasuk Bagian Perekonomian, Disparpora, Balitbangda , BPOW Ketep Pass dan bahkan Legislatif cq DPRD Kabupaten Magelang dan Bapak Bupati Magelang memiliki perhatian yang intens bagi pengembangan daya tarik wisata Ketep Pass sekaligus BPOW Ketep Pass.

- b. Momentum ini mesti ditanggapi lintas OPD dengan serius dan konkrit serta simultan dengan mempergunakan hasil kajian ini dan kajian-kajian sebelumnya.

2. Transisi menuju BUMD.

- a. Dibentuk satuan tugas dengan kewajiban membuat peta jalan (*road map*) BUMD pariwisata termasuk didalamnya adalah memenuhi berbagai persyaratan teknis, administratif dan dokumentasi termasuk berbagai kajian dan Analisa kelayakan usaha yang menyertainya.
- b. Disparpora memimpin inisiatif penyiapan modal kerja dan sumberdaya manusia yang akan mengelola BUMD pariwisata di masa mendatang
- c. Melibatkan semua pemangku kepentingan pariwisata (*pentahelix*) dalam proses-proses di atas.

BAB VI

REKOMENDASI

6.1 POTENSI DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KETEP PASS

Sebagai langkah awal pertama-tama dalam membangun strategi peningkatan belanja wisatawan, perlu dilakukan segmentasi terhadap profil wisatawan yang berkunjung ke Kab Magelang. Setelah itu diikuti dengan segmentasi DTW yang dapat mendukung kebutuhan dan keinginan wisatawan ke Magelang. Ada beberapa segmen yang memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama yang sesuai dengan karakter geografis Kabupaten Magelang dan juga memiliki pengaruh pada nilai belanja wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

Beberapa segmen unggulan yang dapat diprioritaskan dicoba dibagi dalam segmen geografis sebagai berikut:

1. Pembuatan Kawasan Strategis Pariwisata di Kabupaten Magelang. Kekayaan alam dan budaya di Kabupaten Magelang, perlu mendapat perhatian mendalam agar mampu menciptakan pariwisata berkualitas yang lebih berdampak kepada masyarakat, Salah satu upaya yang dapat dilakukan, diantaranya melalui upaya zonasi kawasan wisata.
2. Secara geografis pembagian daya tarik wisata di Kabupaten Magelang dibagi dalam 4 zona utama, yaitu:

a. KSP A

Kawassan ini berada di zona barat di sekitar yang berbatasan dengan lereng Sumbing, diantaranya Nepal van Java dan Silancur, adalah zona agraris yang banyak menarik minat wisatawan karena keindahan alam, agraris, dan aktivitas menaiki mobil terbuka.

b. KSP B

KSP B ini ada di sisi utara di sekitar Telomoyo, adalah zona pegunungan yang memiliki jalur pendakian dengan keindahan

alam dan budaya yang mendukung pariwisata. Publik mengenal kawasan ini sebagai bagian dari jalur khayangan. Salah satunya adalah Ketep Pass dan juga puncak Telomoyo menjadi satu-satunya gunung yang bisa dinaiki dengan kendaraan roda dua atau empat di Magelang.

c. KSP C

KSP C adalah kawasan yang berbatasan dengan Gunung Merapi. Kawasan ini memiliki ciri hampir sama dengan KSP A, namun memiliki akses yang lebih strategis karena dekat dengan Kota Solo, Kota Yogyakarta, dan Kota Semarang. Salah satunya adalah kawasan Ketep.

d. KSP D

KSP ini ada di sekitar Borobudur, adalah zona yang kaya wisata sejarah kelas dunia. Brand Image kawasan ini terbentuk oleh keberadaan Candi Borobudur. Candi ini mampu menjadi magnet bagi perkembangan.

Pembagian kawasan ini menorehkan nilai strategis di mana Ketep dan Ketep Pass berada dalam 2 kawasan yaitu KSP B dan KSP C.

Lokasi Ketep Pass ini merupakan zona strategis karena menghubungkan Magelang dan Solo. Di Kabupaten Magelang, Ketep Pass menjadi DTW yang paling banyak dikunjungi kedua setelah Candi Borobudur. Keberadaan Ketep Pass mampu menjadi magnet wisatawan sekaligus mendorong munculnya berbagai DTW lain di sekitar Ketep Pass, baik berbasis wisata alam maupun wisata budaya berbasis masyarakat. Bahkan di sekitar Ketep Pass pun ada beberapa candi yang dapat dioptimalkan sebagai DTW yang mendukung kawasan Magelang Timur.

6.2 Rekomendasi untuk pengembangan DTW Ketep Pass

1. Memperbaiki layanan atraksi dan fasilitas pendukung lain di Ketep Pass, antara lain:
 - a. Perkembangan Ketep Pass saat fase *decline* karena beberapa kondisi diantaranya adalah usia, minimnya inovasi dan perubahan tren ke wisata terbuka dan petualangan. Fenomena ini menurunkan kepuasan pengunjung di Ketep Pass dan memberi penilaian buruk terhadap DTW tersebut.
 - b. Melakukan inovasi di Ketep Pass, khususnya produksi film yang menjadi andalan saat ini, dan diganti dengan film yang memiliki kualitas lebih bagus dan direkomendasikan menggunakan teknologi digital dan interaktif. Memiliki beberapa referensi film akan lebih bagus, apalagi dibuat film yang interaktif atau setting theater 3D-7D
 - c. Melakukan inovasi di area *outdoor*, dengan menyediakan atraksi berupa kuliner dan kerajinan yang terkurasi dengan baik (d disesuaikan dengan karakter Ketep Pass). Kurasi kuliner harus bermuatan lokal dan berdampak pada masyarakat sekitar; namun memiliki syarat ketentuan kualitas minimal. Jika ada kuliner modern, diletakkan di zona yang berbeda sehingga memberi ruang pengembangan pada budaya lokal melalui sajian kuliner. Semua penyajian kuliner diharapkan menerapkan *live cooking* dan menggunakan *raw material* setempat.
 - d. Melakukan kurasi terhadap para pedagang yang terlibat di Ketep Pass dengan standar produk, pemasok, dan pelayanan yang berdampak ekonomi terhadap Kab magelang
 - e. Membaca feedback pengunjung sekaligus melakukan kurasi terhadap fasilitas yang ada baik secara langsung atau tidak langsung, di mana usulan, pendapat, kritik merupakan suatu bentuk masukan

2. Menambahkan Ketep Pass dengan atraksi prioritas lain selain melihat beberapa gunung, sebagai bentuk antisipasi jika cuaca tidak kondusif. Alternatif atraksi ini dapat dibangun di Ketep Pass ataupun di kawasan sekitarnya, yang mampu menciptakan aktivitas bagi wisatawan. Opsi membangun di kawasan sekitarnya diartikan juga dengan melibatkan partisipasi dari pihak ke-3 atau masyarakat sekitar,
 - a. Sebagai DTW terlaris setelah Candi Borobudur, Ketep Pass diharapkan mengambil target market yang sama (atau minimal sama) dengan target pengunjung Candi Borobudur;
 - b. Penambahan DTW dengan atraksi disesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada, di mana pada masa mendung Keunikan Ketep Pass relatif berkurang
 - c. Penambahan atraksi yang melibatkan masyarakat, di mana masyarakat dapat menampilkan produk budaya (kuliner, atraksi, dan sejenisnya)
3. Pariwisata di Ketep diharapkan dapat lestari dan berdampak positif bagi warga sekitar. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat di Ketep akan dapat menciptakan atraksi berbasis masyarakat. Bahkan diharapkan muncul DTW baru yang bersifat aktivitas bersama masyarakat.
 - a. Mendorong munculnya Desa Wisata dan Desa Budaya yang dikelola Bumdes atau Pokdarwis.
 - b. Munculnya UMKM / pelaku usaha di desa sekitar Ketep yang didukung dengan pembinaan yang baik
 - c. Mengedukasi manfaat pariwisata kepada masyarakat dan juga mengedukasi untuk membentuk kelompok sadar wisata untuk mengemas budaya lokal sebagai atraksi wisata
 - d. Memantapkan posisi kelembagaan sebagai pelaku sekaligus penggerak bagi aktivitas warga, melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

4. Tren wisata berbasis petualangan atau aktivitas saat ini menjadi idola dan juga potensi yang mampu men'*generate*' perekonomian, dengan membuat atraksi-atraksi yang berbasis kehidupan masyarakat.
 - a. Mendorong penciptaan wisata berbasis pengalaman di desa sekitar Ketep, misalnya Tracking Gunung, Memasak dengan Kayu, Menatah Batu Candi, dan sejenisnya.
 - b. Mendorong munculnya ketrampilan bisnis dan ekonomi, berkaitan dengan pemasaran dan branding, dengan kemampuan menciptakan paket wisata, kemampuan melakukan pendampingan, kemampuan membuat perjalanan wisata
 - c. Memastikan setiap kegiatan dikelola dengan baik dan diawasi pelaksanaannya dengan baik oleh Pokdarwis dan Bumdes

Di samping itu, area Ketep Pass juga dikembangkan wisata berbasis pengalaman. Jenis wisata ini selain meningkatkan belanja (pemasukan DTW) juga mampu meningkatkan lama kunjungan. Beberapa model yang bisa dibuat sebagai wisata berbasis pengalaman di Ketep Pass, diantaranya:

- Membuat kuliner berbasis *live cooking* dengan standar kurasi tertentu
 - Membuat atraksi budaya dalam bentuk pertunjukan dan non pertunjukan
 - Membuat kegiatan kerajinan bersama dan atau dipertunjukkan kepada wisatawan
 - Menata kembali kriteria dan jenis souvenir yang disediakan di Ketep Pass
5. *Quality Tourism* merupakan rangkuman kebutuhan sekaligus tuntutan wisatawan saat ini terhadap pelayanan DTW yang dinilai harus ditingkatkan. Beberapa tuntutan wisatawan terhadap pelayanan dan bentuk atraksi diantaranya : menyajikan petualangan di lereng Merapi ,

mempelajari budaya, berinteraksi dengan warga lokal, menerapkan prinsip keberlanjutan, dan juga memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Oleh karena itu direkomendasikan setiap DTW mulai memperbaiki pelayanan dengan cara:

- a. Pelatihan tentang *quality tourism* dan penerapannya di setiap DTW
 - b. Melakukan penilaian, prelombaan, dan akreditasi penerapan *quality tourism*
 - c. Mengembangkan pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat langsung maupun tidak langsung
 - d. Mengajak wisatawan untuk berpartisipasi pada aktivitas wisata berkualitas, seperti menjaga kebersihan
6. Salah satu tren dalam pariwisata adalah munculnya aktivitas wisata yang disesuaikan dengan minat khusus yang dimiliki oleh setiap wisatawan yang lokasinya ada di sekitar Ketep. Kegiatan ini mungkin bukan kegiatan wisata, tetapi kegiatan tertentu yang menarik minat wisatawan, serti diantaranya mengikuti kegiatan menanam sayur atau memetik sayur di desa-desa di sekitar Ketep. Oleh karena itu direkomendasikan untuk mengembangkan wisata minat khusus atau *special interest tourism* di Ketep melalui:
- a. Membuat paket wisata bercocok tanam di beberapa desa di sekitar Ketep
 - b. Membuat paket wisata belajar candi dan memahat batu candi di sekitar Sengi, Dukun (jalur menuju Ketep dari arah magelang)
 - c. Membuat paket live in (hidup bersama masyarakat dalam bentuk belajar lapangan / pesantren dan atau masyarakat pedesaan) di desa sekitar Ketep dengan mensinergikan dengan kegiatan di Ketep
7. Segmen Anak Muda saat ini menjadi segmen mayoritas yang melakukan perjalanan wisata di Indonesia Profil wisatawan muda ini memiliki 3 karakter pokok, yaitu fasih menggunakan media digital, menyukai

petualangan dan pengalaman baru, serta memiliki daya beli yang belum tinggi. Namun, segmen ini sangat ingin memperkaya liburan dengan serangkaian aktivitas dan mendukung pencapaian-pencapaian tertentu yang layak di'posting' Beberapa langkah yang identik dengan peningkatan belanja wisatawan generasi muda adalah:

- a. Setiap DTW harus meningkatkan atraksi yang mengandung pengalaman baru / melakukan sesuatu yang baru di DTW;
- b. Mengemas atraksi dalam konten digital dan diupayakan untuk mencapai respon maksimal serta memaksimalkan konten-konten tentang Ketep Pass di sosial media;
- c. Ketep Pass dan DTW lain di Ketep harus membuka komunikasi yang continue / responsif dengan calon wisatawan, khususnya melalui media sosial. Pengelola harus memperhatikan feedback/pertanyaan dari wisatawan;
- d. Mengemas kuliner menjadi atraksi wisata petualangan karena menjadi kegiatan idola anak muda.

8. Keberadaan Borobudur menjadi magnet untuk kedatangan wisata di Kabupaten Magelang. Sudah menjadi berkah bagi kabupaten ini, namun potensi ini harus ditangkap dengan lebih baik. Untuk menuju Borobudur, wisatawan mayoritas melalui Kota Yogyakarta, Kota Semarang, maupun Kota Solo. Perjalanan pun memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Optimalisasi keberadaan Borobudur dapat dilakukan dengan beberapa strategi:

- a. Membuat paket wisata yang disesuaikan dengan kegiatan wisatawan di Borobudur;
- b. Membuat informasi yang dikaitkan antara Borobudur dan Ketep, khususnya Ketep Pass;
- c. Membuat kegiatan wisata yang segmennya sama dengan segmen wisatawan di Borobudur

9. Dalam beberapa kasus event di pariwisata di beberapa kota, diselenggarakan event yang baik dan bertarget market di luar daerahnya; akan berdampak positif terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan. Event-event baik yang masal seperti **Borobudur Marathon** atau event music Slank menjadi contoh efektivitas event untuk mendorong kunjungan wisata. Oleh karena itu direkomendasikan untuk membuat serangkaian event sebagai katalis kunjungan dan belanja wisatawan.

10. Kondisi perekonomian yang kurang baik berdampak pada turunnya daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah ke bawah. Kondisi ini memberi dampak pada perjalanan wisata. Fenomena yang muncul adalah, adanya pelaku wisata tipis-tipis, atau berwisata di lokasi yang dekat. Oleh karena itu pengelola Ketep Pass diharapkan tetap menangkap segmen wisatawan lokal, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mengaktifkan atraksi rutin pada moment-moment tertentu, dengan pelengkap kuliner dan produk-produk UMKM. Diupayakan atraksi melibatkan komunitas di Kabupaten Magelang
- b. Melakukan promosi dalam scope lokal dengan melibatkan leader / inflencer lokal.

Berkaitan dengan kondisi perekonomian, pada kajian belanja umum, penurunan daya beli tidak banyak berdampak di kelas atas. Mereka tetap memiliki *willingness to pay* yang tinggi dan mereka meminta kualitas pelayanan yang lebih baik, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Membuat program-program wisata untuk kelas menengah ke atas, dengan layanan premium, SDM layanan prima, baik personal ataupun bekerjasama dengan biro perjalanan.
- b. Menaikkan kualitas produk dan pelayanan agar sesuai dengan segmen marketnya.

11. Seiring perkembangan minat konsumen dan seiring perkembangan teknologi, pola pergerakan wisatawan menjadi semakin liquid. Wisatawan banyak melakukan perbandingan dan memilih yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan SDM yang berkualitas agar mampu membuat layanan prima kepada wisatawan. Rekomendasi untuk peningkatan SDM adalah:

- a. Memetakan kebutuhan profesi yang sesuai dengan perkembangan produk dan layanan, baik untuk pelayanan dasar, wisata berkualitas, maupun wisata minat khusus
- b. Mengadakan pelatihan dan sertifikasi profesi, sesuai bidang yang dibutuhkan, dan lebih baik lagi sertifikasi profesi ini disubsidi pembiayaannya oleh pemerintah Kab Magelang
- c. Mengembangkan tenaga pendamping wisata minat khusus sesuai tema
- d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak ke-3 seperti lembaga profesi dan akademisi untuk pembentukan SDM pariwisata di Ketep dan sekitar

12. Teknologi komunikasi digital dibutuhkan pengelola DTW agar mampu berkomunikasi secara 24 jam dengan wisatawan, sehingga memberi dampak pada peningkatan kepuasan dan belanja wisatawan. Gen Z yang menjadi mayoritas wisatawan yang ke Kabupaten Magelang sangat intensif menggunakan media digital. Mereka juga mampu melipatgandakan penetrasi informasi

Rekomendasi untuk pengelolaan informasi digital adalah:

- a. Pemerintah dan pengelola Ketep Pass mengedepankan aktivasi di media sosial, baik melalui influencer maupun netizen
- b. Meningkatkan kualitas pesan atau konten yang dibuat oleh Ketep Pass atau public di sekitarnya; dan juga kualitas pengaturan jadwal dan pemilihan media
- c. Meningkatkan kualitas pengelola media digital di Ketep Pass

13. Peran teknologi AI (*artificial intelligent*) semakin dominan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata. Penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi, membuat perencanaan, serta mengidentifikasi berbagai kepentingan. AI dapat digunakans sebagai bagian dari pelayanan berupa edukasi, alih bahasa, dan lain-lainnya. AI juga bisa menjadi atraksi dalam kegiatan wisata, misalnya AI tentang guguran lava gunung berapi.

Rekomendasi untuk pengelolaan AI adalah:

- a. Mewajibkan penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, baik di Ketep Pass atau di sekitarnya, misal berupa CCTV online, IoT, QR, dan sejenisnya
- b. Mewajibkan penggunaan AI untuk kegiatan promosi, baik AI sebagai konten promosi atau penggunaan AI untuk
- c. Mewajibkan penggunaan AI secara proporsional untuk atraksi wisata, baik di Ketep Pass atau di DTW saekitarnya

14. Koneksitas Kabupaten Magelang dengan Kota Yogyakarta, Kota Semarang, dan Kota Solo memiliki arti penting, seiring dengan perkembangan jalan tol yang menghubungkan dengan 3 kota tersebut. Akses jalan tol berpengaruh postif terhadap tingkat kunjungan jika menerapkan strategi berikut:

- a. Meningkatkan kualitas jalan dan signage menuju lokasi wisata, baik di Ketep Pass maupun DTW pendukungnya
- b. Pengelola DTW harus memastikan ketersediaan parkir dan pengelolaan parkir yang baik
- c. Meningkatkan informasi kualitas jalan menuju lokasi DTW Ketep Pass di media promosi secara detail baik untuk kendaraan besar atau kendaraan kecil

15. Salah satu kepariwisataan di Kabupaten Magelang ada pembatasan jumlah kunjungan ke Candi Borobudur, dikarenakan faktor kelestarian bangunan. Kondisi ini berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dan harus segera dicari jalan keluarnya.

- a. Rekomendasi pertama, tentu berkaitan dengan pengaktifan atraksi-atraksi wisata di sekitar candi Borobudur. Pengaktifan ini bekerjasama dengan komunitas desa dan juga pelaku wisata di sekitar candi. Tujuannya adalah membuat aktivitas berlatar belakang Candi Borobudur, seperti live in, menatah batu, agrowisata, dan sejenisnya.
- b. Rekomendasi kedua, dilakukan oleh DTW lain yang populer di Magelang, seperti Ketep Pass. Ketep Pass mengambil peran sebagai DTW alternatif di Magelang yang 'magnet' atau 'landmark'-nya tidak kalah jauh dengan Borobudur.

16. Keberadaan Ketep Pass mengangkat munculnya berbagai DTW lain di sekitarnya. Oleh karena itu Ketep Pass harus mampu menarik minat pengunjung, sama seperti Borobudur. Namun demikian, Ketep Pass perlu diangkat kembali karena sudah decline.

Rekomendasi untuk kondisi ini adalah:

- a. Merevitalisasi keberadaan Ketep Pass agar disesuaikan dengan perkembangan permintaan pengunjung, meliputi:
 - Membangun kembali layanan audio visual dengan teknologi yang lebih canggih
 - Membangun atraksi baru yang berskala besar dan mampu menjadi magnet kedatangan wisatawan.
 - Setelah diberlakukannya tren keberlanjutan dalam pariwisata, maka pembangunan Ketep diharapkan menyesuaikan ketentuan ecotourism

- Menjadikan Ketep Pass sebagai hub dari pengembangan kawasan Ketep, sekaligus menjadi pusat informasi dan pelayanan kepada wisatawan.
- b. Mengembangkan kawasan Ketep dan Sawangan dengan beberapa kegiatan berkaitan dengan pariwisata:
 - Mengoptimalkan potensi alam di sekitar Ketep Pass, seperti air mancur, agro wisata, desa wisata, candi, dan sejenisnya
 - Mengoptimalkan pembangunan wisata buatan yang menerapkan ecotourism (kelestarian dan keberlanjutan) di Ketep
 - Mengoptimalkan kelembagaan dan pengembangan SDM untuk mengelola dan mendukung produk/atraksi wisata di Ketep

17. Memperhatikan *Sustainability Tourism*

Perhatian wisatawan khususnya wisatawan mancanegara terhadap praktik keberlanjutan di dalam pengelolaan DTW cenderung meningkat. Oleh karena itu beberapa langkah berkaitan dengan keberlanjutan dalam pariwisata yang sebaiknya dilakukan di Ketep Pass adalah:

- a. Merekomendasikan pembangunan wisata yang meminimalisir penggunaan material yang tidak ramah lingkungan
- b. Merekomendasikan pembangunan dengan meminimalisir bangunan yang bertapak ke tanah di kawasan agro
- c. Membangun keterlibatan dengan warga lokal sebagai bagian dari Ketep Pass atau melakukan aktivitas ekonomi mandiri berkaitan dengan aktivitas pariwisata
- d. Melakukan beberapa kegiatan yang meminimalisir sampah atau residu lainnya dan membuat pengelolaan sampah yang baik
- e. Meminta pengelola DTW Ketep Pass dan DTW lain di sekitarnya memberi edukasi dan sanksi terhadap masalah sampah

18. Sinergi *pentahelix* pelaku wisata

Untuk mengembangkan kualitas atraksi dan layanan wisata dengan lebih baik, diperlukan kerjasama yang baik dengan pelaku wisata lain, akademisi, dan juga pemerintah.

Beberapa rekomendasi terhadap kerjasama *pentahelix* adalah:

- a. Ketep Pass memperkuat sinergi dengan pelaku wisata seperti HPI, ASITA, PHRI, PUTRI, GIPI, INVENDO untuk menyusun berbagai paket wisata yang dapat dikembangkan di kawasan Ketep dan sekitarnya
- b. Ketep Pass berkolaborasi dengan akademisi untuk merumuskan konsep atraksi dan pengembangan DTW yang mampu meningkatkan LOS dan Belanja Wisatawan
- c. Ketep Pass mengandeng para ahli berkaitan dengan pengelolaan agro wisata, pentunjukan dan budaya, dan juga sustainability energi; untuk mengembangkan destinasi wisata yang ramah lingkungan
- d. Ketep Pass menggandeng media untuk memberi dukungan pada munculnya aktivitas-aktivitas lokal sehingga diketahui oleh publik dan menjadi atraksi wisata

19. Memasukkan event dalam CoE Nasional

Dalam beberapa kasus event di Indonesia, setiap event yang masuk di kalender CoE (Calendar of Event) Pariwisata mendapat atensi besar dari masyarakat dan cenderung dikunjungi oleh wisatawan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk membuat dan mengembangkan beberapa event yang diarahkan masuk dalam CoE Nasional

20. Brand Management dan Brand Communication di Ketep Pass

Maraknya perkembangan berbagai destinasi wisata dan DTW khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta menimbulkan narasi kebingungan dan pilihan di wisatawan. Oleh karena itu perlu

membangun branding di Ketep Pass agar selalu mendapat tempat prioritas di benak calon wisatawan.

Rekomendasi berkaitan dengan brand management adalah memastikan pengelola Ketep Pass dan juga beberapa DTW di sekitarnya memiliki SOP kegiatan, selalu memperbaiki SOP, dan melaksanakan SOP dengan baik. Di samping itu setiap pengelola DTW responsif terhadap feedback yang diberikan wisatawan baik langsung maupun melalui sosial media.

Rekomendasi berkaitan dengan brand communication adalah menginstruksikan pengelola Ketep Pass dan DTW di sekitar Ketep Pass selalu melakukan komunikasi kepada publik dan stakeholder lainnya. Khusus pada publik, pengelola harus rajin berkomunikasi secara baik dan continue, sekaligus melakukan komunikasi 2 arah antara wisatawan dan pengelola DTW.

6.3 KELEMBAGAAN PARIWISATA KETEP PASS

Rekomendasi untuk Kelembagaan Pariwisata Ketep Pass cq BPOW Ketep Pass :

1. Membuat pemutakhiran perencanaan sumberdaya manusia untuk lima tahun ke depan termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas lainnya termasuk rencana suksesi kepemimpinan BPOW Ketep Pass
2. Membuat Rencana Strategis BPOW Ketep Pass selama lima tahun kedepan dimana poin 1 menjadi bagian didalamnya agar menjamin keberlanjutan organisasional BPOW Ketep Pass
3. Memasukkan poin 1 dan 2 ke dalam anggaran BPOW Ketep Pass dan mengajukannya ke Disparpora Kabupaten Magelang
4. Kolaborasi dan Kerjasama dengan pengelola obyek wisata milik Pemkab Magelang dan atau swasta untuk paket tiket terusan dan outdoor events bersama

5. Bekerjasama dan berjejaring dengan ASITA, PHRI dan asosiasi serta komunitas pariwisata lainnya untuk meningkatkan gairah kepariwisataan di Magelang dan sekitarnya

6.4 TRANSISI MENUJU KELEMBAGAAN BUMD PARIWISATA

Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Magelang :

1. Dibentuk satuan tugas dengan kewajiban membuat peta jalan (*road map*) BUMD pariwisata termasuk didalamnya adalah memenuhi berbagai persyaratan teknis, administratif dan dokumentasi termasuk berbagai kajian dan Analisa kelayakan usaha yang menyertainya;
2. Disparpora memimpin inisiatif penyiapan modal kerja dan sumberdaya manusia yang akan mengelola BUMD pariwisata di masa mendatang;
3. Melibatkan semua pemangku kepentingan pariwisata (*pentahelix*) dalam proses-proses diatas.